

# Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal

Direktorat  
Kebudayaan

**Pengantar:**  
**Prof. Dr. Suhartono**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta



919 803  
NUR

# Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal

**Pengantar:  
Prof. Dr. Suhartono**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta

# SEJARAH REVOLUSI DI TINGKAT LOKAL

Disusun oleh:  
Nurdiyanto, Darto Harnoko, Tugas Tri Wahyono

© penulis, 2013

Desain sampul : Tim Elmaterra  
Setting & Layout : Tim Elmaterra

Cetakan 2013

Diterbitkan oleh



Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)  
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Jl. Brigjend Katamso 139 Yogyakarta  
Telp. (0274) 373241, 379308 Fax. (0274) 381555  
email: [senitra@bpsnt-jogja.info](mailto:senitra@bpsnt-jogja.info)  
website: <http://www.bpnst-jogja.info>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis  
dari Penulis dan Penerbit.

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nurdiyanto, Darto Harnoko, Tugas Tri Wahyono  
Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal, Cetakan I,  
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta

*Gambar sampul: dokumen Elmaterra*

xiii + 188 hlm.; 16 x 21 cm

I. Judul

1. Penulis

# **KATA SAMBUTAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, buku ini telah selesai dicetak dengan baik. Tulisan dalam sebuah buku tentunya merupakan hasil proses panjang yang dilakukan oleh penulis (peneliti) sejak dari pemilihan gagasan, ide, buah pikiran, yang kemudian tertuang dalam penyusunan proposal, proses penelitian, penganalisaan data hingga penulisan laporan. Tentu banyak kendala, hambatan, dan tantangan yang harus dilalui oleh penulis guna mewujudkan sebuah tulisan menjadi buku yang berbobot dan menarik.

Penelitian budaya merupakan topik yang sangat menarik. Hingga kapanpun tema budaya tidak akan pernah habis untuk dikaji dan diteliti. Akan tetapi di sisi lain permasalahan budaya juga merupakan masalah yang rumit, pelik dan peka karena menyangkut subyektifitas pemilik maupun pelaku budaya yang bersangkutan. Seringkali dijumpai permasalahan budaya tidak bisa terjawab secara tuntas karena pendekatan dan metode yang kurang tepat dalam proses penganalisaan. Terlebih jika mengupas permasalahan budaya yang berhubungan dengan pewarisan nilai, revitalisasi nilai,



pembentukan karakter, sehingga masih harus membutuhkan instrumen yang konkrit dalam penganalisaan data.

Oleh karena itu, kami sangat menyambut gembira atas terbitnya buku ini. Apalagi buku ini mempunyai tema tentang kebudayaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ucapan terima kasih tentu kami sampaikan kepada para peneliti dan semua pihak yang telah berusaha membantu, bekerja keras untuk mewujudkan buku ini bisa dicetak dan disebarluaskan kepada instansi, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, peserta didik, hingga masyarakat secara luas.

Akhirnya, ‘tiada gading yang tak retak’, buku inipun tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, masukan, saran, tanggapan dan kritikan tentunya sangat kami harapkan guna peyempurnaan buku ini. Namun demikian harapan kami semoga buku ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, November 2013



**Dra. Christriyati Ariani, M.Hum**

# KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto**

Dalam historiografi dikenal apa yang disebut *write and rewrite* atau juga *revise and revise*, artinya penulisan sejarah tidak final atau berhenti tetapi berjalan terus guna menemukan perspektif baru atau temuan baru (*new finding*), karena itu sejarah harus terus ditulis ulang dan diperbarui. Perspektif baru itu berkaitan dengan sudut pandang ideologi keilmuan yang sedang berkembang atau subyektivitas peneliti. Jelas semuanya sangat tergantung dari kecenderungan dan perkembangan ilmu sejarah atau boleh dikatakan bahwa sejarah itu juga anak zaman.

Penelitian sejarah lokal sudah berlangsung lebih dulu dari pada sejarah nasional. Jika sejarah lokal berfokus pada kepentingan kelompok lokal atau lingkungan geografis dan administratif lokal, maka pada tingkat lokal atau pun mikro sudah memiliki penulisan sejarah. Penulisan sejarah keluarga, penulisan sebuah daerah sudah dilakukan di Eropa pada abad ke 17-18 dan di Indonesia sebenarnya juga sama, yaitu ditulis dalam bentuk babad, hikayat, tambo, dan sebagainya.

Jika sejarah lokal dikaitkan dengan revolusi Indonesia tentu saja sangat menarik untuk dikaji, karena sejarah lokal memiliki



spesifikasi di satu pihak dan distingsi di pihak lain. Akan tetapi juga perlu diperhatikan apakah yang terjadi tingkat lokal itu merupakan kepanjangan sejarah pada tingkat nasional, dengan kata lain sejarah nasional di tingkat lokal dengan melihat factor-faktornya ada persamaan antara nasional dengan lokal. Sebaliknya, tentu saja apakah ada sumbangan sejarah lokal terhadap sejarah nasional, karena kejadian di tingkat lokal akan merembet dan menyebar ke tingkat nasional, atau keduanya berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada korelasinya.

Penulisan sejarah lokal pada periode revolusi telah diawali antara lain oleh John R.W. Smail, "*Bandung in the Early Revolution, 1945-1946*" (1962); R. Cribb, "*Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949*" (1990), dan Bill Frederick, "*Pandangan dan Gejolak, Surabaya 1926-1946*" (1989), Suhartono, "*Surakarta in the Early Revolution*" (paper LAHA IV, 1974), "*Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta*" (1983), dan masih banyak lagi yang mempunyai perhatian tentang lokalitas dan revolusi. Pada tingkat awal tentu sejarah revolusi Indonesia sangat menarik, sebab Indonesia adalah satu-satunya negara baru, bekas jajahan, yang terus menegakkan kemerdekaan terhadap rongrongan negara asing dan rongrongan penjajah Belanda yang akan menancapkan kembali kuku penjajahnya. Kedua, adalah masalah heroisme lokal, artinya seberapa jauh komunitas lokal, tentara dan rakyat, berjuang bersama menegakkan kemerdekaan di tingkat lokal. Perlu diperhatikan unsur semangat lokal, heroisme, dan pengorbanan. Itu semua adalah nilai luhur revolusi bangsa Indonesia yang harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa.

Tiga karya sejarah revolusi pada tingkat lokal, yaitu penelitian berlokus di Pacitan, Sragen dan satu lagi tentang pendidikan politik tentara. Menggugah kembali dan member inspirasi betapa kuatnya perjuangan bangsa pada tingkat lokal. Memang ada sekian banyak

perjuangan lokal, tetapi belum semuanya dilakukan penelitian atau dideskripsikan sebagai penyebaran pengertian sejarah lokal yang ikut berperan dalam konteks sejarah nasional.

Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap penelitian baru diharapkan mendapatkan perspektif dan temuan baru. Disini akan bisa dilihat keluasan peneliti dan ketajamannya dalam membuat interpretasi dan narasi sejarah. Sudah tentu hal ini berkaitan dengan kecenderungan dan perkembangan penelitian sejarah, termasuk temuan sumber baru dan keluasan bibliografinya.

Yang jelas tiga penelitian itu akan mengisi lowongan penelitian sejarah lokal Indonesia. Disini juga akan dilihat betapa beragamnya dimensi, aspek, dan perspektif setiap sejarah lokal di Indonesia. Pasti sejarah lokal akan membangun simfoni sejarah sehingga sejarah menjadi makin bervariasi dan menyenangkan pembacanya. Sejarah adalah cerita berdasarkan fakta dengan argumentasi rasional dalam hubungan sebab-akibat. Mari kita baca khasanah sejarah lokal dan tentunya kita petik manfaatnya bagi generasi penerus bangsa. Selamat membaca.

Yogyakarta, 10 November 2013





# DAFTAR ISI

- KATA SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA .....	iii
- KATA PENGANTAR.....	v
- DAFTAR ISI .....	ix
- DAFTAR TABEL.....	xi
- DAFTAR FOTO.....	xiii

☞ PACITAN MARKAS GERILYA PANGLA BESAR JENDERAL SUDIRMAN PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN KEDUA (1948-1949) .....	1
- Bab I Pendahuluan.....	3
- Bab II Gambaran Umum Kabupaten Pacitan.....	11
- Bab III Agresi Tentara Belanda Ke Pacitan .....	27
- Bab IV Pacitan Sebagai Markas Gerilya Panglima Besar Soedirman .....	41
- Bab V Penutup .....	53
- Daftar Pustaka.....	57
- Daftar Informan .....	59

☞ KRIMINALITAS DI SRAGEN PERIODE 1948-1949: KAJIAN REVOLUSI SOSIAL DI TINGKAT LOKAL ....	61
- Bab I Pendahuluan.....	63
- Bab II Gambaran Umum Kota Sragen Pada Masa Revolusi .....	73



- Bab III Sragen pada Awal Revolusi.....	85
- Bab IV Sragen pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua .....	109
- Bab V Penutup .....	212
- Daftar Pustaka.....	125
- Daftar Informan .....	133

<b>❧ REALISASI PROGRAM “PEPOLIT” (PENDIDIKAN POLITIK TENTARA) DI JAWA TAHUN 1946-1948 .....</b>	<b>135</b>
- Bab I Pendahuluan.....	137
- Bab II Perkembangan Politik dan Militer di Jawa (1946-1949).....	145
- Bab III Program Pepolit Amir Syarifuddin .....	161
- Bab IV Dampak Pelaksanaan Pepolit.....	177
- Bab V Penutup .....	181
- Daftar Pustaka.....	183

## DAFTAR TABEL

ca	KRIMINALITAS DI SRAGEN PERIODE 1948-1949: KAJIAN REVOLUSI SOSIAL DI TINGKAT LOKAL	
-	Tahanan yang Direkrut untuk Berjuang Agustus 1946 .....	106
-	Daftar Orang Cina yang Diculik Pada Tahun 1947-1949 .....	117



## DAFTAR FOTO

<b>❧</b>	<b>PACITAN MARKAS GERILYA PANGLA BESAR JENDERAL SUDIRMAN PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN KEDUA (1948-1949)</b>	
Foto 1.	Markas Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman .....	47
Foto 2.	Para Pengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman .....	48

**PACITAN: MARKAS GERILYA  
PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN  
PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN  
KEDUA (1948-1949)**

Nurdiyanto



# BAB I

## PENDAHULUAN

“Merdeka atau Mati”. Itulah semboyan bangsa Indonesia di dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaannya. Kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah hadiah dari bangsa lain, bukan dari Belanda, bukan dari Jepang, dan bukan pula dari siapapun. Sesungguhnya kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat, hasil dari pengorbanan jiwa, raga, dan harta benda dari seluruh bangsanya. Namun pada kenyataannya proklamasi kemerdekaan itu juga melahirkan suatu pertikaian yang sangat fundamental antara Indonesia dengan Belanda. Bangsa Indonesia menganggap dirinya telah merdeka, berdaulat, dan mempunyai pemerintahan sendiri, sedangkan Belanda masih tetap berpegang teguh pada pendiriannya sebagai pihak yang menjajah (Simatupang, T.B,1981: 61).

Bangsa Indonesia memerlukan lebih dari empat tahun untuk menyelesaikan pertikaian mengenai kedaulatan atas negaranya. Untuk mengatasi pertikaian itu Pemerintah Indonesia menempuh dua jalur perjuangan yakni diplomasi dan militer. Dua kali Belanda mengadakan serbuan secara besar-besaran dan terang-terangan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Belanda menyebut

tindakannya itu dengan *Aksi Polisionil* yang pertama dan kedua, sedangkan bangsa Indonesia menyebutnya dengan Agresi Belanda Pertama dan Kedua. Jadi secara keseluruhan dalam kurun waktu antara Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dapat disebut dengan Perang Kemerdekaan (Simatupang, T.B,1981: 61).

Pada masa Perang Kemerdekaan II (1948-1949) di Indonesia berlaku pemerintahan militer atas Instruksi Markas Besar Komando (D) Jawa atau MBKD No. 1 tanggal 20 Desember 1948, yang susunannya diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30, Peraturan Pemerintah No. 70, dan Instruksi Panglima Besar Angkatan Perang atau PBAP (Nasution, A.H: 1980, 133-136). Pemerintahan itu dalam prakteknya adalah pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Dalam lingkungan pemerintahan ini tenaga-tenaga militer membantu rakyat, namun sebaliknya rakyat juga membantu keamanan dan kesejahteraan militer (Djamhari, S.A: 1967, 14).

Selama perang kemerdekaan berlangsung, telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Baik korban harta benda, maupun jiwa raga dipersembahkan demi tegaknya harga diri bangsa. Korban berjatuhan tidak hanya menimpa kepada para pejuang yang mengangkat senjata, tetapi yang menanggung beban penderitaan adalah rakyat pada umumnya. Demikian halnya dengan adanya semboyan “Merdeka atau Mati”, bukan sekedar slogan politik belaka melainkan benar-benar dibayar mahal oleh pengorbanan para pejuang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan sampai pelosok desa. Tidak terkecuali untuk wilayah Kabupaten Pacitan, yang pada tahun 1948-1949 seluruh komponen masyarakatnya baik pejuang bersenjata, aparat pemerintah, maupun rakyat biasa saling bahu membahu untuk tetap mempertahankan wilayahnya dari ancaman



Belanda. Selama perjuangan fisik berlangsung, wilayah Kabupaten Pacitan pada hakekatnya lebih merupakan suatu pangkalan atau pos penyusunan strategi dalam perjuangan gerilya. Sementara itu di beberapa wilayahnya menjadi markas gerilya Panglima Besar Sudirman sebelum kembali ke Yogyakarta. Sebagai Panglima Besar Jendral Sudirman memilih meninggalkan Ibukota Yogyakarta untuk melakukan perang gerilya daripada ditahan Belanda. Dipilihnya Pacitan sebagai salah satu basis perjuangannya, karena ditinjau dari segi militer beberapa wilayahnya dirasa aman dari jangkauan tentara Belanda.

Kabupaten Pacitan merupakan satu di antara beberapa kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur. Selama masa perjuangan fisik sejak tahun 1948 hingga tahun 1949, rakyat Pacitan ikut berjuang membela kemerdekaan bangsanya. Hal itu menunjukkan sikap patriotisme dan loyal terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Atas dasar itulah seberapa besar peranan rakyat dan militer dalam andil mempertahankan kemerdekaannya.

Dengan melihat uraian diatas maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan apa yang menjadikan wilayah Kabupaten Pacitan menjadi markas gerilya Panglima Besar Sudirman.
2. Mengapa wilayah Kabupaten Pacitan menjadi pos terakhir Panglima Besar Sudirman dalam bergerilya sebelum kembali ke Ibukota Yogyakarta.
3. Mengapa Pacitan menjadi pos terlama jika dibandingkan pos yang lain selama Panglima Besar Sudirman bergerilya.
4. Bagaimana peranan rakyat Pactian selama Panglima Besar Sudirman bergerilya di wilayah itu.

Melihat kenyataan yang ada rakyat Pacitan menyadari bahwa didalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus

dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat yang ada di wilayah itu. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi rakyat berjiwa *republikan* untuk tetap terus berjuang demi kemerdekaan bangsanya. Berdasarkan permasalahan yang ada dan agar dapat mengungkap berbagai peristiwa yang pernah terjadi di wilayah Pacitan, sudah selayaknya apabila diadakan suatu penelitian dengan pendekatan sejarah.

Penelitian ini bertujuan untuk merekam, menginventarisasi, dan mendokumentasikan peristiwa kesejarahan di tingkat lokal, sedangkan tujuan fungsional adalah untuk mengungkap secara kritis mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi selama perang kemerdekaan berlangsung di wilayah Pacitan. Selain itu penelitian ini akan mencoba mengungkap berbagai peristiwa lokal yang mempunyai kaitan dengan peristiwa nasional, karena penulisan sejarah Indonesia hanya dapat ditulis secara lengkap apabila bahan sejarah lokal itu ikut dipergunakan (Abdullah, T, 1985: 15).

Mengenai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dipandang dari sudut ilmu sejarah bermanfaat sebagai bahan pengembangan studi sejarah lokal.
2. Selain itu dapat memberikan kesadaran sejarah di tingkat lokal kepada generasi muda yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

Perlu diketahui bahwa Pacitan merupakan suatu kabupaten yang pada masa perang kemerdekaan kedua wilayahnya dijadikan markas (basis) gerilya Panglima Besar Sudirman. Di wilayah itu keberadaan Sudirman dapat dikatakan paling lama yaitu selama lima bulan dalam melakukan gerilya, walaupun harus berpindah-pindah tempat. Ditinjau dari segi militer wilayah tersebut memang aman dari jangkauan serbuan tentara Belanda. Disamping itu atas usul penduduk desa dan permintaan dari Lurah Pakis, Sudirman

dimohon untuk tinggal diwilayahnya dalam melakukan perang gerilya (Soewarno, R, 1985: 138-140). Alasan itu juga didasarkan pada situasi dan kondisi wilayah yang jauh dari keramaian dan terlindung oleh beberapa perbukitan.

Di tempat itulah Panglima Besar Sudirman mulai dapat melakukan kegiatannya secara teratur dan dapat mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintah di Yogyakarta maupun dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera, walaupun dia mengalami krisis kesehatan karena serangan penyakitnya (Soewarno, R, 1985: 165-166). Jadwal kegiatannya cukup padat dalam memberikan perintah-perintah harian, petunjuk dan amanat, baik untuk kalangan militer maupun rakyat serta berkomunikasi dengan para panglima dan komandan diberbagai daerah yang dilakukan lewat kurir (Listianingsih, A.D. dkk, 2008: 42). Keberadaan Sudirman dalam melakukan perang gerilya di wilayah itu tetap didukung sepenuhnya oleh rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan rakyat Pacitan dalam membantu kelangsungan perjuangan Sudirman cukup penting.

Menurut A.H. Nasution (1989: 9-11) yang mengatakan bahwa perjuangan pada masa perang kemerdekaan akan berhasil apabila perjuangan itu bersendikan pada rakyat. Selanjutnya hal ini diperkuat oleh pendapatnya T.B. Simatupang (1960: 23-25) yang mengatakan bahwa kekuatan yang berada di wilayah pedesaan khususnya daerah Pacitan yang dibangkitkan selama perang kemerdekaan laksana kekuatan sungai yang sedang banjir. Oleh karena itu, kedua pemikiran tersebut cukup mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.

Untuk meneliti “Pacitan: Markas Gerilya Panglima Besar Jendral Sudirman Pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua 1948-1949”, peneliti menggunakan beberapa sumber yang dapat mendukung penelitian. Tulisan A. H. Nasution berjudul *Pokok-Pokok Gerilya*, terbitan Angkasa, Bandung (1980) berisi uraian-uraian tentang arti perang gerilya yaitu perang rakyat semesta. Selain itu pada bab yang

lain dalam buku tersebut memuat tentang instruksi gerilya yang terpenting, termasuk bagaimana menyelenggarakan pertahanan rakyat secara total, bahkan pembentukan pemerintahan militer. Itu semua adalah syarat mutlak untuk mempertahankan negara Indonesia dalam perang.

Tulisan A. H. Nasution yang lain berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10* (Cetakan I, 1979). Pada bab I buku itu dijelaskan mengenai pergelaran perang gerilya di Jawa Timur. Pada bab lain diuraikan secara jelas bagaimana politik kekerasan Belanda akhirnya menemui jalan buntu, baik kebuntuan politik maupun militer. Tidak ketinggalan pula dalam bab itu dijelaskan pula mengenai situasi di pelbagai daerah yang berkaitan dengan pendudukan Belanda. Oleh karena itu buku tersebut dapat dipakai sebagai acuan untuk mengadakan penelitian khususnya pada periode perang kemerdekaan.

Selain buku di atas, tulisan Listianingsih, A.D. dkk yang berjudul *Soedirman Patriotisme, Gerilya Dan Martabat Bangsa* (2008) memuat tentang sosok Sudirman yang berkaitan dengan perang gerilya selama menghadapi Agresi Militer Belanda Kedua. Dalam bab III dijelaskan bagaimana Panglima Besar Sudirman dalam merancang strategi baru dan memimpin gerilya ketika berada di Markas Sobo. Di markas ini Panglima Besar Sudirman memimpin gerilya selama kurang lebih tiga bulan lamanya. Oleh karena itu, buku ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengadakan penelitian tentang Pacitan Pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua.

Penelitian ini akan mengungkap berbagai peristiwa di tingkat lokal, yaitu di wilayah Pacitan, Jawa Timur pada periode 1948-1949. Mengingat periode tersebut merupakan era perjuangan bagi bangsa Indonesia dalam usahanya menentang penjajah Belanda demi tegaknya Negara Proklamasi. Adapun lingkup materi dimulai sejak wilayah Kabupaten Pacitan menjadi pos dan markas gerilya



Panglima Besar Sudirman sampai meninggalkan wilayah itu kembali ke Ibukota Yogyakarta.

Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah yaitu proses menguji, menyeleksi, dan menganalisa secara kritis terhadap data-data yang didapat dari berbagai macam sumber. Oleh sebab itu proses pengerjaannya menggunakan langkah tertentu menurut norma dan kaidah ilmu sejarah (Gottschalk, L, 1975: 18). Adapun yang termasuk beberapa macam kategori sumber itu antara lain buku, hasil rekaman sehari-hari seperti surat kabar, brosur, majalah maupun arsip-arsip lokal. Sumber tertulis ini ternyata tidak hanya memuat data yang menunjuk faktanya, tetapi juga tentang opini maupun intepretasi (Kartodirdjo, S, 1974: 19-45). Sebagai bahan pembanding juga dilakukan serangkaian wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan para pelaku maupun orang-orang yang sezaman.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KABUPATEN PACITAN

### A. Letak Geografis

Pacitan merupakan suatu kabupaten terletak di sebelah Barat Daya Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. Wilayahnya terletak diantara  $07,550^{\circ}$  –  $8,170^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $110,550^{\circ}$  –  $111,250^{\circ}$  Bujur Timur Kabupaten Pacitan dengan batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Adapun luas Kabupaten Pacitan ada  $1.389,8716$  Km<sup>2</sup> yang meliputi 12 kecamatan<sup>1</sup>, yaitu:

<sup>1</sup> Lihat Lampiran Peta Kabupaten Pacitan

1. Kecamatan Donorojo
2. Kecamatan Punung
3. Kecamatan Pringkuku
4. Kecamatan Pacitan
5. Kecamatan Kebonagung
6. Kecamatan Arjosari
7. Kecamatan Nawangan
8. Kecamatan Bandar
9. Kecamatan Tegalomba
10. Kecamatan Tulakan
11. Kecamatan Ngadirojo
12. Kecamatan Sudimoro

Mengenai luas wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa perbukitan dan pegunungan, jurang terjal serta termasuk deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa. Secara keseluruhan, daerahnya bergelombang hampir 88% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Pacitan.<sup>2</sup> Adapun gunung tertinggi adalah Gunung Limo yang terletak di Kecamatan Kebonagung dan Gunung Gembes di Kecamatan Bandar. Gunung Gembes sekaligus merupakan mata air dari Sungai Grindulu.

Perbandingan keadaan lapangan secara keseluruhan, terdiri:

1. Datar (kelas kelerengan 0-5%) 55,59 Km<sup>2</sup> pada 4%
2. Berombak (kelas kelerengan 6-10%) 138,99 Km<sup>2</sup> pada 10%
3. Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) 333,57 Km<sup>2</sup> pada 24%
4. Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) 722,73 Km<sup>2</sup> pada 52%
5. Bergunung (kelas kelerengan > 51%) 138,99 Km<sup>2</sup> pada 10%

Keadaan daerah Kabupaten Pacitan di bagian selatan pada umumnya berupa batu kapur, sedangkan belahan utara berupa tanah.

<sup>2</sup> Pacitan Dalam Angka, 2010.

Adapun kandungan tanahnya terdiri dari asosiasilitosal, mediteran merah litosal, campuran tuf dan bahan vulkan, kompleks litosal kemerahan dan alifial kelabu, endapan tanah liat yang mengandung potensi bahan galian mineral, yang didalamnya mengandung bahan tambang.<sup>3</sup>

Kabupaten Pacitan berdasarkan atas penggunaan tanah terdiri dari lahan sawah seluas 130,15 Km<sup>2</sup> dan lahan kering seluas 1.259,72 Km<sup>2</sup>. Lahan sawah menurut jenis pengairannya adalah sebagai berikut: sawah irigasi teknis pada 864 Ha; irigasi setengah teknis pada 2.130 Ha ; irigasi sederhana pada 3.314 Ha dan sawah tadah hujan seluas 6.707 Ha. Untuk lahan kering menurut jenis penggunaannya adalah sebagai berikut: tanah untuk bangunan 3.153 Ha, tegal/huma 29.891 Ha; tanaman kayu-kayuan 45.214 Ha; hutan rakyat dan kebun 34.969 ha; hutan negara 1.214 Ha; dan tanah lainnya 11.531 Ha.

Apabila dilihat dari permukaan air laut letak ketinggian kabupaten penyebarannya tidak sam. Kecamatan Pacitan dan Kebonagung berada pada 0,8 m, Kecamatan Donorojo pada 338 m, Kecamatan Punung pada 229 m, Kecamatan Pringkuku pada 357 m, Kecamatan Arjosari pada 26 m, Kecamatan Nawangan pada 668 m, Kecamatan Bandar pada 964 m, Kecamatan Tegalombo pada 194 m, Kecamatan Tulakan pada 334 m, Kecamatan Ngadirojo pada 10 m, dan Kecamatan Sudimoro terletak pada 9 m.

## **B. Pacitan Pada Awal Kemerdekaan**

Bulan demi bulan berlalu. Menurut perhitungan waktu, hampir tiga setengah tahun bangsa Indonesia di bawah kekuasaan penjajah Jepang. Pada waktu itu kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah sulit, terutama dalam bidang perekonomian. Kenyataan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*



seperti itu menyebabkan semangat rakyat bertambah bergelora untuk menentang penindasan Jepang. Para pemuda tampaknya sudah tidak mau lagi menyaksikan bangsa dan tanah airnya dalam keadaan nista dan semakin menderita.

Seiring dengan semakin merosotnya tingkat kehidupan rakyat, tentara Jepang di berbagai medan pertempuran terus mengalami kemunduran bahkan menderita kekalahan. Apalagi setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom pada awal bulan Agustus 1945, menyebabkan Jepang segera menyerah kepada pihak Sekutu. Peristiwa ini tentu saja terdengar dan mempengaruhi keadaan di Indonesia yang pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan tentara Jepang. Keadaan semacam itu oleh para pemuda dan rakyat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Kemerdekaan harus segera diraih.

Setelah melalui proses yang rumit, tanpa mengenal lelah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Adapun bunyi teks proklamasi adalah sebagai berikut:

## **PROKLAMASI**

**Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan  
Indonesia.**

**Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l,  
diselenggarakan dengan tjara  
seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.**

**Djakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05**

**Atas nama bangsa Indonesia**

**Soekarno/Hatta (Kartodirdjo, S, 1977: 177)**

Dengan diucapkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu berarti belenggu penjajahan dapat dipatahkan dan juga merupakan lonceng kematian bagi kolonialisme di bumi Indonesia. Segenap rakyat bersiap diri, terus bergerak, tua maupun muda semuanya berada di bawah panji Sang Merah Putih. Semangat pemuda menggelora untuk menyalakan api kemerdekaan dan menggerakkan jalannya roda revolusi Indonesia.

Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia segera terdengar di Pacitan. Bagi sebagian rakyat yang berada di Pacitan berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia didengar melalui siaran radio. Kemudian berita itu disebarluaskan dari mulut ke mulut terutama oleh para mantan prajurit PETA (Pembela Tanah Air) dan *Heiho*. Setelah mendengar berita tersebut, maka sebagian rakyat dengan cepat menanggapi apa makna dan arti sebuah kemerdekaan. Mereka menyambut berita itu dengan rasa gembira dan lega, karena terbebas dari alam penjajahan. Salah satu luapan kegembiraan rakyat adalah dikibarkannya Bendera Merah-Putih di mana-mana, baik itu di halaman kantor kabupaten, kawedanan, kecamatan maupun kelurahan-kelurahan dan bahkan di rumah-rumah penduduk. Dalam tindakannya itu mereka tidak merasa takut terhadap tentara Jepang yang masih berkuasa dan juga lengkap persenjataannya.

Indonesia telah merdeka, itulah kenyataan yang ada di Pacitan menunggu perkembangan apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Demikian sikap sebagian orang, baik aparat pemerintah, pemuda, dan bahkan hampir setiap orang. Namun yang paling antusias, dan segera mengerti adalah para pemuda. Justru dari pemuda-pemuda itulah informasi-informasi baru sangat diperlukan oleh masyarakat dan lingkungannya. Merekalah pembakar-pembakar semangat, pembawa informasi tanpa disuruh, tanpa ada yang memberi perintah menjelaskan perihal Kemerdekaan Negara Indonesia. Tidak diketahui dengan pasti siapa yang pertama kali mengucapkan dan

mendengungkan pekik “Merdeka” di Pacitan namun demikian setiap orang yang berpapasan, masing-masing berseru “MERDEKA!”. Saling menyapa dengan pekik ini. Dengan semangat, ucapan “MERDEKA!” di ikuti kepalan tangan yang diangkat baik tangan kanan atau tangan kirinya. Bukan hanya itu, masih disertai muka yang serius, penuh kesungguhan dan tampak semangat yang menggelora. Ketiga gerak ini benar-benar merupakan manifestasi dari kepribadian yang utuh dan siap berkorban, demi tanah air yang telah merdeka.<sup>4</sup>

Selain itu, sebagai lambang kemerdekaan pemasangan tanda Merah-Putih harus terpancang di dada sebelah kiri. Tidak peduli apakah berupa lencana atau hanya berupa coretan-coretan berwarna merah dan putih saja. Boleh dikatakan hampir semua orang memakainya. Bahkan *simbok bakul* pun tak ketinggalan mengenakan semacam tanda apa saja di baju kebaya mereka, asalkan merah putih kelihatan nyata. Itulah tandanya Indonesia sudah merdeka. Dengan demikian, apakah dapat dikatakan itukah pertanda pejuang ? Itukah pertanda cinta tanah air, itukah tanda-tanda orang yang patut diikuti gerak Langkahnya? Entahlah, namun pada saat itu setiap orang tidak mempersoalkannya, mengapa harus memakai lencana tersebut. Bagaimana kalau tidak memakainya? Jelas tidak selaras dengan situasi pada waktu itu, karena ini merupakan identitas dan negara yang merdeka. Oleh karena itu dibuatlah lencana kecil berukuran 1 x 2 cm dibuat dari kertas, kain, bahkan dari logam atau seng tipis. Bagi mereka yang memakai lencana Merah-Putih tersebut, menganggap dirinya sebagai orang republik, orang yang mencintai kemerdekaan. Kemudian ternyata sebagai konsekuensi dan semua itu dapat dikatakan tiada orang yang tidak memakainya di kota maupun di desa. Walaupun di desa banyak yang tidak memakainya bukanlah berarti kurang loyal kepada kemerdekaan, semata-mata karena

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Tegoeh pada tanggal 18 Juli 2013 di Pacitan.

mereka tidak cepat tanggap atau tidak mempunyai bahan bakunya.<sup>5</sup>

Perlu diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Pacitan jumlah radio bisa dihitung dengan jari, oleh karena itu merupakan kebanggaan tersendiri apabila orang mempunyai radio. Untuk penyebaran ke desa-desa terutama pemberitaan, penyebarluasan arti kemerdekaan, penerangan dilakukan terutama oleh para pemuda dan aparat pemerintah. Dapat disebutkan disini bahwa sekelompok pemuda misalnya dengan suka rela mencegat ibu-ibu, bapak-bapak dari desa yang akan pergi ke kota, diberinya lencana Merah Putih untuk dipasang di dada. Selanjutnya diberi petunjuk untuk menularkan hal semacam itu kepada orang lain. Adapun tujuannya memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan perihal kemerdekaan, yang pada waktu itu dijelaskan : “bahwa Indonesia sudah tidak dijajah lagi, sekarang sudah merdeka”.<sup>6</sup> Di samping gambaran di atas, penerangan tersebut juga dilaksanakan di berbagai tempat dan oleh siapa saja yang merasa terpenggil. Di desa-desa, mereka yang nampak sedikit menonjol ataupun dianggap “mengerti” tentang arti sebuah kemerdekaan menjadi tumpuan pertanyaan dan langkahnya pantas menjadi perhatian untuk diikuti. Penerangan itu terutama dikhususkan kepada “Lepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda dan lepas pula dari Jepang”. Negara diatur sendiri, semua pimpinan akan terdiri dari orang-orang Indonesia.

Merdeka bukan berarti semaunya sendiri, bukan berarti tiadanya aturan, bukannya tidak bayar pajak lagi dan sebagainya. Itulah bentuk-bentuk penerangan yang sangat sederhana dan sekadar penjelasan tentang pengertian kemerdekaan. Penerangan di kalangan menengah tentunya berbeda dengan wilayah pedesaan. Untuk selanjutnya penerangan yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada pengertian kemerdekaan, akan tetapi menjadi mempertahankan

---

5 *Ibid*

6 *Ibid*



kemerdekaan, karena nampak kemudian bahaya yang mengancam kemerdekaan itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa sejak berdirinya Kabupaten Pacitan, tercatat 16 orang yang pernah menjabat sebagai bupati. Menjelang tahun berakhirnya pemerintahan Jepang di Indonesia, daerah *Ken Pacitan* dipegang oleh Mr. Soesanto Tirtoprojo (Fasihulissan, M, dkk, 2013 : 36).

Pada tahun 1945, di Pacitan terjadi pergantian kepemimpinan dari Mr. Soesanto Tirtoprojo digantikan oleh R. Soewondo yang merupakan bupati ke 17. kemudian setelah R. Soewondo mundur, yang menjadi bupati adalah Hoetomo yang menjabat dari tahun 1946-1948. Pada tahun 1949 yang menjadi Bupati Pacitan adalah Mr. Subekti Pusponoto. Pada masa pemerintahan bupati Subekti Pusponoto inilah di Kabupaten Pacitan mengalami keterlibatan langsung dalam perang melawan Belanda, yaitu Perang Kemerdekaan Kedua.

Sementara itu beberapa hari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 22 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berhasil menetapkan berdirinya tiga badan baru yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Secara organisatoris BKR merupakan bagian dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 1945 dan berada di bawah pimpinan Otto Iskandardinata.

Oleh karena itu untuk mempercepat terlaksananya pembentukan BKR, maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno dalam pidato radionya menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk segera membentuk BKR. Adapun seruan itu terutama ditujukan kepada para pemuda patriot bangsa antara lain sebagai berikut:

“.....karena itu saya mengharapkan kepada kamu sekalian hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho, dan Pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam tentara kebangsaan Indonesia”.(Nasution, 1977 :231).

Dengan adanya seruan dan Presiden Sukarno tersebut maka di daerah-daerah, segera dibentuk dan didirikan BKR. Demikian pula Kabupaten Pacitan yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur itu juga mendapat sambutan hangat dari para pemudanya. Beberapa hari kemudian para mantan prajurit PETA, *Heiho*, *Seinendan*, *Keibodan*, dan para pemuda lainnya berduyun-duyun berkumpul di ibukota kabupaten membentuk BKR.

Sementara itu para mantan tentara PETA secara naluri sebagai seorang prajurit kemudian mencari para pimpinannya sewaktu di tentara PETA. Para mantan pemimpin tentara PETA juga secara otomatis telah berkumpul di tiap ibukota kabupaten dan membentuk BKR. Selain itu pimpinan bekas tentara PETA di Pacitan agar segera memimpin Badan Keamanan Rakyat tingkat kabupaten.<sup>7</sup>

Ternyata dalam waktu yang relatif tidak begitu lama BKR di daerah Kabupaten Pacitan dapat terbentuk sesuai dengan pengumuman pemerintah pusat dan segera melaksanakan tugas. Badan Keamanan Rakyat terbentuk dari berbagai unsur, oleh karena itu seragam yang dipakainya pun cukup beragam. Mereka berseragam warna-warni dari bahan dril atau dari blaco *wenteran* maupun dan kain lainnya. Akan tetapi satu atribut yang tidak boleh dilupakan yakni adanya selempang pita merah putih yang dililitkan di kepala.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

Seiring dengan bertambahnya waktu, maka semangat juang menjadi semakin menggelora. Segala sesuatu yang berbau *Dai Nippon* atau Negeri Jepang, seperti tulisan nama pangkat dan predikat lainnya dihapus sekaligus mengalami perubahan. Istilah *Kenco* menjadi bupati kembali, begitu pula *Gunco*, *Sonco* dan *Kuco* menjadi wedana, asisten wedana dan lurah lagi. *Tonari Gumi* menjadi rukun tetangga.

Mengenai tugas yang diemban BKR, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Anggaran Dasar BPKKP ditegaskan bahwa BKR bertugas memelihara keamanan bersama-sama rakyat. Namun demikian tugas BKR tidak hanya sekedar menjaga keamanan rakyat, akan tetapi mempunyai tugas lain yang lebih besar yaitu merebut kekuasaan dan melucuti senjata dari tangan Jepang. Mereka sudah tidak sudi melihat lagi sisa-sisa kekuatan Jepang yang masih ada dan bercokol di bumi pertiwi.

Pada perkembangan selanjutnya rupanya pemerintah RI menyadari bahwa hanya dengan BKR yang dibentuk secara lokal tidak akan mungkin dapat mengamankan perjuangan secara keseluruhan. Oleh sebab itu pemerintah kemudian memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumohardjo untuk disertai tugas menyusun Tentara Nasional. Baru pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan berdirinya Tentara Nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Maklumat Pemerintah tersebut berbunyi: “Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat”. (N.N., 1977: 144).

Setelah keluar maklumat Pemerintah RI tersebut kemudian disusul pula dengan pengumuman dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 9 Oktober 1945. Adapun isi pengumuman itu adalah sebagai berikut:

“Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri atas rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia dan guna menjaga kehormatan Negara Republik Indonesia”.

Pemuda dan lain-lainnya yang tegap sentausa badan dan jiwanya, bekas prajurit PETA, prajurit Hindia Belanda dan *Heiho*, *Kaigun Heiho*, Barisan Pemuda, Hizbullah, Pelopor dan lain-lainnya baik yang sudah maupun yang belum pernah memperoleh latihan militer, supaya selekas-lekasnya mendaftarkan diri pada kantor BKR di ibukota kabupaten masing-masing atau kepada badan lain-lainnya yang ditunjuk oleh Residen (kepala daerah) atau wakilnya” Merdeka (N.N, 1977: 144).

Berdasarkan maklumat pemerintah tersebut kemudian segera dibentuk Markas Besar Umum oleh Urip Sumohardjo dengan berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai pimpinan TKR pada waktu itu ditunjuk Supriyadi, tokoh pemberontak PETA terhadap Jepang di Blitar dan sebagai Menteri Keamanan *ad interim* diangkat Moh. Sulyoadikusumo seorang mantan *Daidanco* PETA.

Kemudian dengan dibentuknya TKR, maka disusunlah 10 Divisi di Pulau Jawa dan 6 Divisi di Sumatera, sementara di daerah-daerah lain pembentukan terus menerus diusahakan. Untuk daerah Jawa susunan divisinya sebagai berikut :

1. Daerah Jawa bagian barat : Divisi I (daerah Banten-Bogor), Divisi II (daerah Jakarta-Cirebon), Divisi III (daerah Priangan).
2. Daerah Jawa bagian tengah, Divisi IV (daerah Semarang-Pati), Divisi V (daerah Banyumas-Kedu), Divisi IX (istimewa) (daerah Yogyakarta, Divisi X) (istimewa) (daerah Surakarta).

3. Daerah Jawa bagian timur, Divisi VI (daerah Madiun-Kediri), Divisi VII (daerah Bojonegoro, Surabaya, Madura), Divisi VIII (daerah Malang-Besuki).

Untuk daerah Pacitan, pertahanan kemiliteran berada dibawah tanggung jawab dari Divisi X (istimewa) Surakarta. Hal ini dikarenakan secara administratif kewilayahan, daerah Pacitan berada di wilayah Jawa Timur. Perbedaan tanggung jawab kemiliteran tersebut bisa saja disebabkan oleh alasan taktik dan strategi pertahanan kewilayahan. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 42).

Adapun pembentukan TKR di Kabupaten Pacitan yang intinya adalah para mantan tentara PETA yang sudah siap berada pada BKR ditambah unsur-unsur lain yang semula sudah tersusun di dalam organisasi seperti organisasi *Daidan* tentara PETA dengan cepat dapat tersusun. Untuk mengisi jabatan setingkat Komandan Resimen dan Batalyon tersedia materi para mantan *Daidanco*, sedangkan untuk jabatan Komandan Kompi tersedia materi dan mantan *Syodanco* termasuk untuk jabatan Komandan seksi atau Peleton. Para mantan *Budanco* yang senior juga dapat menduduki jabatan Komandan Seksi atau Peleton. Untuk para prajurit, materinya tersedia dan para mantan KNIL, *Heiho*, dan dari para pemuda yang pernah dilatih oleh tentara PETA. Dengan demikian pembentukan TKR di Pacitan tidak banyak mengalami kesulitan.

Sementara itu perkembangan politik dan keamanan di Indonesia semakin memburuk. Belanda terus menyusun kekuatan militernya tanpa ada yang menghalangi. Disamping itu walaupun perundingan Linggarjati disetujui oleh masing-masing delegasi RI dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947, namun secara kewilayahan menjadi kerugian bagi Republik Indonesia yang hanya mendapat wilayah yang diakui meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. Adapun isi persetujuan Linggarjati tersebut adalah :



1. Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatera.
2. Akan dibentuk bersama negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda (Suhartono, 1993 : 62).

Hal ini menyebabkan terjadinya pro dan kontra di kalangan politik dan juga berkaitan dengan isi perundingan tersebut. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 45).

Perlu juga diketahui bahwa pada awal berdirinya TKR, pucuk pimpinan TKR yang semula dipegang Supriyadi kemudian digantikan Sudirman, berdasarkan pengumuman Presiden pada tanggal 18 Desember 1945. Setelah Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar, maka nama Tentara Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) (Kartodirdjo, S 1977: 47). Untuk selanjutnya organisasi tentara disempurnakan lagi berdasar Ketetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juni telah disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI. Adapun pucuk pimpinan TNI adalah Panglima Besar Sudirman.

Ternyata nama TNI dapat memuaskan semua pihak, baik dikalangan TRI maupun berbagai laskar, yang tetap menganggap dirinya bukan hanya sebagai alat negara semata-mata, melainkan sebagai pejuang nasional. Nama TRI dianggap sebagai sebutan untuk alat negara, tetapi TNI adalah alat bangsa Indonesia (Nasution, 1968 : 84-87). Sejak itulah TNI bersama seluruh rakyat bekerjasama dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948.

### **C. Pacitan Masa Perang Kemerdekaan Pertama**

Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah apa yang dinamakan dengan Perang Kemerdekaan yang pertama. Satuan Militer Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung dengan tujuan menduduki Jawa Barat. Dari Surabaya satuan militer diberangkatkan untuk menguasai Madura dan ujung timur Jawa Timur. Gerakan satuan militer lain diberangkatkan untuk mengamankan wilayah Semarang.

Pada akhir Juli 1947 Belanda menyadari bahwa mereka harus menerima himbauan PBB agar diselenggarakan suatu gencatan senjata, yang diperintahkan oleh pihak Belanda dan Sukarno pada tanggal 4 Agustus 1947. Pada bulan Oktober dibentuklah Komite Jasa Baik PBB yang beranggotakan wakil Amerika, Australia dan Belgia untuk membantu perundingan Indonesia-Belanda dalam mencapai gencatan senjata yang baru. Sejak bulan Agustus pihak Belanda melanjutkan operasi pembersihan di belakang garis terdepan mereka dimana banyak pejuang republik tinggal. Khususnya Divisi Siliwangi tetap berada di belakang garis Belanda di Jawa Barat. (Kartodirdjo, S, 1977 : 47-50).

Untuk melanjutkan operasi militernya Belanda melakukan penyerangan di beberapa daerah. Pada waktu itu serangan tentara Belanda diarahkan ke tiga tempat yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran penyerangan adalah perkebunan tembakau. Adapun di Jawa Tengah menguasai seluruh pantai utara, sedangkan di Jawa Timur sasaran utamanya adalah wilayah perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 47).

Melihat kenyataan yang ada, pemuda dan pejuang Pacitan segera bergabung ke dalam Divisi IV/Panembahan Senopati. Divisi tersebut pada awal didirikan bernama Divisi X TKR. Kemudian pada tanggal 24 Januari 1946 Divisi X TKR diganti namanya menjadi Divisi IV/

Panembahan Senopati dengan kekuatan 4 Resimen TRI. Adapun Divisi IV/Panembahan Senopati tersebut adalah Mayor Soetarto. Keempat resimen tersebut adalah Resimen 23 dengan komandan Letnan Kolonel Sutedjo Haryoko, Resimen 24 dengan komandan Letnan Kolonel S. Sudiarto, Resimen 25 dengan komandan Letnan Kolonel A. Fadjar serta Resimen 26 dengan komandan Letnan Kolonel Suadi. Adapun Resimen 26 terdiri dari empat batalyon yaitu:

1. Batalyon Soeharto di Beteng Solo
2. Batalyon Koesmanto di Pamasan
3. Batalyon Soenitiyoso di Klaten
4. Batalyon Slamet Riyadi di Pacitan

Pasukan dari Batalyon Slamet Riyadi ini menetap di Pacitan sejak awal Desember 1945, sampai dengan bulan April 1947 (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 49). Setelah itu Batalyon ini ditugaskan untuk mengemban tugas dan pindah ke daerah Jawa Tengah. Dengan demikian di daerah Pacitan hanya tinggal kekuatan beberapa pasukan dan kesatuan tentara pelajar (TP), yang siap menjaga Pacitan dari kedatangan musuh. Disamping itu para pelajar yang sedang menempuh sekolah di luar Pacitan membentuk kekuatan dalam organisasi perjuangan pelajar dengan nama Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Di Pacitan sendiri terbentuk Gerakan Pemuda Pelajar Pacitan yang kemudian berkembang menjadi Persatuan Pemuda Pejuang Pacitan/P4 (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 50). Persatuan ini sudah memiliki bekal kemiliteran semasa pendudukan Jepang dalam wadah *Seinendan*. Hal ini sangat bermanfaat terhadap kesiapan para pejuang yang ada di Pacitan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan.<sup>8</sup> disamping itu kesatuan P4 tersebut juga mendapat latihan kemiliteran dari kesatuan kompi pimpinan Kapten Ranuwidjaja, Batalyon Slamet Riyadi. Kesemuanya itu dapat dijadikan bekal dalam melawan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Tegoeh pada tanggal 18 Juli 2013 di Pacitan.

aggressor tentara Belanda. Dalam perkembangannya pemuda dari Pacitan yang tergabung dalam Kompi Ranu Wijaya yang semula ditugaskan dalam pengamanan daerah Republik Indonesia di wilayah Jawa Tengah kemudian dikembalikan tugasnya untuk menjaga daerah Pacitan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Dahlan tanggal 19 Juli 2013 di Pacitan.

## BAB III

# AGRESI TENTARA BELANDA KE PACITAN

### A. Masuknya Tentara Belanda

Tahun 1947 sudah berlalu, bahkan tahun 1948 hampir berakhir. Bukan rahasia lagi bahwa pihak Republik Indonesia hasil “Perjanjian Renville” itu sudah disangsikan. Menjelang bulan akhir dari tahun 1948 gejala akan terjadinya penyerangan Belanda sudah mulai diketahui. Belanda akan menyerang daerah-daerah kekuasaan *de facto* republik.

Tanggal 19 Desember 1948 di pagi hari terdengar suara pesawat bergemuruh di atas lapangan terbang Maguwo dan Kota Yogya. Rakyat banyak memperkirakan bahwa latihan umum sudah dimulai dan tidak mengira sama sekali bahwa suara tersebut adalah suara pesawat terbang Angkatan Udara Tentara Belanda yang sedang menurunkan pasukan khusus dengan terjun payung diatas lapangan terbang Maguwo. Setelah pasukan payung turun dan dapat menguasai lapangan terbang, kemudian dengan cepat sebagian besar pasukannya bergerak ke arah barat menuju Ibukota Yogya, sebagian ke timur ke arah Solo dan sebagian lagi menduduki dan menguasai



lapangan terbang Maguwo. Tentara Belanda masuk ke Yogya tanpa adanya perlawanan yang berarti, sehingga pada sore harinya Yogya sudah dapat diduduki. Istana Presiden sudah terkurung dan pimpinan negara sudah menjadi tawanan Belanda. Bersamaan dengan penyerbuan Tentara Belanda ke Ibukota Yogya, maka di semua garis pertahanan di wilayah RI dapat diterobos. Oleh karena itu dalam waktu satu hari, bukan hanya Yogya Ibukota RI yang dapat diserbu dan diduduki oleh tentara Belanda tetapi hampir semua kota-kota daerah RI dapat diduduki dan dikuasai oleh Tentara Belanda. Berbeda dengan kota-kota lainnya, Kabupaten Pacitan baru beberapa hari kemudian dapat dikuasai dan diduduki Belanda.

Masuknya tentara Belanda untuk menguasai daerah Pacitan mengalami berbagai kendala. Masalah ini disebabkan karena mendapat perlawanan dari pasukan dan rakyat di berbagai daerah seperti di Solo, Madiun, Ponorogo dan juga Wonogiri. Satu-satunya jalan bagi Belanda dalam agresinya ke Pacitan adalah dengan melakukan pendaratan pasukannya melalui pelabuhan Temperan, Sidoarjo di pantai selatan Pacitan. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 102). Pada tanggal 12 Januari 1949, sebuah korvet Belanda mulai memasuki teluk Pacitan dengan maksud menjajaki sejauh mana pertahanan pasukan RI yang ada di daerah Pacitan. Sementara itu pasukan ALRI yang berada di daratan mengira bahwa pasukan Belanda akan segera melakukan pendaratan pasukan. Kesatuan dari ALRI segera melakukan peledakan dermaga Sentolo dengan bom tarik. Penghancuran dermaga yang dilakukan oleh kesatuan ALRI ternyata kurang berhasil dan masih dapat dipergunakan oleh Belanda untuk mendaratkan pasukannya di Pacitan. Ketika bom yang dipasang di dermaga Sentolo diledakkan, maka dengan segera kesatuan-kesatuan pejuang lain yang berada di kota segera ikut melakukan hal serupa yakni melakukan peledakan bom dan pembumihangusan bangunan dan infrastruktur yang dikhawatirkan

akan digunakan oleh Belanda. Oleh karena itu dengan segera kota Pacitan menjadi lautan api. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 102).

Sehari kemudian yaitu pada tanggal 13 Januari 1949, Kota Pacitan berhasil diduduki oleh tentara Belanda. Pendaratan pasukan diawali dengan bombardemen yang dilakukan oleh Belanda baik dari laut maupun udara. Kesemuanya itu dikarenakan pertahanan wilayah yang dipertahankan oleh satu Batalyon TNI tidak kuat dan tidak dapat mengimbangi kekuatan persenjataan pasukan Belanda. Sementara itu pasukan republik mengimbanginya dengan melakukan bumihangus terhadap tempat-tempat atau gedung-gedung yang pada waktu bumihangus sebelumnya belum berhasil. Dengan demikian, ketika Belanda berhasil memasuki kota Pacitan, praktis tidak ada bangunan yang utuh yang dapat dipakai oleh Belanda sebagai tempat bertahan.

Adapun gedung-gedung yang dibumi hanguskan antara lain:

1. Kantor Kabupaten Pacitan, walaupun tidak seluruhnya hancur.
2. Bekas kantor Asisten Residen yang sekarang menjadi SMPN 1 Pacitan Jl. A Yani.
3. Rumah Penjara, sebelum dibumihanguskan seluruh napi telah dipindahkan ke Kecamatan Arjosari.<sup>10</sup>

Oleh karena itu Belanda terpaksa menggunakan pasar Tanggalan (pasar Baleharjo) sebagai tangsinya dan gedung bekas kawedanan sebagai markas. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 103).

Bagi penduduk kota Pacitan dan sekitarnya sejak tanggal 12 Januari 1949 melakukan pengungsian ke luar daerah yang dianggap aman. Sementara itu pemerintahan Kabupaten Pacitan juga ikut berpindah dari kota menuju ke tempat lain yang berada di sekitar Kebonagung.<sup>11</sup> Selain pemerintahan kabupaten, rumah sakit pun

<sup>10</sup> Wawancara dengan Djumari pada tanggal 17 Juli 2013 di Pacitan.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Djumari pada tanggal 17 Juli 2013 di Pacitan

juga ikut pindah ke tempat baru setelah kota Pacitan menjadi lautan api dibumihanguskan.<sup>12</sup> Di pihak republik para pejuang juga menyesuaikan basis perjuangannya yang terpecah di beberapa tempat. Dengan adanya pemerintahan militer, maka Komando Distrik Militer (KDM) Pacitan juga berpindah dan bermarkas di Kertowonojoyo.

Adapun pemerintahan militer dibentuk dengan maksud untuk kelestarian pemerintah RI yakni:

- Membantu pemerintahan sipil selama dalam keadaan darurat perang melawan penjajah Belanda.
- Melakukan perlawanan yang lebih mantap dengan pelaksanaan Perang Gerilya.
- Mengikutkan segenap kekuatan rakyat sesuai doktrin perang semesta.

Untuk membantu agar pemerintah darurat RI tetap berjalan dalam melaksanakan Perang Rakyat Semesta, maka dengan unsur teritorialnya TNI menyusun pemerintahan militer dalam bentuk Komando Distrik Militer yang dipimpin oleh seorang perwira menengah.

Struktur pemerintahan militer di Pulau Jawa termasuk Madura dan Bali dalam Perang Rakyat Semesta adalah sebagai berikut:

- Markas Besar Komando Djawa atau MBKD dipimpin oleh Kolonel A.H Nasution. Kepala Staf : Kolonel Bambang Supeno
- *Sub Teritorial Comando* atau STC  
Didirikan pada setiap tingkat Karesidenan untuk mengendalikan dan pelaksanaan pemerintahan tingkat Karesidenan.
- Komando Distrik Militer atau KDM  
Didirikan pada setiap tingkat kabupaten untuk mengendalikan dan pelaksanaan pemerintahan militer pada tingkat kabupaten.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sulasiyem pada tanggal 19 Juli 2013 di Pacitan.

- Pemerintahan Militer Kecamatan atau PMKT. PMKT atau KODM (Koramil sekarang) didirikan pada setiap tingkat kecamatan untuk mengendalikan pelaksanaan pemerintahan militer di wilayahnya. Selain itu sebagai ujung tombak untuk membina dan memimpin rakyat dalam perlawanan menghadapi Belanda. (Nasution, 1980 : 271). Dengan penyusunan PMKT atau Pemerintahan Militer Kecamatan yang bertindak sebagai koordinatornya adalah perwira atau bintanga tinggi dari Onder Distrik Militer. Oleh karena itu pemerintah darurat RI yang berada di satu tangan memungkinkan kelancaran di semua bidang, terutama segala sesuatu yang ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda.

Dalam keadaan pemerintahan darurat perang, semua unsur harus menyesuaikan dengan keadaan perang sehingga terhindar dari kesalahpahaman, karena semua harus mendukung kelancaran pemerintahan darurat perang. PMKT dan KODM menyusun unsur pembantu-pembantu yang sangat penting untuk peningkatan dan pengerahan segala potensi rakyat dalam usahanya untuk perlawanan terhadap Belanda, maka dibentuk dan disusun Payer Desa hampir di semua desa dan dusun.

Payer Desa atau Pasukan Gerilya Desa adalah sangat penting artinya, hal itu karena selain bertugas memberikan pembinaan terhadap rakyat juga bertugas untuk mengerahkan segala potensi rakyat dalam melawan Belanda. Payer Desa memilih dan menyusun para pemuda pejuang untuk pelaksanaan tugas pertahanan rakyat yang meliputi perlawanan dan pertahanan sipil secara nasional.

Payer Desa melatih, membina ketrampilan para pemuda pejuang dalam olah kemiliteran secara terbatas serta menitikberatkan kepada masalah keamanan dan pengamanan. Sehingga semua unsur di dalam setiap desa siap untuk membantu pelaksanaan Perang Gerilya selama Belanda masih bercokol dan menduduki Indonesia. Pemerintah RI

dengan pasukan-pasukan TNI pada tanggal 19 Desember 1948 telah siap untuk melaksanakan Perang Gerilya.

Dengan didudukinya Kota Pacitan oleh Belanda, pada awalnya hanya melakukan patroli di dalam kota Pacitan dan sekitarnya. Beberapa hari kemudian Belanda mulai melakukan patroli sampai ke daerah Mentoro dan Kebonagung dalam upaya mencari markas pasukan TNI dan kesatuan pejuang. (Fashihullisan, M, dkk, 2013 : 103-104). Menurut Fashihullisan, M, dkk, (2013 : 104-106) operasi yang dilakukan Belanda itu tidak berhasil karena pihak pejuang masih menahan diri dan masih melakukan konsolidasi kekuatan. Dengan keadaan yang demikian, Belanda menganggap keadaan Pacitan dirasa aman, sehingga pada tanggal 20 Januari 1949 pasukan Belanda melakukan patroli ke barat kearah Baturetno dengan tujuan menghubungkan dengan markas Belanda di Solo dan kearah timur menuju Argosari dan Tegalombo dengan tujuan menguasai jalur Pacitan-Madiun. Gerakan pasukan Belanda tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari pasukan republik. Pasukan Belanda berhasil menguasai jalur penghubung Pacitan-Baturetno-Solo dan membangun pos-pos tentara di Punung dan Donorejo. Sementara itu, usaha Belanda untuk menguasai jalur Pacitan-Ponorogo-Madiun kurang berhasil karena terkendala medan yang berat serta banyak jembatan yang dihancurkan oleh para pejuang. Namun demikian pasukan Belanda berhasil menduduki Argosari dan dijadikan sebagai pos pertahanannya.<sup>13</sup>

## **B. Perlawanan Para Pejuang RI**

Rakyat pada umumnya menyadari hakekat kedaulatan bernegara, merdeka dan bebas dari jajahan ikut berjuang bersama tentara republik yang bertahan di kantong-kantong gerilya dan pemerintahan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dahlan pada tanggal 19 Juli 2013 di Pacitan.

dalam pengungsian. Namun demikian di Pacitan terdapat beberapa tipe rakyat dalam menghadapi invasi Belanda pada Perang Kemerdekaan Kedua yakni:

- a. Mereka yang tidak segera mematuhi perintah untuk mundur dan mengungsi ke pedalaman. Di antaranya ada pula yang kembali ke tempat mereka semula yang sudah diduduki pasukan Belanda.
- b. Mereka yang ikut bersama tentara keluar dari kota memusatkan pertahanan di daerah pedalaman dan ikut bergerilya. Bantuan dari rakyat di desa-desa sangat besar. Tanpa mereka pasukan republik tidak mampu berbuat banyak.
- c. Golongan Cina lebih banyak bersikap dengan naluri untuk kepentingan perdagangan.

Pada waktu itu banyak kesukaran yang dialami oleh pasukan republik, tetapi dengan bantuan rakyat kesukaran itu dapat diatasi. Kesukaran yang dirasakan, umpamanya :

- a. Pakaian pasukan yang sudah tidak menggambarkan militer dan tidak mampu untuk menahan udara daerah pertahanan di pedalaman dan pegunungan.
- b. Persediaan obat yang sangat kurang.
- c. Persediaan bahan makanan yang semakin menipis.
- d. Persediaan persenjataan dan amunisi sangat berkurang.

Dari pihak Tentara dan pemerintahan dalam pengungsian, yang paling penting adalah menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap rakyat. Bahwa mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Langkah utama adalah perbaikan dalam pemerintahan militer, sehingga kepercayaan rakyat menjadi lebih tebal dan bantuan banyak mereka berikan. Terutama penyediaan bahan makanan, pakaian dan



obat. Demikian pula pos Palang Merah dan dapur umum didirikan di mana-mana, sehingga koordinasi oleh pihak pemerintahan militer dapat berjalan dengan semestinya. Catatan dari Nasution dalam hal ini tercantum sebagai berikut:

- a. Pada umumnya rakyat masih republiken, meskipun telah dua tahun lamanya di bawah kekuasaan Belanda.
- b. Kepercayaan terhadap pemerintahan Republik masih tetap terpelihara.
- c. Dengan adanya TNI di desa rakyat merasa terjamin keamanannya.
- d. Adanya TNI di sekitar kota yang diduduki Belanda mempengaruhi pula pegawai yang bekerja dengan Belanda, sehingga mereka pun tidak ragu-ragu lagi memberikan sumbangan moril dan materiil kepada TNI. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tetap berpihak kepada Belanda..
- e. Mengenai kehidupan rakyat pada umumnya, keadaan tidak mengecewakan.

Sokongan kepada TNI dan pegawai negeri Republik tidak mengganggu perekonomian rakyat. Hanya dalam peredaran uang. terdapat kesukaran karena adanya dua macam uang, yaitu uang Belanda yang beredar di kota dan di sekitarnya dan uang ORI yang beredar di desa.

Selain itu dapat diungkapkan juga bahwa rakyat mengorbankan semua harta benda yang dimilikinya, demi kelangsungan perjuangan kita. Di samping bahan makanan, juga mereka juga berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi gerakan pasukan untuk melakukan mata-mata terhadap gerakan musuh, dan juga menyelenggarakan pemondokan jika pasukan lewat dan bermalam di suatu desa. Di sini terlihat kerja sama yang sangat rapi dan penuh kesadaran antara rakyat. lurah, dan camat dalam membantu pemerintahan dan perjuangan untuk

menegakan Republik Indonesia. Banyak aparat pemerintahan sipil yang ikut ke pedalaman bersama tentara.

Pada tanggal 22 Januari 1949, untuk pertama kalinya pasukan pejuang republik telah mengadakan perlawanan terhadap patroli Belanda di sekitar Gunung Pegat. Pasukan Belanda yang datang dari arah kota Pacitan dengan kekuatan dua buah truk menuju ke Kebonagung melakukan patroli. Patroli dilakukan karena di wilayah Kebonagung tersebut terdapat markas pejuang dan adanya dapur umum. Hal ini dikarenakan adanya mata-mata Belanda yang mengetahuinya. Sesampainya di Dukuh Jati dan Purosari Kecamatan Kebonagung tentara Belanda menembaki dan membakar empat rumah penduduk yang digunakan untuk keperluan dapur umum.

Sekembalinya dari Kebonagung, ketika truk mendekati Gunung Pegat, dengan jalan yang melambat dan sudah masuk dalam jarak tembak tidak disia-siakan oleh pasukan pejuang yang berasal dari pos Kebonagung. Terjadilah kontak senjata antar para pejuang dan tentara Belanda dan ini berhasil membawa kerugian di pihak pasukan Belanda.<sup>14</sup>

Adanya keberhasilan pasukan republik melakukan penghadangan tersebut, maka akan mendorong semangat pasukan untuk melakukan serangan ke kota Pacitan. Pada tanggal 26 Januari 1949 malam hari dilakukan serangan umum terhadap kota Pacitan. Dikarenakan dalam serangan umum yang pertama terhadap kedudukan Belanda di kota Pacitan kurang dalam hal koordinasi, maka berakibat banyak pasukan republik yang gugur. Namun demikian pasukan pejuang berhasil melakukan bumi hangus terhadap bangunan-bangunan dan toko-toko milik orang Tionghoa yang dianggap memihak terhadap Belanda.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Djumari pada tanggal 17 Juli 2013 di Pacitan.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Soemadi pada tanggal 20 Juli 2013 di Pacitan

Pada keesokan harinya tentara Belanda mengadakan serangan balasan untuk menghancurkan pos pertahanan polisi yang ada di Wonogondo. Akan tetapi serangan yang dilancarkan oleh Belanda tidak membawa hasil. Hal itu dikarenakan serangan Belanda tersebut sudah diketahui oleh pasukan pejuang, sehingga sewaktu Belanda datang, pos para pejuang dalam keadaan kosong. Selain itu sebelum Belanda sampai di Wonogondo para kesatuan pejuang seperti halnya kesatuan PH (Pasukan Hartu) berhasil melakukan penghadangan dengan memutus jalan dan menghancurkan jembatan yang akan menuju ke wilayah itu.

Pada perkembangan selanjutnya kekuatan pasukan pejuang di daerah Pacitan mulai bertambah kuat semenjak kedatangan pasukan tempur yang berasal kesatuan Kompi Ranu Wijaya. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Kompi Ranu Wijaya adalah sebagai berikut :

- Komandan Kompi : Kapten Ranu Wijaya
- Komandan Peleton I : Letnan Slamet
- Komandan Peleton II : Letnan Soeroeri

Dengan persenjataan yang dimiliki oleh pasukan ini adalah :

- Sebuah senapan 12,7
- Sebuah mitraliur-watermantel
- Sebuah mitraliur hostkit-lutch koeler
- 50 senapan laras panjang
- 3 pucuk pistol
- Beberapa amunisi dan granat tangan. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 107).

Dengan adanya kekuatan dan kemampuan baru yang dimiliki oleh para pejuang, maka pada tanggal 10 Pebruari 1949, diadakan pertemuan yang melibatkan semua pimpinan baik dari sipil maupun militer. Pertemuan ini bertempat di Kelurahan Ketrowonojoyo dan

dipimpin oleh Kapten Ranu Wijaya dan juga oleh Bupati Pacitan. Dari hasil pertemuan yang dilakukan tersebut, berhasil menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

- Pemerintahan Sipil atau Pamong Praja berkedudukan di daerah Lorok (Ngadirojo);
- Pemerintahan Militer dan Pusat Komando Teritorial Kabupaten Pacitan berkedudukan di Tulakan;
- Komandan Teritorial Kabupaten Pacitan dipegang oleh Kapten Ranu Wijaya sekaligus juga sebagai komandan Pasukan Panembahan Senopati 4000;
- Komandan KDM Pacitan dijabat oleh Letnan Satu Soeharsono;
- Kesatuan tempur dibagi dalam *Wehkreise* (WK) dan Sub *Wehkreise* (WK) sesuai dengan komando dari Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dan bersifat mobil;
- CPR II yang bertugas di daerah musuh difungsikan sebagai intelejen, berada langsung dibawah komando PPS 4000, terlepas dari induk pasukan yakni kesatuan Pasukan Hantu (PH);
- Rumah Sakit kabupaten dipindahkan dari Kebonagung ke daerah Lorok dan untuk pos-pos PMI agar diadakan di setiap kecamatan atau KODM. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 107).

Dengan adanya beberapa keputusan tersebut diatas maka pada tanggal 13 Pebruari 1949 pasukan dari peleton Slamet melakukan penghadangan pasukan Belanda di daerah Ngawen, kerugian di pihak Belanda tidak dapat diketahui. Sedangkan dari pasukan peleton Slamet mengalami kerugian dengan gugurnya dua prajurit dan seorang mengalami luka-luka (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 110). Penghadangan terjadi pada tanggal 18 Maret 1949 oleh kesatuan Pasukan Hantu yang dipimpin oleh Soeyono. Dalam penghadangan tersebut Pasukan Hantu tidak membawa hasil dikarenakan jarak tembak yang kurang efektif.

Perlu juga diketahui dalam rangka melakukan perlawanan terhadap Belanda di Pacitan, setidaknya harus mempersiapkan pemantapan kekuatan baik sipil maupun militer. Dengan adanya hal itu KDM Pacitan melakukan konsolidasi kekuatan dan juga pemantapan pembinaan teritorial. KDM Pacitan dengan keterbatasan kekuatan belum siap melakukan perang gerilya dalam jangka waktu yang panjang. Secara geografis daerah Pacitan berkontur berbukit-bukit, komunikasi antar daerah sulit kemudian koordinasi antar pasukan tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga dalam banyak hal perlu dilakukan pembenahan. Oleh karena itu pada tanggal 25 Maret 1949 bertempat di Tulakan diadakan pertemuan pemimpin militer yang ada di Pacitan yang dipimpin oleh Kapten Ranu Wijaya selaku Komandan Teritorial Kabupaten Pacitan dan juga oleh Letnan Satu Soeharsono selaku Komandan KDM Pacitan (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 112).

Pada pertemuan itu dihasilkan beberapa keputusan dan diteruskan pula dengan melakukan pelantikan dan pengangkatan para komandan Komando Onder Distrik Militer (KODM) di seluruh wilayah KDM Pacitan yang susunannya adalah sebagai berikut :

1. KODM Ngadirojo (Lorok) dijabat oleh Soetomo (Pasukan Hantu);
2. KODM Pacitan dengan komandan Letnan Abdul Kadir;
3. KODM Kebonagung dengan komandan Tegowijono;
4. KODM Arjosari dengan komandan Iskarno;
5. KODM Tegalombo dengan komandan Widayat;
6. KODM Pringkuku dengan komandan Kapten Laut Tabri;
7. KODM Punung dengan komandan Samat Srijanto;
8. KODM Donorojo dengan komandan Letnan Soenardi (gugur);
9. KODM Nawangan dengan komandan Soekanto (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 113).

Adapun tugas yang diemban oleh KODM-KODM yang ada di Pacitan adalah sebagai berikut :

1. *KODM* sebagai bagian dari militer dalam menjaga teritorialnya di daerahnya masing-masing.
2. Tugas sebagai bagian dari pemerintahan di daerah atau berfungsi sebagai pemerintahan Pamong Praja.
3. Membina dan meningkatkan kesadaran dan ketahanan rakyat, sehingga tidak mudah terpicat dengan propaganda yang dilakukan oleh pemerintahan yang dibentuk oleh Belanda dan dibina untuk ikut serta dalam membela tanah air sebagai bagian dari perang semesta.
4. Menarik pajak *in natura* dari rakyat. Pajak ini berupa dana maupun barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan perang gerilya yang dilakukan oleh para pejuang yang dibantu oleh rakyat.

Menyediakan logistik bahan makanan bagi keperluan satuan-satuan tempur yang mobil, baik yang ada di daerah SWK (*Sub Wehrkreise*) maupun WK (*Wehrkreise*). (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 113).



## BAB IV

# PACITAN SEBAGAI MARKAS GERILYA PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN

Pacitan merupakan sebuah kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Timur. Pada masa Perang Kemerdekaan Kedua wilayahnya dilalui oleh pasukan rombongan Jenderal Soedirman dalam melakukan perang gerilya. Sebelum masuk ke wilayah Pacitan Pak Soedirman beserta pasukannya sudah melewati beberapa daerah yang penuh dengan berbagai rintangan. Dengan dikeluarkannya Perintah Kilat No. 1/PB/D/48 oleh Soedirman maka semua unsur pasukan TNI yang ada di wilayah RI untuk melakukan perang gerilya. Perintah itu keluar setelah Belanda melakukan Agresi Militer yang kedua ke Ibukota RI Yogyakarta. Berdasarkan Perintah Siasat tersebut, strategi pasukan TNI diubah dari pertahanan linear menjadi perang gerilya.

Sebagai Ibukota RI Kota Yogyakarta tidak akan dipertahankan dengan kekuatan pasukan bersenjata secara besar-besaran, akan tetapi dengan cara melakukan perang gerilya yang berpangkalan pada rakyat. Oleh karena itu, dengan didudukinya Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 maka Soedirman sebagai Panglima

Angkatan Perang RI terpaksa meninggalkan kota untuk melakukan perlawanan gerilya.

Jenderal Soedirman mulai meninggalkan Yogyakarta untuk melakukan perang gerilya sejak 19 Desember 1948. Sebelum bermarkas di Pacitan Soedirman melewati berbagai daerah yaitu Bantul, Wonosari, Wonogiri, Ponorogo, Tulungagung, Kediri dan Trenggalek. Di daerah Pacitan inilah Pak Dirman beserta rombongan bermarkas dalam kurun waktu yang terlama jika dibandingkan dengan daerah lain yang pernah disinggahi oleh pasukan Jenderal Soedirman selama melakukan perjuangan gerilya. (N.N, 1985 : 251-252).

Kehadiran pasukan gerilya Jenderal Soedirman di wilayah Pacitan bermula dari arah timur memasuki desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro.<sup>16</sup> Setelah itu rombongan pasukan Jenderal Soedirman meneruskan perjalanan ke sebuah dusun yang bernama Nglegok. Di dusun ini rombongan mengatur strategi dan juga melakukan penjagaan yang ketat terhadap kemungkinan adanya mata-mata dari Belanda. Setelah beristirahat selama tiga hari di dusun Nglegok rombongan melanjutkan perjalanan ke daerah Sudimoro dengan Ngadirojo. Kemudian menuju ke arah desa Wonokarto dengan melalui desa Nogosari.<sup>17</sup>

Rombongan pasukan Jenderal Soedirman berada di Nogosari sejak tanggal 4 Pebruari 1949, lurah desa Nogosari Padmowidjojo sudah mengetahui rombongan yang datang ke wilayah desanya. Kedatangan rombongan Pak Dirman disambut dengan baik oleh lurah Desa Nogosari Padmowijoyo beserta masyarakatnya. Selama di Desa Nogosari ajudan Jenderal Soedirman Kapten Soepardjo sempat mengadakan kontak hubungan dengan KDM maupun KODM di Pacitan dan juga komando serta pemimpin-pemimpin

<sup>16</sup> Lihat lampiran Peta Kabupaten Pacitan.

<sup>17</sup> Lihat lampiran Peta situasi rute gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman

daerah lainnya. Selama masa pendudukan Belanda di Pacitan, markas KDM Pacitan berada di pegunungan sebelah timur kota Pacitan tepatnya di Tulakan dan Ngadirejo.<sup>18</sup> Sesudah menetap di desa Nogosari selama tiga hari, pasukan gerilya Jenderal Soedirman melanjutkan perjalanan ke desa Wonokarto. Setelah itu kemudian menuju desa Pringapus dan beristirahat selama seminggu dari tanggal 7-14 Pebruari 1949. (N.N, 1985 : 251-252). Selama berada di desa Pringapus, rombongan Pak Dirman keadaan mulai teratur dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan serta rencana-rencana dalam menyusun perlawanan dengan Belanda secara lebih sempurna. Pada tanggal 8 Pebruari 1949, Pak Dirman mengutus beberapa orang ke ibukota Republik Indonesia Yogyakarta untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan mengirimkan :

- Harsono Tjokroaminoto untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai politik,
- Dr. Soewondo dan Letnan Basoeki untuk mencari obat-obatan untuk Pak Dirman; dan
- Kapten Tjokropranolo untuk membawa surat balasan Pak Dirman dan kontak dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Tjokropranolo, 1992 : 163-169).

Setelah beberapa rombongan yang telah lama ikut bergerilya yang ditugaskan ke Yogyakarta, maka ketika di desa Pringapus tersisa hanya lima orang yang mendampingi Pak Dirman yaitu :

- Kapten Soepardjo Roestam;
- Letnan Heru Keser;
- Kadet Utoyo Kolopaking;
- Sersan Bambang Soemadio;
- Kasmi alias Moh. Yunus (merupakan sopir wakil konsul India

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sarmiyatin pada tanggal 18 Juli 2013 di Pacitan.

yang ikut rombongan gerilya), serta pasukan pengawal Pak Dirman. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 119).

Dari utusan yang dikirim oleh Pak Dirman ke Yogyakarta, hanya dr. Soewondo dan Kapten Tjokropranolo yang kembali dengan selamat dari tangkapan Belanda. Mulai tanggal 8 Pebruari 1949, nama Pak Dirman yang selalu disebut Pak De diganti menjadi Abdoellah Lelonopoetro. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 119).<sup>19</sup>

Sesudah keadaan dirasakan aman, rombongan melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga sampai di desa Kasihan. Dalam perjalanan ini terdapat dua tandu yang dibawa oleh pengawal rombongan Jenderal Soedirman. Satu tandu digunakan untuk membawa Pak Dirman dan satu tandu kosong digunakan untuk mengelabui Belanda. Strategi ini digunakan untuk mengelabui mata-mata pasukan Belanda. Di dusun Krajan desa Kasihan, rombongan Jenderal Soedirman singgah selama kurang lebih satu minggu.<sup>20</sup>

Kemudian sejak tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 1949 rombongan Pak Dirman berada di desa Gebyur. Selama di desa Gebyur rombongan Pak Dirman singgah selama tiga hari tiga malam sebelum melanjutkan perjalanan untuk melakukan gerilya. Pada keesokan harinya tanggal 18 Maret 1949 rombongan Jenderal Soedirman melanjutkan perjalanan menuju ke desa Tokawi. Dalam perjalanan tersebut rombongan Jenderal Soedirman mendapat sambutan dari masyarakat dan para pemuda ketika melewati Kecamatan Nawangan. Setelah rombongan melakukan istirahat sebentar di Nawangan, rombongan melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke arah barat. Perjalanan ke arah barat sampai di desa Ngambar, yang terletak tidak jauh dari Kecamatan Tirtomotyo, Wonogiri. Di desa Ngambar rombongan Pak Dirman bertemu dengan pasukan dari batalyon Soedigdo. Ketika di desa Ngambar,

<sup>19</sup> Wawancara dengan Djoko Mulyana pada tanggal 17 Juli 2013 di Pacitan.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Nunuk Ismiyati pada tanggal 18 Juli 2013 di Pacitan.

keadaan Pak Dirman mengalami demam yang cukup tinggi sehingga memutuskan bermalam di desa Ngambar. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 122). Pada tanggal 21 Maret 1949 rombongan menuju ke daerah Tirtomoyo dengan perjalanan yang cukup susah karena Pak Dirman dalam keadaan sakit. Namun demikian rombongan terpaksa harus melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah timur. Hal ini disebabkan tentara Belanda sudah berada di daerah Tirtomoyo yang merupakan basis dari pasukan Digdo.<sup>21</sup> Pada pagi hari Pak Dirman harus ditandu lagi untuk kembali kearah timur menuju desa Tokawi. Sewaktu dalam perjalanan ke desa Tokawi pada tanggal 23 Maret 1949 pesawat terbang Belanda melintasi rombongan yang tujuannya adalah menembaki rumah Lurah desa Ngambar yang pada waktu sebelumnya dijadikan tempat singgah rombongan Pak Dirman. (Fasihullisan, M, dkk, 2013 : 122).

Selama di desa Tokawi datanglah lurah desa Pakis, kecamatan Nawangan yang bernama Djaswadi Darmowidodo pada tanggal 29 Maret 1949. tujuan lurah desa Pakis adalah menyampaikan saran-saran diantaranya adalah memberikan pilihan tempat untuk markas Pak Dirman yang menurutnya lebih aman daripada di desa Tokawi yang letaknya berada di tepi jalan besar dan dekat dengan pasar. Oleh lurah desa Pakis, ada tiga alternatif yang akan dijadikan sebagai markas bagi pasukan Pak Dirman. Tiga tempat tersebut adalah : pertama, rumah ibu Balok di Borang, kedua rumah Kebayan Karsosemito di Sobo, dan ketiga rumah Pak Saman di Jurug (Soewarno, R, 1988:139).

Selain menyediakan tempat yang dianggap aman sebagai tempat yang nantinya dijadikan markas, juga menyanggupi untuk menyediakan logistik bagi rombongan Pak Dirman selama berada di wilayah desa Pakis. Kapten Soepardjo dan Letkol Soeadi yang menerima saran dari Pak Djaswadi segera melakukan peninjauan

<sup>21</sup> Wawancara dengan Djaka Mulyana pada tanggal 17 Juli 2013 di Pacitan.

terhadap daerah yang disarankan tersebut. Setelah dipertimbangkan diputuskan untuk memilih Sobo sebagai tempat markas pasukan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Pemilihan Sobo beralasan karena letaknya yang jauh dari keramaian serta memiliki udara yang tidak terlalu dingin sehingga tidak membahayakan kesehatan Pak Dirman. Selain itu letaknya tidak jauh dengan pemancar radio yang berada di desa Tokawi, sehingga dapat dengan mudah mengetahui perkembangan keadaan politik republik dan juga dapat berhubungan dengan pasukan TNI yang lainnya. (Soewarno, R, 1988:139-140).

Pada tanggal 31 Maret 1949 rombongan pasukan Jenderal Soedirman berangkat ke Sobo dan bermalam dahulu di rumah lurah Pakis. Baru pada keesokan harinya rombongan menuju ke tempat yang sudah ditentukan yakni ke rumah Kebayan Karsosemito di Sobo. Menjelang tengah hari, rombongan kecil itu bergerak menyusuri jalan setapak. Jalan di tepai tebing-tebing curam. Segala sesuatu dilakukan sebagai upaya agar kepindahan ke rumah Pak Karsosemito tidak diketahui oleh masyarakat umum. Di Sobo inilah rombongan Pak Dirman menetap dalam kurun waktu yang cukup lama serta dapat memimpin perang gerilya secara teratur.<sup>22</sup> Sobo merupakan bagian dari desa Pakis yang terletak di kecamatan Nawangan, Pacitan. Di Sobo itu hanya terdapat 7 KS dengan penduduk tak lebih dari 30 orang.<sup>23</sup> Bersama para pengawal diantaranya adalah Kapten Soepardjo, Kapten Tjokropranolo dan beberapa yang lainnya. Disamping situasi dan kondisi wilayah tersebut diatas Pak Dirman masih dapat melakukan “dede” setiap pagi hari.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Pak Dirman berada di Sobo sejak tanggal 1 April 1949 s/d 7 Juli 1949 lihat Buku N.N, 1985 halaman 252.

<sup>23</sup> KS adalah Kepala Somah sekarang Kepala Keluarga. Wawancara dengan Supadi pada tanggal 17 Juli 2013 di Pacitan

<sup>24</sup> “dede” adalah berjemur di bawah sinar matahari dan biasanya dilakukan pada pagi hari antara pukul 07.00-08.00. Wawancara dengan Supadi pada tanggal 17 Juli 2013 di Pacitan.





*Foto 1. Markas Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman  
Di Sobo, Pakis, Nawangan, Kabupaten Pacitan*

Pemilihan markas pada tempat yang terpencil itu untuk menghindarkan dari Belanda yang terus mencarinya. Sobo dipilih karena lokasinya yang berada dibawah tebing curam tertutup bukit-bukit batu dan rimbun pohon-pohon pinus sehingga sulit dilacak pesawat terbang Belanda. Saat itu Pak Dirman sakit sehingga selalu ditandu selama perjalanan. Sobo menjadi pilihan yang dirasa tepat untuk menetap dengan kondisi kesehatan beliau yang makin memburuk setelah bergerilya cukup lama. (Fashihullisan, M, dkk, 2013 : 126).

Dari situlah Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Pucuk Pimpinan Komando Perang Rakyat Semesta merancang strategi perang gerilya. Konsolidasi pertahanan rakyat semesta dimantapkan. Bersama penduduk desa mereka bahu membahu

dalam menyusun perlawanan kepada Belanda. Ketika itu penduduk desa masih jauh dari hidup layak. Hampir semuanya adalah petani miskin dengan tanah pekarangan yang ditanami singkong untuk diolah menjadi tiwul. Hanya terdapat sedikit sawah yang merupakan tadah hujan sehingga hanya panen dalam setahun sekali. Tak heran nasi beras merupakan bawang mewah. Namun demikian penduduk dengan sukarela menyumbangkan apa yang mereka punya kepada para pejuang, mulai beras hingga ternak.<sup>25</sup>

Sobo bukanlah tempat yang banyak dikenal oleh banyak orang sejak dahulu sampai sekarang. Tetapi disinilah Panglima Besar Jenderal Soedirman memusatkan semua pikiran, strategi, analisa serta pengalamannya untuk satu tujuan yaitu kemerdekaan. Di dusun Sobo Pak Dirman dapat dengan tenang bekerja dan tidak perlu berpindah-pindah lagi. Bekerja dan mengatur siasat perang dengan lebih seksama, dengan duduk diatas meja kerja sederhana.



*Foto 2. Para Pengawal Panglima Besar Jenderal Soedirman Pada Waktu Di Sobo, Pakis, Nawangan, Kabupaten Pacitan (Repro : Koleksi Markas Gerilya di Sobo)*

<sup>25</sup> Wawancara dengan Supadi dan Djaka Mulyana pada tanggal 17 Juli 2013 di Pacitan

Pasukan pengawal yang menjaga keberadaan Pak Dirman di Sobo mengalami pergantian ketika rombongan berada di dusun Sobo. Pasukan yang mengawal berasal dari pasukan pengawal CPM Letnan Soekotjo Tjokroatmodjo yang menggantikan pasukan dari Letnan Djoemadi. Pergantian dilakukan ketika Kapten Tjokropranolo (pengawal pribadi Pak Dirman) sedang mengemban tugas ke Yogyakarta (Tjokropranolo, 1992 : 172-173).

Dengan menetapkan keberadaan markas Pak Dirman, maka komunikasi dengan markas gerilya lainnya yang tersebar di berbagai tempat dapat dilakukan. Kurir-kurir dikirim kemana-mana untuk mendapatkan berita atau diutus untuk mengirim pesan atau perintah dari Pak Dirman. Surat-menyurat pun selalu lancar dan teratur. Selain itu terdapat juga beberapa perwira militer maupun tokoh-tokoh penting dari kalangan sipil yang datang ke markas Pak Dirman di Sobo. Dari keterangan Tjokropranolo (1992 : 171-173) menyebutkan bahwa tercatat beberapa perwira militer yang datang yaitu Kolonel Zulkifli Lubis (Staf Intelejen TNI), Mayor Slamet Riyadi yang menjabat sebagai Komandan Brigade Panembahan Senopati, kemudian Mayor Soenitoyoso yang menjabat Komandan Batalyon (SWK) daerah Klaten, Mayor Soedigdo yang menjabat Komandan Batalyon di Wonogiri yang berkedudukan di Tirtomoyo, Mayor Soeharto/Komandan Rayon II PBS, Kapten Ranoewidjaja yang menjabat Komandan Kompi Pacitan, Kapten Muchammad, Kolonel Darwis Djamin. Beberapa tokoh pejabat sipil yang datang diantaranya adalah Soesanto Tirtoprojo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI, R. Pandji Soeroso yang menjabat Ketua PDRI Jawa. K.H Maskur yang menjabat Menteri Agama RI serta Ny. Soesilowati yang menjadi anggota KNIP dan masih banyak tokoh lain yang datang ke markas Pak Dirman. (Tjokropranolo, 1992 : 171).



Sewaktu Pak Dirman di Sobo banyak hal teknis dan psikologis yang harus beliau selesaikan misalnya berkaitan dengan adanya perselisihan diantara batalyon-batalyon yang ada yang berasal dan berlatar belakang politik. Hal ini dimaklumi karena pada awal kemerdekaan banyak masuk paham-paham yang membawa pengaruh pada bangsa yang baru merdeka ini. Terlebih lagi sebelum adanya Agresi Militer Belanda II, Republik baik TNI dan rakyat baru saja menghadapi rongrongan dari adanya Peristiwa Madiun.

Lurah dan masyarakat Sobo memberikan satu arti yang sangat penting dan tersendiri dalam perjuangan kemerdekaan, khususnya bagi keselamatan Panglima Besar dan rombongannya. Selama hampir 3 bulan 28 hari, masyarakat Sobo menjamin logistik dan sekaligus bisa merahasiakan keberadaan pimpinan TNI. Pak Dirman bisa beristirahat dan juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena hubungan dengan para komandan pasukan di lapangan ataupun sebaliknya berjalan lancar dan juga teratur. (Tarjo, N.S.S, 1984 : 45-46).

Pasukan Pak Dirman berada di dusun SObo sampai tanggal 7 Juli 1949. sebenarnya Pak Dirman merasa keberatan untuk pergi meninggalkan markas dan kembali ke ibukota Yogyakarta yang selama 3 bulan ditempati oleh Pak Dirman dan pasukannya. Hal ini dikarenakan di daerah pertempuran di Pulau Jawa dan Sumatera masih banyak pasukan TNI yang bergerilya yang tetap bertahan. Pak Dirman merasa tidak yakin bahwa Belanda akan jujur dalam perundingan dan juga gencatan senjata, sesuai dengan pengalaman Pak Dirman dalam bertempur dan juga berunding dengan Belanda. Akan tetapi karena kepatuhan Pak Dirman kepada pemimpin nasional dan adanya surat yang dikirimkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kolonel Gtot Soebroto serta penjelasan dari Letkol Soeharto, akhirnya Pak Dirman dan rombongan pergi meninggalkan Sobo, daerah terpencil di Kabupaten Pacitan yang dijadikan markas untuk

kembali ke Yogyakarta dengan menempuh perjalanan ke arah barat dengan rute Sobo menuju Penggung, Nawangan dan Ambarsari. Dari Ambarsari ke Tirtomoyo terus menuju ke Pracimantoro. (Tarjo, N.N.S, 1982 : 51).

## BAB V

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang mengakhiri penjajahan Jepang. Oleh karenanya sejak saat itu bangsa Indonesia memiliki status sebagai bangsa yang merdeka, berkedaulatan rakyat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Pacitan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dapat mengikuti dan merasakan suasana kemerdekaan itu. Sudah barang tentu demi kokoh tegaknya kemerdekaan bangsa Indonesia masih diperlukan perjuangan baik secara fisik, mental, ekonomi maupun militer. Perjuangan itu diperlukan karena Belanda sebagai anggota Sekutu yang menang perang atas Jepang akan kembali menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Dengan tegas bangsa Indonesia menolak kehadiran kembali penjajahan Belanda, sehingga perjuangan dan pertempuran terjadi diberbagai pelosok Indonesia. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Pacitan.

Tulisan mengenai kisah perjuangan dalam menghadapi Belanda di Pacitan, menunjukkan bahwa rakyat daerah itu mempunyai andil dalam perjuangan bangsanya. Rakyat di daerah itu dengan segala



macam cara dan upaya berjuang bersama dengan militer (TNI) untuk mengamankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Di dalam perjuangan rakyat Pacitan tetap mempunyai semboyan 'lebih baik mati daripada menjadi bangsa yang terjajah, merdeka atau mayi.'

Pada masa perjuangan, terutama Perang Kemerdekaan II (1948 – 1949) telah dapat dibuktikan bahwa TNI dan rakyat bagaikan ikan dan airnya. Mereka menyadari bahwa perjuangan akan berhasil apabila keduanya (Militer dan rakyat) bekerja sama saling bahu membahu. Dapat ditunjukkan pula, bahwa perjuangan pada waktu itu bukan hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi oleh siapapun yang mau berjuang, serta rela berkorban demi kemerdekaan bangsa dan negaranya. Hal semacam itu telah dapat dibuktikan oleh semua komponen yang ada di Kabupaten Pacitan.

Selain itu, apalagi tatkala Panglima Besar Jenderal Sudirman melancarkan dan memimpin perang gerilya, Pacitan merupakan salah satu tempat yang strategis sebagai basis gerilya melawan tentara Belanda. Didalam mempertahankan kemerdekaan RI Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah bermarkas di Sobo selama 103 hari dan di Desa Wonokarto selama 37 hari. Pada masa itu meskipun kehidupan rakyat Pacitan dalam keadaan sulit, namun semangat, jiwa perjuangan dan pengorbanannya sangat tinggi. Hasil perjuangan tersebut dapat tercapai dengan adanya pengakuan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949.

## **B. Saran**

1. Pacitan merupakan satu diantara beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Pada masa Perang Kemerdekaan II wilayah tersebut mempunyai andil perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Oleh karena itu diharapkan kepada

generasi muda agar dapat mewarisi dan meneladani nilai-nilai kejuangan dari para pahlawannya.

2. Perlu diadakan adanya penelitian lebih lanjut secara menyeluruh mengenai keterlibatan rakyat Pacitan sejak awal kemerdekaan sampai dengan perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
3. Selain itu kepada pemerintah yang ada di Pacitan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berupa bangunan monumen (tetenger) hidup diberbagai tempat wilayahnya. Bangunan monumen tersebut untuk mengenang berbagai peristiwa yang pernah terjadi di Pacitan selama perang kemerdekaan berlangsung. Dengan adanya monumen hidup tersebut hendaknya dapat berfungsi:
  - a. Sebagai tonggak kenangan sejarah dan tanda hormat terhadap jasa, bakti para pejuang.
  - b. Sebagai tanda isyarat bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh generasi pendahulunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T  
1985 *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Djamhari, SA  
1967 *Markas Besar Komando Djawa (1948-1949)*. Jakarta : Lembaga Sedjarah Hankam
- Fashihullisan  
2003 *Pacitan Berjuang Pacitan Dilupakan, Sejarah Perjuangan Pacitan 1945-1949* . Yogyakarta : Aura Pustaka
- Gottschalk, L  
1975 *Mengerti Sejarah*, Terjemahan. Jakarta : Universitas Indonesia
- Kartodirdjo, S  
1974 *Lembaran Sejarah*, No. 9. Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM.
- Lestariningsih, A.D, dkk  
2008 *Soedirman Patriotisme, Gerilya Dan Martabat*

*Bangsa*. Jakarta: Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata RI.

Nasution, AH

1970 *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10*. Bandung : Angkasa

*Pokok-Pokok Gerilya*. Bandung : Angkasa

1989 *Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Gerilya*. Jakarta: Mas Agung

N. N

1985 *Memoar Perdjoangan Menegakkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945*. Yogyakarta: Yayasan Wiratama 45 Yogyakarta

Simatupang, TB

1960 *Pengantar Ilmu Perang Indonesia*. Djakarta: Kinta

1981 *Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta : Idayu

Soewarno, R

1988 *Pak Dirman Menuju Sobo, Pondok Perang Gerilya Panglima Besar Angkatan Perang RI pada masa Perang Kemerdekaan Ke II*. Jakarta: Kembang Mas.

Tarjo, N. S. S

1984 *Pak Dirman memimpin Perang Rakyat Semesta*. Yogyakarta: Yayasan Wiratama 45 Yogyakarta

Tjokropranolo

1942 *Panglima Besar TNI Jenderal Soederman*. Jakarta: Suryapresindo

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Usia (Th)	Pekerjaan		Alamat
			Dulu	Sekarang	
1	Tegoeh	90	Komandan Seksi II Kompi II Batalyon II Resimen 25 Divisi IV	Pensiunan TNI	Temon RT 01, RW 02 Kelurahan Ploso, Kec. Pacitan
2	Dahlan	87	Pegawai Kecamatan Arjosari	Anggota LVRI Cabang Pacitan	Ploso RT 01, RW 6 Kecamatan Pacitan
3	Hj. Nunuk Ismiyati	84	Siswa sekolah	Pensiunan Guru, Anggota LVRI Cabang Pacitan	Jl. H. Samanhudi 4B1 Pacitan
4	Sulasmiyem	83	Pegawai RS Umum Pacitan	Pensiunan Pega- wai Kesehatan	Kauman Rt 02, RW 02 Rejowinangun, Pacitan
5	Soemadi	82	Siswa sekolah	Pensiunan	Jl. Petung No. 28 Pacitan
6	Djumari	81	Siswa sekolah	Pensiunan Pega- wai Kecamatan Kebonagung, Pacitan	Jati, Desa Purwosari, Kebonagung Pacitan

7	Sarmiyatin	80	Staf KDM Pacitan	Pensiunan Dinas Pertanian Kab. Pacitan	Jl. DI panjaitan No. 17 Pacitan
8	Supadi	71	-	Tani	Sobo, Menur, Pakisbaru, Nawangan, Kabupaten Pacitan
9	Djaka Mulyana	70	-	Mantan Lurah Pakis Baru, Nawangan	Krajan, RT 02, RW 1, Pakisbaru, Nawangan, Kabupaten Pacitan



**KRIMINALITAS DI SRAGEN  
PERIODE 1948 – 1949:  
KAJIAN REVOLUSI SOSIAL  
DI TINGKAT LOKAL**

**Darto Harnoko**



# BAB I

## PENDAHULUAN

Penelitian ini lebih menekankan pada sisi lain dari revolusi di tingkat lokal terutama tentang kriminalitas, 1948-1949 di wilayah Sragen. Kriminalitas atau perbanditan timbul sebagai akibat perubahan sosial yang diintroduksi pemerintah kolonial melalui tanah-tanah partikelir maupun tanah perkebunan. Reaksi yang muncul dari petani karena tekanan pajak dan kerja wajib yang berat menyebabkan kemiskinan, penghisapan dan penekanan. Masuknya kultur barat ke pedesaan menyebabkan juga petani kehilangan orientasi dan lepas dari budaya aslinya. Akhirnya mereka mencari jalan keluar antara lain berupa perbanditan (Suhartono, 1995: 129).

Tradisi protes yang disalurkan lewat ketidakpuasan terhadap pemerintah dan struktur atas lainnya dianggap sebagai penekan dan merugikan kelompok bawah terutama petani secara ekonomi dan kultural. Walaupun kriminalitas atau perbanditan pedesaan sifatnya sangat lokal, mempunyai ciri khas dan hidup dalam jangka pendek, tetapi perbanditan tetap saja selama masih terjadi eksploitasi yang merugikan kelompok bawah terutama petani. Oleh karena itu merebaknya perbanditan di pedesaan adalah satu bentuk ketidakmampuan elite penguasa untuk mengetahui sebab-

sebab utama keluhan dari kelompok bawah atau petani. Meijer dalam tulisannya yang berjudul **Desa Politie in het Regentschap Sragen** menjelaskan bahwa para bandit dalam menjalankan aksinya mendapat perlindungan *danyang*, penjaga desa yang membantu para bandit melakukan tugasnya. Selain itu mereka juga menggunakan *petungan* waktu (Meijer, 1930: 224-227). Dua faktor ini dapat diketahui bahwa para bandit harus mempunyai *ngilmu pedanyangan* dan *ngilmu kalamuding*. Dalam hal ini mereka menentukan sasaran desa mana yang akan dituju dengan perhitungan kombinasi nilai hari dan nilai pasarannya serta bagaimana mereka menentukan arah untuk melarikan diri dari pengejaran aparat keamanan (Meijer, 1930: 227).

Pada abad 19 tepatnya 15 November 1873 seorang bekel desa Kretek Sragen kedatangan gerombolan yang terdiri dari 20 orang dengan mata gelap membunuh istri tua bekel itu kemudian membawa kekayaan sebanyak f 108,84 dan 11 ekor kerbau serta beberapa pikul padi yang kemudian melarikan ke arah Grobogan (Suhartono, 1995: 144). Pada masa itu seorang bandit yang terkenal bernama Singa Barong berasal dari lereng selatan dan timur Merapi sedang kawan-kawannya berasal dari lereng barat Lawu. Kesemuanya itu akibat kondisi sosial, ekonomi yang kurang menguntungkan bagi masyarakat bawah terus berkembang sampai pada abad 20 terutama pada masa pergerakan nasional dan revolusi fisik.

Pada periode revolusi fisik, kondisi Sragen menjadi tidak menguntungkan dan dialami pula oleh daerah-daerah lain seperti Pemalang, Tegal dan Pekalongan (Anton E. Lucas, 1989: 1-10). Revolusi yang muncul di beberapa daerah tersebut, terutama Sragen berlangsung dalam suasana radikalisme dan pemerintah nasional baru yang sedang berkuasa hampir tidak mampu mengendalikan seluruh dinamika revolusi yang mulai bangkit itu. Pertama yang mulai tampak ialah usaha berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia untuk merebut alat-alat kekuasaan negara, yang pada

waktu itu berada di tangan Jepang. Tindakan-tindakan ini lalu disusul dengan berbagai tindakan lainnya yang tidak saja bersifat anti asing (kolonial) tetapi juga bersifat anti feodal, anti pangrehpraja (karena keduanya dianggap pernah menjadi alat atau bagian dari aparat (birokrasi kolonial), anti rasial (golongan Cina yang menjadi pedagang (kelas menengah), termasuk juga tindakan yang bersifat anti elitisme. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari pada fase-fase permulaan revolusi itu muncul berbagai huru-hara, berbagai pergolakan sosial (Onghokham, 1985: 5).

Beberapa pergolakan sosial yang muncul memperlihatkan bahwa revolusi Indonesia tidak hanya merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan eksistensinya tetapi mengandung pula permasalahan-permasalahan sosial didalamnya. Suyatno menegaskan bahwa revolusi Indonesia tidak saja menimbulkan konflik politik tetapi juga konflik sosial seperti pembunuhan, pemberontakan dan kegelisahan sosial di dalam masyarakat, seperti adanya banyak pencurian, penggedoran dan lain sebagainya (Suyatno, 1978: 55).

Munculnya masalah-masalah sosial di beberapa daerah dalam revolusi Indonesia telah memungkinkan terjadinya revolusi sosial di dalam “kancah” revolusi nasional. Revolusi sosial bagaikan banjir dan tidak seorang pun dapat mengendalikannya. Apapun yang dilakukan, ia mengikuti jalannya sendiri, tanpa menghiraukan siapa yang menciptakannya (Anthony Reid, 1996: 103). Oleh karena itu, revolusi sosial penuh dengan pergolakan dan konflik di dalam masyarakat sebagaimana yang diistilahkan oleh Sartono Kartodirdjo sebagai jaman *gegeran* yang penuh dengan pergolakan dengan *srobotan*, *gedoran* maupun pendaulatan (Sartono Kartodirdjo, 1981: 2-3).

Jaman *gegeran* dapat dipahami sebagai masa yang penuh kekerasan atau dapat dipahami sebagai riuh-rendahnya aksi-aksi kriminalitas. Kriminalitas merupakan fenomena yang menarik

selama berlangsungnya revolusi. Bentuk-bentuk kriminalitas yang muncul seringkali dilakukan oleh para *gedor*, *jagoan*, *bajingan* maupun *lenggaong*. Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa, selama berlangsungnya revolusi, kekuatan kaum kriminal seringkali membonceng gerakan revolusioner (Sartono Kartodirdjo, 1981: 9). Oleh karena itu, sangat sulit membedakan antara pejuang dengan bajingan atau antara pahlawan dengan penjahat. Batas antara pejuang dengan bajingan dalam revolusi Indonesia sangatlah tipis. Bahkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ryadi Gunawan, seorang pejuang bisa menjadi bajingan dan seorang bajingan bisa juga merupakan pejuang (Ryadi Gunawan, 1981: 9).

Di wilayah Sragen muncul juga hal-hal yang menyangkut konflik-konflik maupun kriminalitas di wilayah pedesaan. Terutama pada awal revolusi sampai Agresi Militer Belanda Kedua. Pada masa perang kemerdekaan II, Belanda dapat menduduki Sragen pada tanggal 27 Desember 1948. Karena kekurangan persenjataan, maka TNI hanya mengadakan sedikit perlawanan sambil bergerak mundur. Untuk memberi kesempatan pada masyarakat dan aparatur pemerintahan sipil mundur keluar kota (Arsip Reksa Pustaka No. S.507).

Setelah Kota Sragen dapat diduduki Belanda, maka dibentuklah Pemerintah Militer Kabupaten. Dalam pembentukan Komando Gerilya, daerah Sragen dijadikan sub *wehkreise* (SWK). Kesatuan-kesatuan ini selalu dibantu seluruh masyarakat Sragen, dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Lurah sangat berperan dalam rangka menggalang kekuasaan rakyat. Kepada Lurah diperbantukan kader-kader Territorial yang disebut Pasukan Gerilya (Pager Desa). Secara umum, anggota-anggota Pager Desa yang terdiri dari pemuda dan masyarakat lainnya banyak membantu tugas militer. Misalnya dalam hal perhubungan yaitu menyampaikan berita dari satu tempat ke tempat lain,

kemudian mengirim makanan dan membantu mengangkut peralatan pada waktu pasukan ataupun pusat pemerintahan militer berpindah tempat. Selain itu sisi lain dari revolusi di Sragen ini juga muncul kekerasan dan kriminalitas (Arsip Reksa Pustaka No. S.507).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini lebih menekankan pada Bagaimana kondisi wilayah Sragen pada masa awal Perang Kemerdekaan serta bentuk-bentuk kekerasan, kriminalitas yang muncul di Sragen selama periode tersebut?

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini ingin mengidentifikasi dan mendeskripsikan peristiwa revolusi fisik di Sragen serta menggali sisi-sisi lain perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Sragen untuk menambah khasanah sejarah nasional Indonesia.

Dalam penelitian ini, literatur untuk membentuk kerangka berfikir yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti secara teoritis mengenai kriminalitas adalah karya-karya Hobsbawm, seperti *Primitive Rebels*, *Bandits*, maupun *Social Banditry* (Hobsbawm, 2000: 102-103). Ia mengemukakan bahwa fenomena perbanditan merupakan bagian dari protes sosial terhadap pemerintah dan perkebunan yang merugikan petani. Sebagai bagian dari protes sosial, perbanditan tidak dapat dilepaskan dengan (1) perasaan tidak puas; (2) sukar melepaskan perbanditan yang sesungguhnya dengan gerakan sosial, dan (3) gambaran situasi yang masih primitif. Tokoh-tokoh bandit seringkali dianggap pahlawan atau jagoan karena menempatkan musuh para petani sama dengan musuh para bandit.

Menurut Crane Brinton, kekerasan memegang peranan penting dalam berlangsungnya suatu revolusi (Crane Brinton, 1962: 107-114), Erich Fromm mendefinisikan kekerasan sebagai “kadestruktifan” dan “kekejaman” sebagai kecenderungan khas manusia untuk merusak dan untuk memperoleh kekuasaan mutlak

(T. Ibrahim Alfian, 1990: 14), sedangkan Eisenstadt memahami kekerasan sebagai agresi terbuka dan terang-terangan yang lahir dari ketidakberaturan hubungan sosial (Eisenstadt, 1986: 5).

Dalam revolusi Indonesia, kekerasan merupakan prasarana yang penting dari kekuatan-kekuatan politik atau badan-badan perjuangan dalam memperebutkan kekuasaan. Konflik di antara kekuatan politik tersebut didasarkan pada kepentingan dan dasar idiologi yang berbeda. Idiologi revolusioner membangkitkan gerakan revolusioner massa dengan menimbulkan ikatan-ikatan idiologis serta memobilisasi golongan-golongan sosial. Karena kedudukannya berbeda-beda dalam masyarakat, maka golongan-golongan itu mendukung idiologi revolusioner dengan idiologi politik masing-masing. Keterlibatannya dalam proses revolusioner dihayatinya lewat organisasi atau badan perjuangan (Hans Meyerhoff, 1959: 249-272).

Proses revolusi mencakup struktur-struktur politik baru, pada satu pihak menghancurkan kekuasaan kolonial yang dominan dan mendobrak struktur tradisional pada pihak lain. Perubahan struktural yang radikal tidak hanya menimbulkan partisipasi dan mobilisasi politik tetapi juga konflik, kekerasan, bahkan di beberapa daerah revolusi sosial (Sartono Kartodirdjo, 1992: 17).

Revolusi sosial merupakan clash antara organisasi revolusioner dan unsur-unsur orde lama atau golongan berkedudukan (*establishment*). Anton Lucas mengemukakan bahwa, terdapat tiga patokan yang mendasari munculnya pergolakan sosial pada masa revolusi, yaitu perubahan sosial ekonomi sebelum perang Dunia II, dampak pendudukan Jepang, dan munculnya ciri-ciri revolusi sosial (Hans Meyerhoff, 1959: 121). Menurut Sartono Kartodirdjo, berlangsungnya revolusi sosial di beberapa daerah “berjalan” dalam empat skenario, yaitu (1) kristalisasi kekuatan sosial dalam badan perjuangan; (2) penggolongan kekuatan sosial itu berdasarkan idiologi yang terdiri

atas tiga kategori, yaitu kanan, tengah, dan kiri; (3) polarisasi yang terjadi antara golongan itu; (4) dominasi golongan radikal dalam episode awal revolusi fisik (Eugene J. Meehan, 1973: 30). Berbagai penjelasan konsep di atas sangat membantu untuk penelitian ini. Adapun originalitas/keaslian penelitian ini lebih menekankan pada kriminalitas di Sragen periode 1948-1949.

Selanjutnya beberapa buku untuk menelusuri lebih jauh tentang wilayah Sragen pada masa perang kemerdekaan kedua, antara lain Arsip Reksa Pustaka No. S.507, terutama laporan tulisan Wedono Hatmoperwito menjelaskan bahwa pada tahun 1948-1949 banyak terjadi kerusuhan dan penculikan yang sebagai mata-mata Belanda. Penculikan itu sebagian besar dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Adapun daftar orang yang diculik di wilayah Sragen sebanyak 34 orang, sedang yang selamat ada 8 orang. Laporan ini sangat mendukung untuk mengungkap sisi lain dari peristiwa yang terjadi di tingkat lokal terutama di Sragen pada masa perang kemerdekaan kedua.

Retno Astuti dkk, **Perubahan Sosial di Sragen, 1942-1950** (Belum diterbitkan, BKSNT, 1992). Buku ini selayang pandang menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di Sragen. Sedang posisi penelitian ini lebih menekankan pada perjuangan, konflik-konflik yang terjadi serta berbagai hal yang timbul termasuk di tingkat bawah terutama menyangkut kekerasan dan kriminalitas pada periode 1948-1949.

Selanjutnya hasil karya Suhartono dengan judul **Bandit-bandit Pedesaan di Jawa : Studi Historis 1850 – 1942**, terbitan Aditya Media tahun 1995. Buku ini berisi tentang bandit-bandit di pedesaan Jawa terutama menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa itu serta perbanditan sebagai manifestasi protes sosial dengan berbagai kasus terutama di wilayah Banten, Batavia, Yogyakarta, Pasuruan dan Probolinggo. Oleh karena itu penelitian ini sangat



membantu untuk mengungkap tentang perbanditan di wilayah Sragen.

Hasil karya Yulianto Ibrahim dengan judul **Pejuang dan Bandit di Persimpangan Kota Bengawan : Studi Kekerasan dan Kriminalitas Pada Masa Revolusi di Surakarta**, terbitan Citra Graha Pustaka 2004. Dalam buku ini menjelaskan berbagai persoalan yang menyangkut sisi-sisi lain dari revolusi di tingkat lokal terutama menyangkut kriminalitas dan kekerasan di Surakarta. Oleh karena itu buku ini sangat mendukung dalam penelitian ini.

Selanjutnya buku hasil karya M.C. Ricklefs yang diterjemahkan oleh Dharmono Hardowidjono berjudul **Sejarah Indonesia Modern** diterbitkan oleh Gajah Mada Press tahun 1991. Buku ini sangat penting untuk menelusuri berbagai peristiwa di tingkat lokal di Indonesia termasuk kekuatan operasi di Sragen yang tergabung dalam Barisan Banteng untuk menculik Sunan. Oleh karena itu buku ini bisa untuk melacak lebih jauh tentang organisasi kelasykaran yang ada di wilayah Sragen.

Langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang proses pengerjaannya melibatkan langkah-langkah tertentu menurut norma-norma disiplin sejarah (Suhartono, 2010: 29-56). Data-data yang dikumpulkan dari berbagai jenis sumber diseleksi dan dirangkaikan ke dalam hubungan fakta hingga membentuk pengertian-pengertian yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk penulisan.

Sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan ini antara lain buku-buku, arsip-arsip pribadi dan ada pula yang berupa rekaman sehari-hari seperti surat kabar, brosur, majalah maupun arsip-arsip lokal. Sumber-sumber ini ternyata bukan hanya memuat data-data yang menunjuk faktanya, tetapi juga tentang opini maupun interpretasi (Kartodirdjo, 1993: 19-45). Sumber ini kadang-kadang

sangat menonjol sekali, sehingga mudah diketahui subyektifitas yang melekat di dalamnya karena sifat keterusterangannya dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi dan kepentingan kelompok masing-masing seperti terlihat pada surat kabar terbitan periode revolusi fisik. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode sejarah lisan. Penulis berusaha mewawancarai orang-orang di Dewan Harian 45 Sragen yang secara langsung ikut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan sejarah Indonesia periode revolusi fisik di tingkat lokal sebagai bahan studi pemerintah daerah kaitannya dengan strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan memperkaya muatan lokal kaitannya dengan mata pelajaran sejarah Indonesia.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KOTA SRAGEN PADA MASA REVOLUSI

### A. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Sragen terbelah oleh Sungai Bengawan Solo yaitu daerah utara Bengawan dan selatan Bengawan. Bagian utara Bengawan merupakan daerah pegunungan kapur yang tandus. Daerah ini hanya baik untuk eksploitasi hutan produksi, misalnya kayu jati dan tanaman pangan palawija.

Sedang daerah sebelah selatan Bengawan merupakan daerah subur. Karena terdiri dari dataran rendah sehingga cukup baik untuk lahan pertanian. Oleh sebab itu maka perkembangan dan kemajuan daerahpun tidak sama wilayah di sebelah utara Bengawan.

Luas daerah seluruhnya  $\pm 941\text{m}^2$  yang terbagi menjadi 20 buah kecamatan. Dari berbagai kecamatan ini tinggal penduduk asli dan para pendatang bangsa asing yang terdiri dari Bangsa Eropa  $\pm 269$ , Cina  $\pm 976$  dan Timur Asing  $\pm 13$  lainnya (Larson, 1990: 1-10). Bangsa Eropa kebanyakan menduduki jabatan dalam bidang pemerintahan dan menguasai pabrik. Bangsa Timur Asing lainnya banyak bergerak dalam bidang perdagangan. Ternyata pada waktu

itu sudah kelihatan adanya kelompok-kelompok penduduk menurut suku bangsa masing-masing sehingga segala perkembangannya akan nampak. Rupanya hal semacam ini tidak mengalami banyak perubahan hingga tahun 1950, saat Bangsa Belanda meninggalkan Indonesia.

## **B. Pelapisan Sosial Masyarakat**

Untuk mengetahui pelapisan sosial di daerah Sragen pada waktu masih dibawah Kasunanan, tidak dapat terlepas dari susunan masyarakat Kerajaan (Kasunanan). Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat merupakan kesatuan kelompok manusia yang terjadi dari penggabungan individu-individu yang terikat oleh nilai-nilai sosial yang ada. Jalinan hubungan antar individu tersebut diikat dalam bentuk yang bermacam-macam, antara lain ikatan daerah, ikatan peraturan-peraturan tentang kelakuan dan ikatan dalam pembagian fungsi (Soedarmono, 1977: 16).

Pelapisan sosialnya di Sragen terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama, terdiri dari para “Sentana Dalem” yaitu mereka yang berdarah biru. Bagian kedua, para priyayi atau “Abdi Dalem” dan bagian ketiga para “Kawula Dalem” (Soeyatno, 1975: 3).

Kategori Pertama, termasuk keluarga raja atau khas yang memerintah. Sebagai institusi formal dari pemerintahan kerajaan golongan ini sejak memegang kekuasaan berusaha mengikat kesatuan-kesatuan masyarakat lokal menjadi satu ke dalam pemerintahan pusat kerajaan. Status raja ditempatkan dalam hirarki tertinggi, dalam arti sebagai penguasa tertinggi pada bidang politik dan lembaga administratif pemerintahan kerajaan.

Kategori yang kedua, termasuk pegawai-pegawai raja. Dalam kategori kedua ini dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok.

1. Pegawai-pegawai yang dekat dengan raja. Golongan ini termasuk kelompok elite birokrat atau yang bertugas memegang kekuasaan administratif pemerintahan kerajaan. Patih sebagai kepala birokrasi pusat dibantu oleh para nayaka. Untuk melaksanakan tugas administratif pemerintahan pada tingkat regional, maka Raja mengangkat “Bupati Pangreh Raja” untuk melancarkan struktur administratif pemerintahan di tingkat daerah.
2. Elite Birokrat Tengahan, terutama terdiri dari para bupati. Status dan fungsinya berada di bawah kekuasaan patih yaitu meliputi pertahanan wilayah regionalnya, menjalankan lembaga administratif pemerintah kerajaan di daerah dan pengumpulan hasil-hasil bumi kerajaan yang seterusnya diserahkan sebagai upeti kerajaan raja. Struktur organisasi pemerintah di daerah ini pada umumnya sama seperti dalam pemerintahan pusat, yaitu untuk melengkapi aparat pemerintahannya, penguasa di tingkat daerah ini berhak mengangkat pegawai-pegawai bawahannya.
3. Elite birokrat rendahan, yang terdiri dari jabatan kliwon, penewu, penetus, penekat. Jabatan-jabatan ini merupakan nama jabatan pada waktu kepala-kepala rendahan itu masing merangkap sebagai kepala pasukan. Pada waktu kepala-kepala rendahan itu sudah tidak merangkap kepala pasukan jabatan sesudah kliwon, yaitu penewu, mantri lurah (Soetardja Kartohadikoesoema, 1965: 176-177).

Kategori ketiga, termasuk dalam pembagian masyarakat golongan terbawah, disebut sebagai “kawula dalem”. Kesatuan masyarakat bawah ini nampak dalam kelompok-kelompok lokal seperti dalam masyarakat petani di desa-desa seluruh Kabupaten Sragen maupun buruh di kota-kota.

Uraian berikut ini akan menjelaskan hubungan antara para penguasa dengan golongan masyarakat bawah dalam mempersoalkan masalah tanah. Dengan demikian akan dapat diketahui beberapa bentuk pelapisan sosial masyarakat Sragen berdasarkan status tanah.

Sebagai daerah agraris Kabupaten Sragen meletakkan dasar-dasar perekonomiannya pada hasil produksi tanah-tanah daerah kekuasaannya kepada siapa saja dengan imbalan wajib memberi upeti hasil bumi kepada raja. Disamping itu raja berhak pula mencabut kembali tanah dengan persyaratan seperti orang tersebut meninggal dunia atau orang tersebut turun dari jabatannya. Fungsi lain tanah bagi raja adalah sebagai gaji untuk para “sentana dalem” atau para “abdi dalem” yang disebut sebagai tanah lungguh.

Para pemegang lungguh disebut “patuh”. Berapa banyak lungguh yang diberikan kepada para “patuh” ini tergantung dari status dan fungsi jabatan-jabatannya.

Golongan petani sebagai lapisan masyarakat terbawah memberikan perhatian cukup besar terhadap nilai tanah. Bagi petani, tanah berarti modal hidup mereka, sehingga tanah menurut pandangan mereka menjadi sesuatu yang berharga. Dasar terbentuknya atau bibit yang membutuhkan adanya sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat ialah sesuatu yang dihargai (Selo Sumardjan dan Sulaiman Sunardi, 1964: 253).

Di kalangan petani itu sendiri sesungguhnya terjadi pembagian sistem berlapis-lapis dalam masyarakatnya. Di lingkungan masyarakat petani terdapat golongan yang menguasai tanah, disebut *kuli* atau *gogol* dan terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu : *kuli penggarap*, *kuli kenceng* dan *kuli kendo*. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah garapan disebut *kudung*. Jadi disini nampak jelas, bahwa lapisan yang terdapat di kalangan petani ini pun berdasar pemilikan atas tanah garapan, karena tanah garapan dianggap sesuatu yang berharga (Koentjaraningrat, 1970: 157).

Bertolak dari uraian di atas, gambaran dari struktur masyarakat Sragen yang merupakan daerah kabupaten dari Kerajaan Kasunanan Surakarta sebagai berikut:

1. Abdi dalem atau priyayi yang terdiri dari elite birokrat tengahan dan elite birokrat rendahan. Lurah beserta punggawa desanya termasuk ke dalam kategori abdi dalem.
2. Kawula dalem atau *wong cilik*, yang terdiri dari petani di desa-desa dan buruh.

Di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, lurah dengan punggawa desanya ditetapkan oleh raja atau atas nama raja. Pengangkatan kepala desa dari atasan ini menyebabkan hubungan batin antara kawula (rakyat) dengan kepala desanya yang termasuk elite abdi dalem agak longgar, sebab kepala desanya itu menurut anggapan rakyat semata-mata adalah pegawai negeri.

Apalagi bila kepala desa itu berbuat yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, akan menyebabkan rakyat bersikap pasif atau kadang-kadang menentang (Soetarjo Kertohadikoesoemo, 1965: 28). Meskipun demikian hubungan saling ketergantungan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat Sragen tersebut, menimbulkan suatu sistem pembagian kerja. Secara fungsional, sistem ini telah mewujudkan stratifikasi sosial di kalangan masyarakat.

### **C. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Masalah pertama yang sangat memprihatinkan adalah rusaknya lahan pertanian dan prasarana penunjangnya. Kerusakan tersebut akibat tidak terurusnya selama revolusi. Bukan saja lahan pertanian yang tidak terurus dan tidak terpelihara sehingga menjadi tandus, tetapi juga jaringan saluran air di sawah-sawah tidak berfungsi lagi.



Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Sragen secara geografis terbelah oleh Bengawan Solo menjadi daerah utara Bengawan dan selatan Bengawan, akan mengakibatkan adanya kondisi yang berbeda. Daerah sebelah utara Bengawan merupakan daerah yang tandus, dan daerah selatan Bengawan merupakan daerah yang lebih subur. Rusaknya lahan pertanian akibat revolusi tersebut lebih dirasakan oleh penduduk di wilayah dua Kawedanan di seberang utara Bengawan, yakni Kawedanan Cemolong yang terdiri dari wilayah Kecamatan Cemolong, Miri, Sumberlawang, Plupuh dan Tanon serta Kawedanan Gesi yang terdiri dari wilayah Kecamatan Gesi, Tangen, Jenar, Sukadana dan Mondokan. Sedang daerah seberang selatan Bengawan kerusakan lebih dirasakan pada sarana penunjangnya, yakni tidak berfungsinya saluran air dan sekaligus sistem yang mengatur pembagian air tersebut.

Akibat yang mengancam dari kondisi pertanian yang demikian adalah musim paceklik panjang yang diderita rakyat setiap musim kemarau, sehingga menumbuhkan busung lapar di desa-desa, khususnya di bagian utara Kawedanan Gesi dan Gemolong yang berbatasan dengan Kabupaten Purwodadi tidak dapat dielakkan. Akibat lain yang dirasakan oleh rakyat, khususnya di sebelah selatan adalah keresahan sosial akibat seringnya terjadi perkelahian antar petani berebut air setiap tanam tiba (Panitia Hari Jadi Sragen, 1987: 28).

Masalah kedua yang erat hubungannya dengan pemisahan wilayah utara dan selatan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan, baik oleh pemerintah daerah adalah masalah komunikasi dan transportasi. Terputusnya hubungan antara dua wilayah Kawedanan yang meliputi sebelas kecamatan di seberang utara dengan pusat pemerintahan khususnya dan wilayah-wilayah lain di seberang selatan oleh Bengawan Solo, merupakan hambatan

yang berat yang sangat dirasakan dalam masalah komunikasi dan transportasi.

Dalam masalah komunikasi, dimana media komunikasi elektronika belum berkembang pada awal tahun 1948-1949, karena tingkat teknologi yang belum maju, maka sistem komunikasi tatap muka dan surat menyurat merupakan cara paling baik yang dapat dilakukan. Agar sistem ini dapat berjalan lancar perlu ditunjang sarana dan prasarana transportasi, baik berupa dokar, sepeda, sepeda motor, mobil atau sarana angkutan umum. Sedang yang dimaksud prasarana adalah jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain yang dapat memperlancar jalannya sarana-sarana transportasi.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bahwa jaringan jalan yang menghubungkan Sragen sebagai pusat pemerintah dengan kota-kota Kawedanan dan Kecamatan di seluruh wilayah Sragen pada saat itu belum memadai. Jalan-jalan yang ada yang dibangun sejak pemerintah kolonial Belanda dalam keadaan rusak berat. Khususnya wilayah seberang utara sungai. Masalah jaringan jalan yang menghubungkan wilayah ini pusat pemerintahan terhalang oleh tiadanya jembatan penghubung.

Untuk sementara perahu-perahu tambang dapat menggantikan fungsi jembatan tersebut. Penyelenggaraan penambangan ini ditangani oleh swasta. Dua diantara tempat penambangan yang potensial adalah penambangan Gawan yang menghubungkan Tanon dengan Sidoharjo. Jalur ini merupakan urat nadi yang menghubungkan wilayah Kawedanan Gemolong dengan Sragen sebagai pusat pemerintahan. Sebuah lagi tempat penambangan Sapen, yang menghubungkan wilayah Kawedanan Gesi dengan pusat pemerintahan dan daerah-daerah di seberang selatan Bengawan lainnya.

Kondisi demikian makin dirasakan berat apabila musim hujan tiba dan banjir Bengawan Solo meluap, sebagai akibat rusaknya lahan daerah hulu sungai. Akibat yang timbul karena kondisi prasarana semacam itu adalah terhambatnya komunikasi antara daerah utara dan selatan, bahkan kadang-kadang putus sama sekali pada saat banjir meluap. Bagi pemerintah daerah, keadaan ini berarti tidak berfungsinya mekanisme komunikasi antara pusat dan daerah. Hal ini akan berakibat terhambatnya sistem laporan serta instruksi dan informasi ke daerah-daerah bahkan sistem pengawasan pun terganggu.

Dalam masalah transportasi tidak memadainya sarana dan prasana yang ada merupakan penyebab tidak lancarnya arus lalu lintas. Secara umum, faktor penghambat aktivitas transportasi bagi seluruh daerah Sragen pada dekade 1945-1949 adalah tidak memadainya jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota kecamatan, kawedanan dan Sragen sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

Kondisi sarana dan prasarana transportasi demikian akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Tidak lancarnya arus ekonomi akibat terhambatnya transportasi sangat dirasakan oleh penduduk desa maupun kota, mereka harus memikul dan menggondongnya dengan menempuh jarak yang panjang. Sebab itulah maka hasil bumi tersebut jatuh ke tangan para bakul. Harga hasil bumi di pasar-pasar kota sangat tinggi, sebab para bakul telah membayar biaya transport yang mahal. Sebaliknya penduduk desa merasa susah untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari seperti garam, minyak tanah, minyak goreng, dan sebagainya, sebab mereka harus menunggu para bakul yang datang pada hari-hari pasaran.

Di bidang sosial nampak bahwa akibat tidak lancarnya transportasi, khususnya tidak ada jembatan pada jalur-jalur vital

menyulitkan perjalanan para murid dan pelajar, pegawai atau buruh “nglajo”. Di samping perjalanan mereka dihambat oleh tidak adanya jembatan juga mereka harus mengeluarkan biaya tambah untuk ongkos perahu tambang pulang pergi. Faktor lain yang menambah beban masyarakat adalah masalah keselamatan para murid/pelajar khususnya dan para pemakai jasa penambangan umumnya, yakni musibah yang mungkin dialami perahu tambang pada musim banjir besar yang meminta korban para penumpang. Sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1949 musibah terbaliknya perahu tambang pada saat banjir di penambangan Gawan, yang membawa korban para pelajar dan pemakai jasa lainnya.

Di bidang pendidikan, tantangan yang harus dihadapi adalah tuntutan kebutuhan akan pendidikan, baik pada tingkat pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan menengah. Dengan makin meningkatnya permintaan masuk sekolah dari tahun ke tahun semenjak proklamasi, maka sekolah-sekolah yang ada yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, baik secara kuantitatif dan kualitatif tidak memadai. Pada tahun 1945 hanya ada 20 buah saja sekolah yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Jumlah itu terdiri dari :

1. *Volkschool* (lama pendidikan tiga tahun) = 7 buah.
2. *Tweede Indlandsche School* (lama pendidikan 5 tahun) = 10 buah.
3. *Hollandsche Indlandsche School* (lama pendidikan 7 tahun) = 2 buah swasta.
4. *Europeesche Lagere School* (lama pendidikan 6 tahun) = 1 buah.

## D. Kehidupan Kultural

Kehidupan kultural yang ada di daerah Sragen antara lain Upacara Adat *Dhukutan*, Upacara *Larap Slambu* di kompleks makam Pangeran Samudro, atau yang lebih dikenal dengan nama Gunung Kemukus. Sedang kesenian rakyat di daerah Sragen antara lain *Jathilan*, *Jaran Kepang*, dan *Tayub*. Kesenian Tayub pernah mencapai zaman keemasannya terutama di kalangan masyarakat Sragen yang berada di wilayah utara Bengawan Solo, seni Tayub ini sudah begitu mendarah daging. Kesenian itu sangat lekat dengan kehidupan masyarakat pinggiran. Tayub selalu hadir dan tidak bisa dipisahkan dan selalu mewarnai kemeriahan orang punya kerja. Seperti hari ulang tahun, penyambutan upacara, sampai pada upacara bersih desa (Suara Merdeka, Juli 1984: 5). Pada masa sekitar tahun 50-an seni tayub tidak bisa dipisahkan dengan ciu dan cium. Setiap ada pertunjukan seni tayub, maka para penayub ini selalu minum ciu (minuman keras), dengan maksud dijadikan rangsangan bagi para penayub dengan para penari lainnya untuk menguasai penari putri yang disebut *teledhek* (Suara Merdeka, Juli 1984: 5). Sebagai pengiring seni tayub dipakai gendhing-gendhing Jawa yang panas. Jika para penayub yang sudah banyak minum ciu tersebut mulai mabok, seringkali terjadi tindakan yang brutal. Dalam situasi yang hangat ini akhirnya penayub berusaha mencium, merangkul dan bahkan membopong ledhek (penari putri). Akibatnya timbul perselisihan diantara para penayub yang berusaha saling menguasai para ledhek.

Proses untuk menjadi ledhek pun tidak gampang. Mereka harus melalui latihan secara terus menerus. Untuk pertama kalinya mereka akan menjadi *teledhek omben*. Mereka itu biasanya masih dalam taraf belajar. Tugasnya dalam sebuah tanggapan, mengedarkan minuman bagi para tamu sebelum para tamu terjun ke arena untuk menari bersama dengan penari yang disebut *teledhek tayub*. Proses untuk

menjadi penari yang disebut *teledhek omben* ke *teledhek tayub* harus melalui upacara terlebih dahulu yang disebut sebagai upacara *udar gelung* (Riyadi Gunawan, 1985: 11). Dalam upacara itu sesungguhnya dapat mendeteksi apakah seseorang itu menjadi *teledhek tayub* atau *teledhek janjungan*. Menurut kepercayaan mereka jika syarat-syarat tertentu dalam upacara itu tidak lengkap, maka kemungkinan besar seseorang bisa menjadi *teledhek janjungan*. *Teledhek janjungan* adalah sebutan bagi para penari yang menjajakan dagangan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dalam dunia *teledhek* akhir dapat diketahui adanya beberapa kategori yaitu, *teledhek omben*, *teledhek tayub*, *teledhek janjungan*. Beberapa kategori ini sesungguhnya menunjukkan adanya fungsi dan tugasnya. Serta menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan dalam dunia *teledhek* itu. Tidak tertutup kemungkinan *teledhek* itu bisa juga naik tingkat. Pada masa kini kesenian ini masih hidup subur di daerah Sragen dan masih digemari oleh masyarakat meskipun perubahan besar telah terjadi pada kesenian ini. Beberapa adegan yang tidak layak sudah dihilangkan. Pada masa kini kesenian ini mendapat binaan dari Kantor Depdikbud setempat. Demikian gambaran sekilas mengenai kehidupan kultural di daerah Sragen.

## BAB III

# SRAGEN PADA AWAL REVOLUSI

### A. Semangat Revolusi

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan kata-kata magis yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kata-kata proklamasi dibacakan Sukarno mengandung dua maksud baik di pusat pemerintahan maupun daerah (Djawatan Penerangan, 1953: 3). Walaupun diharapkan dengan cara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, proses pemindahan kekuasaan berjalan penuh dengan pergolakan dan dalam waktu yang relatif lama. Beberapa peristiwa seperti pertempuran Kota Baru di Yogyakarta, penyerbuan Kenpeitai di Surakarta maupun peristiwa-peristiwa lain di beberapa kota memperlihatkan proses pemindahan kekuasaan berjalan penuh dengan darah (Ben Anderson, 1988: 149-194). Kenyataan ini tidak aneh karena proklamasi merupakan titik kulminasi dari seluruh rangkaian pergerakan nasional hingga pendudukan Jepang (Sartono Kartodirjo, 1994: 3). Oleh karena itu, rakyat Indonesia menganggap proklamasi sebagai karya agung seluruh bangsa Indonesia (Suhartono, 2001: 85).



Proses pemindahan kekuasaan di Sragen berjalan penuh dengan heroisme dan pergolakan-pergolakan. Bagi para pejuang, proses pemindahan kekuasaan di Sragen harus dijalankan dengan melucuti senjata Jepang dan penguasaan atas sarana dan prasarana yang diduduki oleh serdadu Jepang. Para pejuang yang menggerakkan aksi-aksi revolusioner terdiri dari beberapa kelompok, seperti bekas Heiho, anggota Peta, Kaigun Heiho, Kenpei-Ho dan beberapa kesatuan yang baru pulang tugas dari luar Sragen. Aksi-aksi para pejuang berjalan tanpa komando dengan mengibarkan bendera merah putih di berbagai instansi sejak tanggal 19 Agustus 1945 (Karkono Kamajaya, 1993: 4).

Proses pengibaran bendera dan menduduki berbagai instansi yang selama ini dijadikan kantor oleh Jepang berjalan dengan sangat cepat. Walaupun mendapat tantangan dari Jepang, penguasaan atas instansi-instansi itu belum menemui kendala yang berarti. Aksi-aksi pendudukan tersebut antara lain merebut penjara, menguasai Jawatan Kereta Api dan melakukan penyerbuan ke beberapa daerah seperti Sragen (Arsip Reksa Pustaka No. S.2747).

## **B. Munculnya Badan-Badan Perjuangan**

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Sragen baru terlaksana setelah pengambil-alihan kekuasaan dari tangan Jepang (yang selesai sekitar September 1945). Terlambatnya pembentukan BKR Sragen disebabkan tugas pengambil-alihan kekuasaan dari tangan Jepang ditangani oleh AMI Sragen.

Pembentukan BKR Sragen baru terlaksana setelah beberapa tokoh BKR dari Surakarta datang. Komandan Batalyon BKR Sragen dipegang oleh Suharto Bagus, dan pimpinan Kompinya antara lain : Panoedi, Basuki, Suparman dan Gitowidagdo (Marno, 1979: 83).

Pada tanggal 5 Oktober 1945 keluar Maklumat Pemerintah yang berisi perintah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Atas dasar Maklumat tersebut, maka BKR di Sragen diresmikan menjadi Batalyon 20, Resimen 27 Divisi IV Panembahan Senopati dalam lingkungan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia. Komandan tetap Suharto Bagus, sedangkan Panoedi, Suparman, Basuki dan Gitowidagdo tetap pula sebagai komandan Kompi I sampai IV.

Kegiatan-kegiatan Tentara Keamanan Rakyat :

1. Mengirimkan bantuan ke medan pertempuran. Pengiriman bantuan ke medan pertempuran semuanya diatur dari atasannya di Surakarta. Ketika pasukan dari Sragen diperbantukan ke medan Ambarawa, Mayor Suharto Bagus gugur dalam pertempuran pada tanggal 16 Desember 1945. Sepeninggal Mayor Suharto Bagus, yang diangkat sebagai Komanda Batalyon 20 adalah Kapten Panoedi.
2. Menjaga keamanan daerah. Dalam melaksanakan tugas ini Kesatuan Militer Sragen bekerjasama dengan Kelaskaran. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk latihan kemiliteran maupun dalam menghadapi kerusuhan-kerusakan yang sering terjadi di daerah-daerah.
3. Mendukung gerakan Anti Swapraja untuk melepaskan diri dari ikatan Kerajaan. Kegiatan ini mendukung gerakan Anti Swapraja. Inipun bekerjasama dengan laskar yang ada di daerah Sragen.

Selanjutnya dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 3 Juli 1947 tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), berakibat pula pada susunan kemiliteran di Sragen. Sebagaimana anggotanya dimasukkan ke dalam Territorial Comando (TC) dengan nama Komando Distrik Militer (KDM) untuk tingkat kabupaten dan Komando Onder Distrik Militer (KODM) untuk tingkat daerah

kecamatan, sedang sebagian anggotanya dimasukkan ke dalam Batalyon Tempur. Tugas TC yaitu mempersiapkan pertahanan Rakyat Semesta.

## **C. Kelaskaran**

Kelaskaran adalah suatu lembaga yang mempunyai kegiatan militer, tetapi bukan merupakan unit militer. Di Sragen, kelaskaran baru tumbuh pada awal oktober 1945 (Sejarah Korem 074, 1945-1950: 9).

Adapun macam-macam kelaskaran yang ada di daerah Sragen yaitu :

### **1. Laskar Rakyat**

Ketika pecah pertempuran melawan sekutu di Semarang (Mranggen) tanggal 31 Oktober 1945, Laskar Rakyat Sragen sudah mengirimkan bantuan ke Medan Mranggen tersebut. Susunan pengurus Laskar Rakyat pada waktu itu adalah (Wawancara dengan S. Mlayapranata, 2 Juli 2013) :

- Ketua : KRMT Mangunnagara
- Wakil Ketua : S. Mlayapranata
- Komandan Pertahanan : Baharudin
- Pimpinan Laskar Luas Kota : Indardjo
- Pimpinan Laskar Dalam Kota : Prayata
- Pembantu : Sumail, Sumardi, Yatmosu-  
marto, Sulardji, Subardjo dan  
Utama

Disamping pengurus di tingkat Kabupaten, dibentuk pula pengurus di tingkat Kawedanan. Pimpinan tingkat Kawedanan

kebanyakan dipegang oleh para guru dan pegawai. Selanjutnya kegiatan-kegiatan Laskar Rakyat adalah :

- a. Membantu pertempuran di medan Mranggan, baik berupa pasukan maupun makanan. S. Mlayapranata sebagai pimpinan Laskar Rakyat Sragen sangat dikenal di medan Mranggan. Dia merupakan satu-satunya komandan pertempuran dari Sragen yang berasal dari tenaga sipil.
- b. Membantu menjaga keamanan daerah serta melakukan latihan perang agar perang sewaktu-waktu mendapatkan giliran maju ke medan pertempuran sudah siap.

Dengan timbulnya kelaskaran lain, maka Laskar Rakyat yang semula merupakan satu-satunya Laskar di daerah Sragen berubah sebagai Badan Koordinator Kelaskaran.

## **2. Angkatan Muda Sukawati (AMS)**

Angkatan Muda Sukawati didirikan pada tanggal 2 Februari 1946 di Desa Penggaron (Mranggan). Tujuan didirikannya AMS yaitu ingin meneruskan cita-cita Laskar Rakyat Sragen yang terpaksa mengalami perubahan bentuk akibat lahirnya kelaskaran yang berbau politik. Dapatlah dikatakan, bahwa ide mendirikan AMS tersebut merupakan protes terhadap perubahan status Laskar Rakyat. Ide beberapa tokoh tersebut mendapatkan dukungan dari semua anggota yang berada di medan pertempuran Mranggan.

Untuk memantapkan berdirinya AMS pada akhir Februari 1946 diadakan pertemuan di Sragen. Pertemuan itu dihadiri oleh bekas anggota Laskar Rakyat yang menolak perubahan status Laskar Rakyat. Dalam pertemuan itu antara lain diputuskan (Sejarah Perjuangan Amindra, 1978: 96) :

- a. AMS merupakan organisasi sosial yang mengutamakan perjuangan bersenjata

b. Mengesahkan pengurus AMS yang terdiri dari :

- Ketua : S. Mlayapranata
- Waki Ketua : Soewanto
- Penulis : Santa
- Bendahara : Sumail
- Pembantu : Prayata, AJM Pitter, Sukirno, Wuryanto
- Pimpinan Laskar : S. Mlayapranata, Utama dan Prayata

Pada tanggal 2 Februari 1947, AMS mengadakan Kongres yang dihadiri pula oleh perwakilan dari setiap kecamatan. Keputusan yang diambil antara lain :

- a. AMS diganti namanya menjadi Amindra (Angkatan Muda Indonesia Raya). Pergantian nama tersebut menunjukkan bahwa mereka mulai meninggalkan sifat kedaerahan. Akibatnya berdiri pula cabang Amindra di Karanganyar, Solo, Wonogiri dan Yogyakarta
- b. Penegasan kembali bahwa Amindra bukan organisasi politik, meskipun pengurusnya hampir 80% lebih berasal dari anggota PNI.
- c. Menetapkan pengurus baru

Kegiatan-kegiatan Laskar AMS sebelum perang kemerdekaan kedua berupa :

- a. Perjuangan bersenjata, yaitu mengirim bantuan ke medan Mranggen. Diantara kelaskaran yang berasal dari Sragen AMS merupakan kesatuan yang paling kuat dan berpengaruh. (Wawancara dengan Panoedi, Juli 2013). Kekuatan yang menonjol dari AMS disebabkan karena hampir setiap anggota pasukan mempunyai senjata api. Lengkapnya persenjataan AMS hampir semuanya Laskar Rakyat ke tangan AMS.

- b. Membantu menjaga keamanan daerah, menyelenggarakan pendidikan di desa-desa dan membantu memberikan penerangan. Dalam usaha membantu memberikan penerangan kepada rakyat, Amindra pernah menerbitkan majalah INDRA. Tokoh-tokoh yang menangani penerbitan majalah INDRA tersebut ialah Supono, Suhari Kusumodirdjo, Wuryanto dan Prayata (Panitia Reuni Amindra, 1978 : 42).
- c. Membantu Gerakan Anti Swapraja untuk melepaskan diri dari ikatan kerajaan
- d. Mendirikan dapur umum untuk membantu rakyat pada waktu menukarkan uang Jepang ke ORI (Panitia Reuni Amindra, 1978 : 37)

### **3. Barisan Banteng Republik Indonesia**

Pada pertengahan Desember 1945, Barisan Pelopor mengganti nama menjadi Laskar Banteng atau Barisan Banteng Republik Indonesia, dan merupakan badan kelaskaran pendukung Partai Nasional Indonesia (Laskar Banteng [Bendelan], hal 14). Laskar Banteng di daerah Sragen berdiri pada bulan Februari 1946, yaitu setelah berubahnya status Laskar Rakyat. Pimpinan Laskar Banteng Kabupaten Sragen dipegang oleh Atmosudarmo. Pimpinan tingkat kecamatan antara lain Prawiro Sutjipto (Gemolong), Wirosuparto (Sidoharjo). Kegiatan Laskar Banteng terutama juga mengirim bantuan ke medan pertempuran. Disamping itu ikut pula membantu menjaga keamanan daerah dan mendukung gerakan Anti Swapraja.

### **4. Laskar Hisbullah**

Muktamar Umat Islam seluruh Indonesia tanggal 7 – 8 November 1945 antara lain memutuskan bahwa (Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 29 November 1945: 2) :

- a. GPII merupakan satu-satunya organisasi pemuda di bidang politik
- b. Hisbullah dan Sabilillah merupakan organisasi kelaskaran

Keputusan tersebut diikuti oleh pembentukan Batalyon-Batalyon Hisbullah di setiap kabupaten dan kompi di setiap kecamatan. Di Kabupaten Sragen, Laskar Hisbullah baru terbentuk sekitar Januari 1946. Berdasarkan pertimbangan geografis komunikasi yang masih sulit, Kabupaten Sragen membentuk dua batalyon, yaitu :

- a. Batalyon Hisbullah Selatan dan Timur Bengawan Solo, berkedudukan di Kota Sragen. Pimpinannya antara lain : Prastawa, Djuwadi dan Suhirman
- b. Batalyon sebelah Barat dan Utara Bengawan Solo, berkedudukan di Gemolong. Batalyon ini wilayahnya meliputi Kecamatan Andong, Kemusu dan Wanasegara dari Kabupaten Boyolali. Pimpinannya antara lain: Akhyani Hadisaputra, Supardi, Mu-hadi, Nasiran, Sajidan dan Djumali.

Sebelum Laskar Hisbullah diintegrasikan ke dalam TNI giat pula membantu menghadapi Belanda dengan jalan mengirim pasukan ke medan pertempuran. Pengirimannya dikoordinasikan oleh Resimen Hisbullah yang berkedudukan di Solo. Tugas anggota yang tidak dikirim ke medan, pada malam hari banyak yang berkumpul di surau dan masjid untuk sembahyang berjamaah. Tujuannya memohon kepada Tuhan agar teman-temannya yang berada di medan pertempuran selamat.

Kegiatan lain dari Laskar Hisbullah yaitu ikut membantu keamanan daerah dan ikut berperan dalam usaha melepaskan diri dari ikatan kerajaan.



## **5. Laskar Kyai**

Laskar Kyai di daerah Sragen berdiri pada sektar Januari 1946 dan berpusat di Gemolong. Pengurusnya antara lain Kyai N, Bolkin, Kyai Haji Moslim, Kyai Ridwan, Kyai Sujak dan Kyai Djarkasi.

Selama di medan pertempuran, para kyai tersebut selalu memberi dorongan moril kepada para pejuang dengan menyerukan takbir dan membaca rapal doa keselamatan. Disamping itu mereka banyak yang membawa jimat berupa rajah haikal maupun qur'an Istanbul (Wawancara dengan Kyai Haji M. Bolkin, Pimpinan Laskar Kyai, 23 Juli 2013). Pada masa perang kemerdekaan, Laskar Kyai tersebut banyak yang membantu dalam usaha menyusun pertahanan di daerah Gemolong di bawah pimpinan Ciptopranoto (Wawancara dengan Brigjen Pol. Purn. Tjipto Pranoto, bekas Polisi Sragen, 26 Juli 2013).

## **6. Laskar Buruh Indonesia**

Pada awal tahun 1946, di tiap-tiap perusahaan, pabrik dan perkebunan di seluruh Surakarta berdiri Laskar Buruh daerah Surakarta dan Yogyakarta tergabung dalam Deivisi VII yang terdiri dari 5 resimen (Saksi Sejarah Korem 074 Surakarta, Arsip tentang Laskar Buruh Indonesia (bendelan), hal. 2).

Di daerah Sragen, Laskar Buruh berpusat di Pabrik Gula Mojo, Pabrik Karet Tarik Ngarum, Pabrik Gula Gondang. Pimpinan Laskar Buruh Sragen yaitu Wiryosubroto. Tugas utama organisasi kelaskaran ini bertanggung jawab atas keselamatan pabrik, selain itu tugas Laskar Buruh daerah Sragen juga ikut mengirimkan bantuan ke medan perang.

## **7. Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI)**

Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 Oktober 1945 di Surabaya, juga mempunyai cabang di daerah Sragen. Salah seorang pimpinan organisasi BPRI daerah Sragen yaitu Indardjo. Tokoh ini pernah aktif dalam Laskar Rakyat. Laskar ini aktif pula mengirimkan bantuan ke medan Mranggen serta ikut menjaga keamanan daerah.

## **8. Persatuan Pejuang Wanita Sukawati (PPWS)**

Sebelum Persatuan Pejuang Wanita Sukowati lahir, di Sragen sudah ada organisasi Muslimat Aisyiyah, Barisan Buruh Wanita, GPI Putri. Pada pertengahan tahun 1946 organisasi-organisasi wanita tersebut membentuk satu wadah perjuangan yang bernama Persatuan Pejuang Wanita Sukawati (PPWS). Tokoh-tokohnya antara lain : Ny. Kasah, Ibu Indrasti, Sri Wuryan, Ibu Supini, Ibu Suwarni, Ibu Isra Indah dan Ibu Rusmini (Marno, 1979: 113).

Sebelum perang kemerdekaan kedua PPWS sudah aktif membantu menyelenggarakan dapur umum agar dapat mengirimkan makanan ke medan pertempuran Mranggen. Kegiatan ini berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Kedua.

Markas besar PPWS semula di bagian belakang gedung KND, kemudian pindah ke rumah bapak Mangun Widarso (sekarang untuk Gedung Pupuk). PPWS aktif pula membantu memberikan penerangan keliling ke daerah-daerah. untuk melaksanakan kegiatan ini, PPWS mendapatkan pinjaman mobil dari kepolisian maupun penjara.

Selanjutnya usaha untuk mempersatukan badan-badan kelaskaran dengan tentara sudah diusahakan sejak bulan Mei 1946, tetapi belum berhasil karena pada waktu itu badan-badan perjuangan mengajukan keberatan.

Atas pertimbangan yang matang dan usul dari beberapa tokoh militer, pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden menetapkan (Dinas Sejarah Militer Korem VII Diponegoro, hal 61):

1. Dalam waktu sesingkat-singkatnya agar mempersatukan tentara Republik Indonesia dengan laskar-laskar yang ada.
2. Menyerahkan pelaksanaannya kepada panitia yang terdiri dari :  
Ketua : Presiden  
Wakil Ketua I : Wakil Presiden  
Wakil Ketua II : Menteri Pertahanan

Panitia ini beranggotakan 16 orang dan terdiri dari Kementrian Pertahanan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan badan-badan kelaskaran.

Pada tanggal 3 Juni 1947 presiden mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Berita Negara No. 27 tahun 1947 tentang pengesahan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan gabungan antara Tenra Republik Indonesia (TRI) dengan Badan-badan kelaskaran.

Dalam proses penyatuan itu laskar-laskar dari daerah Sragen tergabung dalam :

1. BPR Sragen masuk dalam Resimen 3
2. Pesindo dan Laskar Buruh serta Hisbullah masuk dalam Resimen 4
3. Barisan Banteng Indonesia tergabung dalam Resimen 2.
4. Laskar Amindra bergabung dengan Laskar Rakyat dari Karang-anyar dan Wonogiri menjadi satu Batalyon tersendiri.

Resimen-resimen TNI dari kelaskaran di daerah Surakarta tergabung dalam Brgade XXIV di bawah pimpinan Letkol. Iskandar dari Laskar Rakyat. Diantara anggota-anggota kelaskaran yang tidak tertampung ke TNI kembali ke masyarakat dan pekerjaan semula.

Tetapi karena sifat patriotisme tetap terpelihara, sehingga pada masa Perang Kemerdekaan Kedua mereka tetap membantu Perang Gerilya serta tergabung dalam pertahanan Pagar desa.

Laskar Amindra yang merupakan laskar khusus di daerah Sragen hampir seperempat dari seluruh anggotanya tertampung ke dalam TNI. Hal ini disebabkan diantara kelaskaran di daerah Sragen, Amindra yang paling banyak persenjataannya. Padahal jumlah anggota kelaskaran yang dapat masuk ke TNI berdasarkan jumlah senjata api yang dimiliki oleh kelaskaran tersebut. (setiap pucuk senjata api untuk tiga anggota).

Laskar Amindra sudah tidak ada setelah menggabungkan diri ke dalam TNI, namun Amindra sebagai organisasi kemasyarakatan tetap hidup dan mampu memberikan kegiatan-kegiatan kepada anggota-anggotanya. Oleh sebab itu pada masa perang kemerdekaan kedua Amindra tetap menampakkan dirinya dalam membantu pelaksanaan perang gerilya. Dengan adanya ReRa (Reorganisasi dan Rasionalisasi) maka pasukan bersenjata yang ada di Indonesia hanya satu yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

#### **D. Pembentukan Komite Nasional Daerah**

Sekitar Minggu 3 September 1945, Komite Nasional Daerah (KND) Sragen terbentuk. Susunan KND Sragen yaitu :

- Ketua : KRMT Mangunagara  
Wakil Ketua : Soehari Kusumodiprodo (Naskah Monumen Kabupaten Sragen)  
Anggota : 25 orang terdiri dari :  
- Tokoh-tokoh Angkatan Muda, antara lain : S. Mlayapranata, Indardjo, Tjiptopranoto, Soemardi Yatmosumarto

- Kepala-kepala Jawatan
- Perwakilan dari setiap kecamatan
- Tokoh-tokoh perwakilan dari kecamatan kebanyakan guru

Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1945, KND segera membentuk Badan Eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari di bawah pimpinan bupati (The Liang Gie, 1968: 55-56). Susunan Badan Eksekutif masa itu adalah (Marno, 1979: 181):

Ketua : KRMT Mangunagara

Wakil Ketua : Atmosudarmo, Soehari Kusumodiprodjo dan Kasa

Pembentukan KND maupun Badan Eksekutif Kabupaten Sragen dapat berjalan dengan lancar, karena Bupati Darmonegoro tidak menghalang-halangi terbentuknya KND dan Badan Eksekutif tersebut

Sementara itu sejak bulan April 1946 gerakan dari Panitia Anti Swapraja (PAS) giat mencari dukungan ke daerah-daerah kabupaten se-wilayah Surakarta. Di Sragen pengaruh PAS mula-mula diterima oleh partai-partai politik, terutama PNI dan Masyumi. Baru kemudian masuk ke kalangan badan-badan perjuangan (Marno, 1979). Di antara Badan-badan perjuangan (kelaskaran) daerah Sragen yang paling berpengaruh dalam usaha mendukung PAS adalah (AMS). (Wawancara dengan Panoedi, 16 Juli 2013: 183). Hal ini disebabkan sebagian besar tokoh-tokoh AMS adalah anggota + NU dan Murba. Padahal NU dan Murba merupakan golongan yang gigih dalam gerakan anti Swapraja di Surakarta.

Dalam usaha mendukung PAS hampir semua kelaskaran daerah Sragen tidak ada perbedaan pendapat. Satu hal yang menimbulkan masalah adalah kemauan Hisbullah Gemolong yang menghendaki Sragen sebelah utara Bengawan berdiri sendiri sebagai kabupaten.

Untuk menghindari konflik antara kelaskaran yang ada, Polisi Sragen mengadakan penahanan terhadap beberapa tokoh Hisbullah Gemolong. Mereka baru dilepaskan setelah menyadari bahwa idenya memperlemah golongan Anti Swapraja (Wawancara dengan Panoedi, 16 Juli 2013: 188).

Tahap-tahap pergolakan melepaskan diri dari ikatan Kerajaan (Swapraja) di Sragen sebagai berikut :

1. Tahap pertama, PAS berusaha menyebarkan ide-idenya ke kalangan lurah desa. Untuk itu beberapa tokoh partai datang ke kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kawedanan kota.
2. Tahap kedua mengadakan rapat-rapat secara terbuka. Rapat tersebut diadakan sampai ke kecamatan di sekitar kota. Daerah-daerah di luar kota, pembinaannya diserahkan kepada badan-badan perjuangan setempat.
3. Tahap ketiga membawa masalah keinginan lepas dari Swapraja ke KNI Daerah.

Keputusan KNI Daerah adalah:

- a. Menyampaikan keinginan lepas dari ikatan Swapraja kepada Bupati Darmonagoro. Bila Darmonagoro bersedia, tetap diminta menjadi Bupati Sragen.
- b. Mengadakan pilihan lurah desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Pilihan lurah tersebut secara serentak biasa disebut daulat.

Bupati Darmonagoro tidak bersedia memenuhi permintaan KNI Daerah dengan alasan (Marno, 1979: 188):

- a. Sebagai abdi dalem beliau harus tetap setia kepada raja
- b. Sikap melepaskan diri dari ikatan kerajaan bertentangan dengan keputusan pemerintah kerajaan

Maka sebagai jalan tengah, Bupati Darmonagoro lebih baik menyingkir ke Solo. Untuk mengisi kekosongan tersebut dibentuklah Dewan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

Ketua: Kartowadono, dengan anggota Kasah, Soehari Kusumodirdjo dan Indardjo

Untuk menyatakan lepas dari ikatan Swapraja, KNI daerah mengadakan rapat di halaman bekas gedung Conrroleur (kabupaten sekarang). Rapat tersebut dihadiri oleh massa rakyat, badan-badan perjuangan dan lurah desa di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dan Kawedanan Kota.

Pernyataan sikap rakyat Sragen untuk melepaskan diri dari ikatan Swapraja dibacakan oleh Soehari Kusumodirdjo (wakil ketua KNI daerah Sragen). Pernyataan keluar dari ikatan Swapraja terjadi pada tanggal 26 April 1946. Alasan penetapan tanggal 26 April 1946 didukung oleh data-data sebagai berikut :

- 1) Kabupaten-kabupaten di seluruh Surakarta mulai menyatakan lepas dari ikatan Swapraja sesudah tanggal 4 April 1946. (Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta).
- 2) Kabupaten Sragen menyatakan lepas dari Swapraja sebelum Kabupaten Wonogiri. Padahal Wonogiri lepas dari kerajaan tanggal 22 Mei 1946. Dengan demikian Kabupaten Sragen lepas dari ikatan Swapraja (kerajaan) sebelum 22 Mei 1946.
- 3) Berdasarkan keterangan almarhum Soeyono, Sragen melepaskan diri dari ikatan kerajaan tanggal 26 bulannya lupa tahun 1946.
- 4) Menurut almarhum Soeyono, pada masa itu setiap tanggal 22 ada Konferensi Lurah-lurah se-Kawedanan



Kota. Konferensi tersebut diundur 4 (empat) hari agar semua lurah dapat menghadiri rapat pelepasan diri dari kerajaan yang diselenggarakan di halaman Kantor Daerah (Marno, 1979: 190). Jadi dengan demikian tanggal pelepasan diri dari ikatan kerajaan adalah tanggal 22 mundur 4 hari, yaitu tanggal 26.

Dari data-data tersebut di atas nampak bahwa pernyataan Sragen melepaskan diri dari ikatan kerajaan terjadi pada tanggal sesudah 26 April 1946. Adanya gerakan PAS yang didukung oleh semua kabupaten dan lurah desa, akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan peraturan No 16/SD tahun 1946. Isi peraturan tersebut adalah pengakuan Surakarta sebagai Karesidenan Sementara. Selanjutnya yang diangkat sebagai Bupati dan Patih di Kabupaten Sragen ialah KRMT Mangunnagoro dan Prohohardjojo. Dengan demikian masa bakti Dewan Pemerintah Daerah berakhir.

Setelah bupati dengan Patih Kabupaten Sragen dilantik oleh Residen Mr. Iskak Tjokrohadisurjo, segera diikuti pembentukan Dewan Rakyat Daerah. jumlah anggota DPRD ditetapkan sebanyak 20 orang. Kasah (dari Masyumi) terpilih sebagai ketua. Anggota DPRD Sragen pada waktu itu terdiri dari wakil-wakil :

- Partai Masyumi, mendapatkan wakil terbanyak. Anggotanya antara lain Djuwardi, Pratawa, Prawirosutjipto
- PNI, anggotanya antara lain Sahari, Prayata, Karsono, Danudiningrat, Sumardi Yatmosumarto
- Partai Buruh, Ny. Sugiyarti, Soeyono
- Partai Kristen : Mudiadi
- Muhammadiyah : Husein Slamet
- PKI : Zainal Abidin
- Dan organisasi-organisasi masa yang lain

Jumlah wakil dari masing-masing organisasi berdasarkan banyaknya cabang organisasi tersebut di tingkat kecamatan dan bukan atas dasar jumlah suara (Marno, 1979: 195)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 8/1946, maka kecuali DPRD dibentuk pula badan eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari bersama bupati. Badan eksekutif Sragen pada waktu itu adalah: Ketua: Bupati KRMT Mangunnagoro, Wakil Ketua: Kasah, Anggota: Soeyono Prodjokartijoso, Djuwadi, Sumadiyatmosumarto.

Berdasarkan Instruksi MBKD No. 3/BYD/IN/1949 pemerintahan militer dikembalikan kepada pemerintahan Sipil. Mengingat selama terjadi Agresi Militer II banyak anggota DPRD maupun Badan Eksekutif yang pindah keluar daerah.

## **E. Kriminalitas pada Awal Revolusi**

Pada awal revolusi, kondisi polisi berada dalam situasi yang dilematis dan mengkhawatirkan. Mereka tidak hanya kehilangan kemampuan untuk menegakkan dan menjaga keamanan, tetapi seringkali menerima aksi-aksi kekerasan dari massa atau laskar-laskar rakyat. Polisi dianggap sebagai alat kekuasaan yang menjamin berlangsungnya pemerintahan dari regim sebelumnya baik di bawah Belanda maupun pendudukan Jepang. Pada masa Jepang, polisi banyak berasal dari pangreh praja maupun pegawai kraton yang kerap kali melakukan penekanan terhadap orang-orang pribumi. Oleh karena itu; tidak aneh apabila polisi banyak dimusuhi, sebagaimana terlihat dalam penyerbuan laskar-laskar rakyat terhadap kantor Kepolisian Sragen.

Struktur kepolisian disusun kembali setelah terbentuknya kabinet baru pada tanggal 4 September 1945 yang menempatkan kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri (Nugroho Notosusanto,

1975: 48). Secara umum, sebagian besar anggota polisi berasal dari Cianbu (Kepolisian Jepang) ditambah dengan beberapa simpatisan laskar rakyat maupun beberapa anggota organisasi semi-militer yang muncul pada masa Jepang, seperti BPI-SMT (Barisan Polisi Istimewa - Sekolah Menengah Tinggi) TP (Ita Setiawati, : 38).

Keanggotaan kepolisian yang berasal dari berbagai macam unsur tersebut menyulitkan kepolisian menyelesaikan permasalahan kekerasan dan kriminalitas yang muncul di masyarakat. Terlebih lagi polisi tidak diberi tugas-tugas yang menjadi wewenangnya seperti urusan keamanan yang pada waktu itu lebih dipercayakan kepada BKR. Keterlibatan BKR dalam urusan keamanan merupakan awal campur tangan yang begitu berlebihan dari badan-badan perjuangan terhadap urusan-urusan yang sebenarnya hanya kepolisian yang punya wewenang (Ben Anderson: 261-297). Kepedulian para laskar rakyat atau badan perjuangan didasarkan pada pemahaman mereka atas nilai-nilai umum dari gerakan revolusioner yang berupa kemerdekaan, keadilan sosial dan hak-hak manusia dasar lainnya (Sartono Kartodirdjo, 1981:8). Mereka merasa punya tanggung jawab atas keamanan dan pelanggaran-pelanggaran moral yang ada di masyarakat. Oleh karena itu tidak aneh apabila laskar-laskar rakyat merasa berhak memberantas korupsi ataupun menutup tempat-tempat perjudian dan pelacurari (Arsip Reksa Pustaka No. 339). Aksi-aksi pemberantasan kejahatan yang dilakukan secara sepihak oleh badan-badan perjuangan sering terjadi di Sragen.

Keterlibatan badan-badan perjuangan mengenai masalah keamanan dan upaya pemberantasan terhadap sesuatu yang dianggap salah merupakan bagian dari heroisme yang mereka pahami selama masa revolusi. Heroisme bagi mereka tidak hanya dengan menunjukkan keberanian terhadap musuh, tetapi memperlihatkan pula kekuatan dan keunggulan di antara badan-badan perjuangan yang lain. Dalam hal ini pemimpin setiap badan perjuangan mempunyai

peranan yang besar dalam pembentukan watak dan ideologi anggota-anggotanya. Seorang pemimpin badan perjuangan harus mampu menjaga moral anak buahnya dan menggembleng solidaritas kelompok dalam ikatan hubungan informal. Hubungan semi-komunal antara para anggota dan antar anggota dengan pemimpinnya mempunyai fungsi sangat strategis untuk membentuk komunikasi yang melembagakan, ikatan sosial dan loyalitas politik dalam organisasi. Kedekatan hubungan antara anggota dengan pemimpinnya bagaikan hubungan anak dengan bapak (Ken Po, 30 Desember 1949).

Solidaritas dan fanatisme kelompok yang begitu kuat seringkali menimbulkan benturan kepentingan dengan kelompok-kelompok lain yang juga mempunyai solidaritas kuat. Benturan tersebut berkembang menjadi konflik dan pertentangan apabila persaingan di antara badan-badan perjuangan didasarkan pada latar belakang ideologi yang berbeda atau tujuan politik yang saling bertentangan. Dalam hal ini, heroisme dipahami dengan bentuk-bentuk pembelaan atas kelompoknya dan pameran kekuatan terhadap kelompok-kelompok atau badan-badan perjuangan yang lain. Persaingan di antara badan-badan perjuangan diperlihatkan dalam atribut-atribut seragam, persenjataan, bahkan sampai pada penculikan dan pembunuhan. Kepemilikan persenjataan seperti karabijn maupun miltraliur merupakan bagian dari kebanggaan kelompok. Senjata-senjata tersebut diperoleh dengan cara yang sangat susah, seperti didapat dari melucuti senjata Jepang, merebut senjata musuh maupun memperdagangkan candu (Geheim, No. 5518). Senjata yang dikuasai badan-badan perjuangan tidak akan pernah dilepaskannya walaupun ada perintah untuk mengumpulkannya. Penentangan terhadap perintah pengumpulan senjata pernah terjadi di Sragen. Hal itu terlihat pada kontak senjata antara Batalyon Panasas (TLRI Div II Jadau) dengan pasukan Sastro Lawu dan Karto Jenggot tidak mau menyerahkan senjatanya pada Divisi IV Solo. Dalam pertempuran itu Karto Jenggot

dan Sastro Lawu beserta beberapa anak buahnya berhasil lolos dan melakukan aksi-aksi kerusuhan dan perampokan di Tawangmangu dan Gemolong (ANRI No. 865).

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota badan-badan perjuangan sangat menyulitkan polisi dalam menyelesaikannya karena terbentur pada banyaknya kepentingan yang berada di belakangnya. Padahal tugas kepolisian sudah dibantu dengan terbentuknya polisi tentara di seluruh daerah republik pada tanggal 8 Desember 1945 (Arsip Reksa Pustaka No. S.668). Selain itu, tugas-tugas kepolisian sudah diperlancar dengan pembentukan organisasi polisi yang otonom. Pada tanggal 26 Juni 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan No. 11/SD tahun 1946 yang menempatkan Kepolisian Negara keluar dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi lembaga tersendiri di bawah perintah langsung perdana menteri (Berita Republik Indonesia No. 18-19 Tahun II Agustus 1946, hal. 215). Berdasarkan penetapan ini maka kedudukan kepolisian sejajar dengan kementerian-kementerian lainnya yang berada di dalam kabinet.

Kesulitan-kesulitan kepolisian menangani kriminalitas yang dilakukan oleh anggota badan-badan perjuangan karena organisasi ketentaraan ini mempunyai senjata yang kadang-kadang lebih baik daripada yang dipunyai polisi. Selain itu, sebagian besar badan perjuangan terinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang tidak jarang merupakan pengendali pemerintahan atau penentangannya. Kepolisian menghadapi kendala pula pada penanganan masalah-masalah perampokan berupa *penggrayakan* atau *penggedoran*. Para pelaku *grayak* atau *gedor* seringkali dilindungi oleh masyarakat karena memberi “rasa” aman untuk daerah yang ditempatinya. Bahkan banyak dari para pimpinan *gedor* dianggap sebagai pahlawan karena tindakan merampoknya merupakan refleksi protes masyarakat atas ketertindasan yang dialami sebelumnya. Korban *penggedoran* biasanya orang-orang kaya, pejabat, mandor perkebunan yang

kesemuanya dianggap sebagai kaki tangan penjajah pada masa kolonial Belanda. Tidak jarang para *gedor* membagi-bagikan hasil kejahatannya kepada rakyat.

Melihat bentuk-bentuk kriminalitas yang muncul selama masa revolusi maka sangat sulit membedakan antara penjahat dengan aparat negara. Sangat tipis sekali perbedaan antara bajingan dengan pejuang. Hal itu menunjukkan bergesernya nilai-nilai sosial masyarakat terhadap kriminalitas. Seringkali nilai-nilai moral dan hukum diabaikan dengan alasan-alasan perjuangan-perjuangan. Banyak dari para tahanan yang seharusnya belum waktunya bebas dikeluarkan dengan alasan diikutkan untuk berjuang. Para tahanan yang dihukum seumur hidup di Sragen dibebaskan setelah menandatangani mosi yang dikirimkan kepada Sukarno untuk berjuang sampai mati membela republik (Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 1945). Pembebasan tahanan dilakukan pula oleh penjara Sragen dengan mengeluarkan 1 tahanan untuk berjuang di Surabaya dengan koordinasi BPRI pimpinan Marjuki (Arsip Rekse Pustaka No. S.339). Beberapa tahanan yang dibebaskan sebelum waktunya tersebut banyak yang bergabung dengan badan-badan perjuangan. Bahkan golongan yang dianggap “sampah masyarakat” seperti pelacur, pencopet, pencuri, dan lain-lain ikut pula bergabung dengan badan-badan perjuangan. Beberapa badan perjuangan di Sragen yang terdiri dari golongan kriminil ini antara lain kelompok Barisan Macan Hitam Indonesia (Sutopo Juwono, dkk, 1970).

Bergabungnya beberapa pelaku kriminil dan tahanan tersebut didasarkan pada keinginan badan-badan perjuangan di seluruh Jawa untuk melibatkan golongan yang dianggap “Sampah masyarakat” untuk ikut berjuang membela republik. Pertemuan yang membicarakan masalah ini dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 1945. Beberapa badan perjuangan yang terlibat dalam pertemuan ini melakukan koordinasi mengenai perekrutan dan pelatihan

para pelaku kriminal untuk berjuang di medan perang. Beberapa pengajar yang dipilih untuk mendidik dan melatih para kriminal itu adalah Ki Hajar Dewantara dan Ki Mangunsarkoro menangani bidang pendidikan rohani, Sutopo Yuwono dan Darjanto menangani latihan kemiliteran (Sutopo Juwono, dkk, 1970). Pertemuan ini merekomendasikan pula pembebasan tahanan untuk diikutsertakan dalam perjuangan di medan-medan pertempuran di seluruh Jawa melalui seruan surat permintaan dan lobi-lobi lisan. Di bawah ini akan diperlihatkan beberapa tahanan yang bersedia direkrut untuk ikut berjuang pada pertengahan tahun 1946 (Kedaulatan Rakyat, 24 Agustus 1946).

### Tahanan yang Direkrut untuk Berjuang Agustus 1946

Rumah Penjara	Jumlah Tahanan (orang)
1. Surakarta	56 Orang
2. Boyolali	4 Orang
3. Klaten	3 Orang
4. Sragen	40 Orang
Jumlah	103 Orang

Sumber : *Kedaulatan Rakyat*, 24 Agustus 1946.

Berdasarkan data di atas, jumlah tahanan dari Sragen terbanyak kedua setelah Surakarta. Perekrutan para tahanan dan beberapa pelaku kriminal lainnya memperlihatkan adanya dualisme nilai yang terjadi di tengah masyarakat. Di satu sisi para pelaku kriminalitas diterima di tengah masyarakat dalam perekrutan-perekrutan untuk perjuangan, di sisi lain mereka dimusuhi bahkan tidak jarang dibunuh. Para polisi pun menerima perlakuan dualisme dari masyarakat. Di satu pihak polisi dibenci karena dianggap berhubungan dengan

penguasa sebelumnya, di pihak lain polisi dibutuhkan untuk menjaga keamanan masyarakat.

Beberapa pergeseran nilai yang tidak jelas di tengah masyarakat ini menjadikan tugas polisi lebih berat. Apalagi harus berhadapan dengan pelaku kriminalitas dari anggota badan-badan perjuangan yang tidak disiplin. Akan tetapi, bagaimanapun beratnya kasus-kasus yang dihadapi oleh polisi, mereka harus berupaya untuk menyelesaikannya dengan segala keterbatasannya.



## BAB IV

# SRAGEN PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN KEDUA

### **A. Perjuangan Melawan Pemberontakan Madiun 1948**

Kesatuan-kesatuan militer yang ada di daerah Sragen menjelang terjadinya peristiwa PKI Madiun yaitu: Batalyon Siliwangi di bawah pimpinan Mayor Sentot; Batalyon dari Panembahan Senopati di bawah pimpinan Kapten Mulyatno; Kompi dari Brigade XXIV di bawah pimpinan Letnan Utama. Kompi ini hampir sebagian besar anggotanya berasal dari Laskar Amindra. Semua komandan kompi-nya adalah Kapten Drajad yang pro Front Demokrasi Rakyat (FDR). Karena Kapten Drajad gagal di dalam usaha mempengaruhi anak buahnya, untuk bergabung dengan kesatuan militer bekas Laskar Rakyat di daerah Wonogiri, maka dia meninggalkan Sragen.

Selanjutnya diantara kesatuan-kesatuan militer di daerah Sragen tersebut di atas yang semula dicurigai mendukung FDR adalah Batalyon dari Panembahan Senopati dan Kompi dari Brigade XXIV. Setelah Presiden Sukarno menyatakan Coup Madiun sebagai pemberontakan, Letnan Utama yang mendapatkan dukungan penuh dari anak buahnya segera menghimpun kekuatan massa untuk menghadapi PKI. Langkah yang dilakukan oleh Letnan Utama itu

menghilangkan kecurigaan Batalyon Siliwangi terhadap Kompi Brigade XXIV (Marno, 1979: 10). Dengan demikian perhatian kesatuan militer daerah Sragen yang pro pemerintah tinggal kepada Batalyon dari Devisi Senopati yang terang-terangan pro-Madiun.

Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, kesatuan militer, baik kompi dari Brigade XXIV maupun Batalyon Siliwangi dan kepolisian mampu menghimpun masyarakat untuk menghadapi perembesan pemberontakan Madiun. Batalyon dari Panembahan Senopati yang merasa tidak mempunyai kekuatan berusaha meningkatkan Sragen.

Di daerah Kecamatan Sidoharjo terjadi tembak menembak antara Batalyon Senopati dengan Batalyon Siliwangi. Baru setelah Batalyon Senopati melewati Bengawan Solo dan terus lari ke utara, pengejaran dari kesatuan Militer Pemerintahan dihentikan (Marno, 1979: 20). Oleh karena itu daerah Sragen dapat menghindarkan diri dari peristiwa Madiun tersebut.

Pada tanggal 27 Desember 1948, Belanda sudah masuk ke Sragen. Kesatuan-kesatuan tempur yang ada di kota Sragen mengadakan perlawanan sambil bergerak mundur untuk memberi kesempatan masyarakat dan aparatur pemerintahan sipil mundur ke luar kota. Gerak mundur di atas sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh Pimpinan TNI tanggal 9 November 1948 (Arsip Reksa Pustaka, No. S.507).

Langkah pertama sesudah kota Sragen diduduki oleh Belanda, Pemerintah republik Indonesia membentuk Pemerintahan Militer Kabupaten (PMKB) dan Komando Gerilya. Pemerintah Militer Kabupaten Sragen dipimpin oleh Mayor Hartadi berkedudukan di desa Musuk, Kecamatan Sambireja. Dalam pembentukan Komando Gerilya, daerah Sragen dijadikan Sub Wehkreise (SWK) 105 dalam wilayah daerah Sragen perlawanan Surakarta (Wehkreise) I. SWK 105 Sragen dibagi menjadi :

1. Rayon (Chief Organisation Gerilya/COG) I di bawah pimpinan Letnan Utama. Wilayahnya sebelah utara jalan raya.
2. Rayon (COG) II, di bawah pimpinan Kapten Kani wilayahnya sebelah selatan jalan raya (Arsip Reksa Pustaka, No. S.507).

Disamping SWK 105, selama perang kemerdekaan kedua di daerah Sragen terdapat pula kesatuan-kesatuan:

1. Batalyon 16 Resimen Divisi IV. Batalyon Pulanggeni di bawah pimpinan Mayor Suharto. Batalyon ini sebenarnya berkedudukan di Kerjo (Karanganyar), tetapi kompi-kompinya ada yang berada di daerah Sragen. Batalyon ini di daerah Sragen selama tiga bulan.
2. Batalyon Basuno, yang semula berkedudukan di Purwodadi, kemudian bergerak ke daerah Sragen dan menempati daerah Sambirejo
3. Pasukan Guntur Daryono, pasukan ini hanya terdiri dari satu Peleton yang anggotanya campuran AD dan AURI. Kedudukannya di daerah Gemolong.
4. Batalyon Sudarmono (Condrobirowo) Batalyon ini berkedudukan di daerah Mondokan, Sukadana, Tanon dan Tangen
5. Pasukan Tentara Pelajar (TP) dipimpin oleh Letnan Sanusi, berkedudukan di daerah Kalijambe
6. Kepolisian Sragen di bawah pimpinan Tjiptopranoto. Kedudukannya di Kelurahan Gebang (Masaran)

Untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, kesatuan-kesatuan tempur di atas selalu bekerja sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Dalam usaha menggalang kekuatan rakyat, Lurah memegang peranan sangat penting. Kepada lurah diperbantukan kader-kader territorial yang disebut Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa). Pembentukan Pager Desa di daerah I Sragen dapat

berjalan dengan lancar. Banyak bekas anggota kelaskaran yang aktif dalam Pager Desa. Pembentukan Pager Desa di atas berdasarkan instruksi MBKD (Markas Besar Komando Djawa) No. 11/MBKD/49 tertanggal 25 Januari 1949. Pemuda yang tergabung dalam Pager Desa maupun masyarakat secara umum banyak membantu tugas-tugas militer dalam bidang:

1. Perhubungan. Untuk menyampaikan berita dari satu tempat ke tempat lain biasanya secara beranting.
2. Mengirim makan dari dapur umum ke markas-markas yang tempatnya bertebaran.
3. Membantu mencukupi kebutuhan, terutama makan.
4. Membantu mengangkut peralatan pada waktu pasukan atau pun pusat Pemerintah Militer Kabupaten (PMKB) Sragen pindah tempat.

Semua bantuan rakyat tersebut diatur oleh lurah atas bimbingan Komando Onder Distrik Militer (KODM) (Marno, 1979: 11-25)

## **B. Kriminalitas di Pedesaan Sragen**

Pada masa revolusi, para jagoan dihadapkan pada dua pilihan yaitu menjadi seorang kriminal atau seorang revolusioner. Dunia kriminal merupakan dunia hitam yang penuh tipu daya, sedangkan dunia revolusioner merupakan dunia “lurus” yang penuh dengan keagungan patriotisme dan kepahlawanan. Akan tetapi, pada kenyataannya para jagoan yang menjadi bandit mencampuradukkan dua “dunia” yang bertolak belakang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Seorang penjahat sejati menganggap revolusi sebagai kesempatan baik untuk melakukan kejahatan. Seringkali, pemimpin bandit mencari legitimasi untuk revolusi dengan cara mengadopsi status formal seorang penguasa (E.J. Hobsbawn, 1972: 104-105).

Dalam revolusi Indonesia, banyak dijumpai para bandit yang memanfaatkan jalannya revolusi. Apabila pada suatu saat timbul kegentingan dan alat-alat pemerintah menjadi lemah serta tidak berdaya menguasai situasi, maka unsur-unsur kriminal “berperan” untuk kepentingan pribadinya. Mereka membonceng gerakan revolusioner atau badan-badan perjuangan yang menjadikan teror dan kekerasan sebagai alat untuk menjalankan kekuasaannya (PRISMA, Agustus 1981: 9). Sebagaimana badan-badan perjuangan, unsur-unsur kriminal membentuk dirinya dalam suatu kelompok yang terorganisasikan.

Pergolakan revolusi sosial di Sragen dimanfaatkan oleh para bandit untuk *menggedor*, menjarah dan mencuri harta milik pamong praja, orang-orang kaya dan orang-orang Cina. Oleh karena itu, *penggedoran*, penjarahan dan pencurian yang dilakukan oleh para bandit merupakan bagian dari proses sosial atas eksploitasi yang pernah mereka alami.

Berakhirnya tragedi Madiun yang menyebabkan kekalahan bagi kaum komunis mempunyai dampak yang besar pada keamanan di pedesaan Sragen. Pengejaran-engejaran yang dilakukan pemerintah dan pembelaan diri yang dilakukan oleh pemberontak meninggalkan jejak-jejak kekerasan maupun kriminalitas di Sragen. Walaupun swapraja Surakarta telah dibekukan, para pemberontak tetap memanfaatkan isu-isu tentang swapraja untuk “mempertahankan diri”. Isu-isu swapraja kemudian menjadi semakin besar setelah Sragen diduduki Belanda pada 27 Desember 1948 (Geheim, No. 5690). Agresi Militer Belanda di Sragen menghidupkan kembali polemik atau pro-kontra mengenai swapraja (The Liang Gie, 1968: 91). Hampir sebagian besar badan perjuangan dan organisasi politik melihat bahwa terdapat “hubungan yang saling menguntungkan” antara pihak kraton dengan Belanda. Pada satu sisi kraton dapat menghidupkan kembali kekuasaan, swaprajanya, di sisi lain Belanda

mendapatkan penyambutan, kemudahan dan tempat-tempat untuk tinggal.

Kecurigaan badan-badan perjuangan dan organisasi-organisasi militer terhadap kraton sebenarnya telah muncul sebelum Agresi Militer Belanda II di Sragen. Selama bulan Agustus 1948, muncul laporan-laporan yang mengatakan bahwa Susuhunan dan Mangkunegara sering keluar pada pukul 12.00 malam berkeliling kota dengan 4 buah motor. Demonstrasi dari Sunan dan Mangkunegara ini dianggap sebagai tanda-tanda kesiapan kraton menyambut kedatangan Belanda (ANRI, No. 1061). Selain itu, muncul pula isu yang menyebutkan bahwa pada bulan Agustus 1948 telah berdiri suatu panitia penyambutan (*Comittee van Onvangts*) kedatangan pasukan Belanda yang beranggotakan kaum bangsawan, orang-orang Tionghoa serta didukung oleh perkumpulan Narpo Wandowo dan perkumpulan milik orang Cina bernama “Tengkorak Hidoep (ANRI, No. 1061).

Sikap pihak kraton yang dianggap pro-Belanda ini menimbulkan kemarahan dan kebencian dari organisasi-organisasi politik dan badan-badan perjuangan seperti PNI, Pesindo, Barisan Banteng BPRI, dan lain-lain. Aksi-aksi kekerasan terhadap kraton tidak saja bertujuan melenyapkan untuk selamanya swapraja tetapi sebagai upaya penghukuman terhadap “mata-mata musuh”. Aksi-aksi kekerasan ini semakin mendapat legitimasi dari Sultan Yogyakarta sebagai Menteri Pertahanan dalam salah satu perintahnya kepada para gerilyawan agar menggulung lurah-lurah NICA (Suhartono, 2001: 7). Oleh karena itu, tidak aneh apabila di pedesaan Sragen sering terjadi aksi-aksi kejahatan dan kekerasan terhadap kepala-kepala desa dengan perangkat-perangkatnya, pegawai-pegawai kraton, orang-orang kaya dan orang-orang Cina yang dianggap pro-Belanda. Aksi-aksi kekerasan yang kadang-kadang diboncengi oleh aksi-aksi kejahatan ini dilakukan pada saat bergerilya di desa-desa.



Tindakan penculikan yang terjadi pada bulan September 1948 merupakan bentuk culik-menculik di antara kekuatan-kekuatan politik (ANRI, No. 1763). Pada bulan Oktober 1948, aksi-aksi penculikan yang terjadi di Sragen tidak bisa dilepaskan dari kegagalan FDR dalam peristiwa Madiun. Korban penculikan yang berjumlah hampir 100 orang tersebut ditawan oleh beberapa pasukan yang bersimpati pada perjuangan FDR, seperti TLRI Yadau dan Suhodo (ANRI, No. 1098). Para korban penculikan yang berjumlah besar tersebut ditemukan di pedesaan Sragen termasuk Gemolong, Sambirejo dan Sukadana.

Tindak kejahatan penculikan yang dialami oleh pamongpraja tidak hanya berlangsung pada tahun 1948 saja, tetapi terjadi pula ada aksi-aksi penculikan di tahun 1949 (Arsip Reksa Pustaka No. S.507), hampir separuh korban penculikan di pedesaan Sragen adalah pamongpraja. Para pamong praja yang banyak diculik adalah kepala desa, carik, kebyan, kurir dan polisi pamong praja (Arsip Reksa Pustaka No. S.508). Mereka menjadi sasaran penculikan karena pengalaman kolektif masyarakat yang menganggap para pamong praja sebagai kaki tangan pemerintah kolonial. Terlebih lagi, penyerahan-penyERAHAN wajib yang diorganisasikan langsung oleh para pamong praja pada jaman Jepang sangat menyengsarakan rakyat (Arsip Reksa Pustaka No. S.1578). Apabila pada jaman kolonial Belanda, hubungan para pamongpraja seperti kepala-kepala desa dengan rakyatnya masih bersifat pemberi-penerima, maka pada jaman Jepang kedudukan kepala desa dengan pembantunya tidak ubahnya sebagai penindas rakyat (Aiko Kurasawa Shiraiishi, 1993: 84). Rakyat secara langsung melihat “kekejaman” para kepala desa yang memaksa mereka menyerahkan padi, gaplek atau kacang. Selain itu, kepala-kepala desa di pedesaan Sragen sering melakukan korupsi dengan memanipulasi hasil pertanian atau pembayaran

pajak, sehingga sangat menyengsarakan rakyat (Arsip Reksa Pustaka No. S.1801).

Selain para pamongpraja, orang-orang yang dianggap pernah berbuat tidak adil terhadap rakyat adalah para pegawai pemerintahan. Oleh karena itu, mereka pun menjadi sasaran penculikan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tidak 'menyukainya. Para pegawai pemerintah yang menjadi sasaran penculikan adalah mandor perkebunan, pegawai pengairan, guru, dan lain-lain (Arsip Reksa Pustaka No. S.508). Beberapa penduduk yang kaya tidak hanya diculik tetapi mengalami pula tindakan *penggedoran*. Hal ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 1949 yang dialami penduduk di wilayah Sragen. Mereka diculik dan dirampok oleh 60 orang yang bersenjatakan karabijn, pistol dan kelewang. Para penculik diduga berasal dari anggota laskar rakyat yang tidak disiplin (Arsip Reksa Pustaka No. S.507).

Kelompok masyarakat lainnya yang mengalami aksi-aksi penculikan di Sragen adalah orang-orang Cina. Komunitas Cina ini tidak disukai oleh masyarakat Sragen karena posisinya yang selalu diuntungkan oleh Belanda. Selain itu, akar konflik antara orang Jawa dengan Cina telah muncul pada awal pembentukan Sarekat Islam pada tahun 1911 (Van Niel, 1960: 88-90). Tabel di bawah ini memperlihatkan orang-orang Cina yang diculik pada tahun 1947 sampai 1949.

Pelaku aksi-aksi penculikan terhadap orang-orang Cina banyak dilakukan oleh kesatuan-kesatuan TNI atau laskar-laskar rakyat yang tidak disiplin (Arsip Reksa Pustaka No. S.508). Menurut beberapa laporan, kesatuan-kesatuan TNI masih sering melakukan aksi-aksi penculikan di pedesaan Sragen. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terdapat pula kelompok-kelompok kriminal yang memanfaatkan situasi dengan ikut terlibat dalam aksi-aksi penculikan demi keuntungan pribadi. Biasanya, aksi-aksi penculikan yang



dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal ini disertai dengan *penggedoran* dan penjarahan (Arsip Reksa Pustaka No. S.507).

**Tabel Daftar Orang Cina yang Diculik Pada Tahun 1947-1949**

Daerah	Diculik		Jumlah
	Belum Kembali	Selamat	
Klaten	79	105	184
Karanganyar	4	-	4
Wonogiri	97	29	126
Sragen	26	8	34
Sukoharjo	13	-	13
Solo Kota	2	-	2
Jumlah	221	202	423

*Sumber : Ken Po, 5 November 1949*

Berdasarkan kenyataan tersebut maka aksi-aksi penculikan yang dilakukan oleh TNI tidak hanya untuk mencari mata-mata musuh tetapi ditujukan pula untuk menggagalkan terbentuknya kembali pemerintahan swapraja. Sebagian besar korban penculikan yang selamat menceritakan bahwa selain dituduh sebagai mata-mata musuh, mereka juga diancam agar tidak berhubungan kembali dengan pihak kraton (Arsip Reksa Pustaka No. S.508).

Apabila TNI dalam melakukan aksi-aksi penculikan mempunyai tujuan politis dan perjuangan, maka penculikan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan liar lebih untuk kepentingan-kepentingan ekonomi dan pribadi. Mereka merupakan "pembonceng" perjuangan yang memanfaatkan situasi kacau dengan melakukan tindak-tanduk kriminal. Beberapa gerombolan liar yang diidentifikasi di Sragen antara lain Sastro "Lawu" dan Karto "Jenggot" di sekitar Gunung Lawu di Karanganyar dan Sragen (Arsip Reksa Pustaka No. S.507).

Selain itu program pemerintahan Hatta juga menghendaki adanya sistem organisasi angkatan perang yang profesional. Sistem ini kemudian dikenal dengan nama rasionalisasi. Sejalan dengan situasi keuangan negara yang sulit maka program ini dilaksanakan dengan cara mengurangi jumlah tentara, peleburan divisi-divisi dan penyesuaian pangkat-pangkat dalam ketentaraan (Soe Hoe Gie, 1997: 193-195). Program ini telah mengembalikan tentara-tentara ke masyarakat desa sebanyak 100.000 orang dari keseluruhan jumlah tentara sebesar 463.000 orang (Nugroho Notosusanto, 1975: 58). Selanjutnya diberhentikan pula 90.000 tentara yang dianggap tidak pantas dipertahankan sebagai tentara yang profesional (Ulf Sindhausen, 1986: 121). Pada awal pelaksanaan program ini, beberapa tentara yang dipecat berasal dari laskar-laskar yang tidak disiplin (Sejarah TNI KODAM VII, 1967). Rasionalisasi kemudian memakan banyak korban dari beberapa laskar rakyat yang berafiliasi kepada sayap kiri atau FDR (Kahin, 1995: 330-334).

Program rasionalisasi yang banyak memotong tentara tersebut tentu saja menimbulkan goncangan di tubuh angkatan perang. Sasaran pertama rasionalisasi yaitu badan-badan perjuangan yang tidak berdisiplin, tidak begitu saja menyerah dan takluk terhadap program ini. BPRI pimpinan Marjuki yang banyak merekrut kaum kriminal dan melakukan korupsi di berbagai instansi pemerintah menolak perintah untuk menyerahkan senjatanya (Arsip Rekza Pustaka No. S.339).

Penolakan terhadap program rasionalisasi dilakukan pula oleh pasukan-pasukan yang berada di lereng Gunung Lawu. Resiment 27 di bawah Sastro Lawu dan Karto Jenggot menolak perintah dari Divisi IV untuk menyerahkan senjatanya. Pasukan sastro Lawu dan Karto Jenggot terkena rasionalisasi karena dianggap sering meresahkan masyarakat di daerah Sragen dan Karanganyar. Pada tanggal 15 Juni 1949 jam 03.00 pagi kesatuan Batalyon Panasan di bawah pimpinan

Mayor Kusmanto berhasil melucuti pasukan Regiment 27. Dalam aksi perucutan senjata tersebut Karto Jenggot ditangkap, sedangkan Sastro Lawu berhasil meloloskan diri (ANRI No. 865).

Pasukan-pasukan yang terkena rasionalisasi baik yang berlatar belakang tidak disiplin, pasukan-pasukan dari sayap kiri maupun alasan-alasan lainnya merasa frustrasi dan tertekan. Mereka merasa malu dan tidak siap apabila harus kembali ke desa. Mereka sudah lama tidak memegang cangkul atau sabit untuk bertani. Timbul sikap-sikap antipati terhadap pemerintah. Untuk mempertahankan hidup dan merongrong kewibawaan pemerintah banyak dari tentara yang terkena rasionalisasi melakukan aksi-aksi kriminal baik di kota maupun desa. Mereka memanfaatkan revolusi sosial untuk melakukan aksi-aksi kriminalnya. Hal itu terlihat dari korban kejahatan yang sebagian besar merupakan unsur-unsur yang berbau kraton, para pamongpraja, orang-orang kaya dan orang-orang Cina.

Para pejuang yang kemudian menjadi seorang penjahat akibat program rasionalisasi adalah anak buah sastro lawu dan Karto Jenggot. Kebanyakan dari mereka masih memegang senjata dan menjadikan daerah sienderan Balong (Jenawi dan Gemolong) menjadi basis gerakannya (ANRI No. 865). Daerah operasi yang menjadi sasaran kejahatannya adalah di sekitar lereng Gunung Lawu yang meliputi daerah Sragen dan Karanganyar.

## BAB V

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada masa revolusi, banyak badan perjuangan yang muncul. Hal itu menunjukkan berkembang ide-ide revolusioner yang dihayati oleh sebagian besar pemuda di Sragen. Dalam situasi perjuangan yang penuh dengan krisis, badan-badan tersebut berfungsi tidak hanya untuk melakukan perlawanan tetapi juga sebagai pusat identitas kelompok serta wahana untuk menjamin kelangsungan hidupnya (survival). Pada perkembangan selanjutnya, badan-badan perjuangan Sragen ikut terlibat dalam konflik politik. Mereka kemudian bergabung dengan partai-partai politik dan menjadi komponen kekuatan bersenjata dari partai politik yang diikutinya. Badan-badan perjuangan yang berafiliasi dengan kekuatan partai-partai politik (Partai sosialis), Barisan Banteng, Laskar Rakyat dan lain-lain.

Bergabungnya badan-badan perjuangan ke dalam kekuatan partai politik telah menempatkan posisi badan-badan perjuangan ke dalam dua tujuan, yaitu di satu pihak berupaya mempertahankan kemerdekaan, di pihak lain membela dan menjaga kepentingan kekuatan politik yang diikutinya. Oleh karena itu, konflik yang

muncul dari kekuatan politik bisa berakibat pada pertentangan-pertentangan badan-badan perjuangan. Selama masa revolusi di Sragen, pertentangan itu telah menimbulkan aksi-aksi kekerasan di antara badan-badan perjuangan, seperti penculikan, pembakaran bahkan pembunuhan. Sementara itu, terdapat pula sekelompok masyarakat yang memanfaatkan badan-badan perjuangan untuk kepentingan pribadi dengan berbuat kriminal, seperti menjarah, menggedor, mencuri, dan lain sebagainya. Kekerasan yang terjadi di Sragen tidak hanya ditunjukkan antara kekuatan revolusioner dengan kekuatan orde sebelumnya, tetapi terjadi pula diantara kekuatan revolusioner yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda.

Gerakan revolusioner yang menginginkan pergantian kekuatan tradisional di Sragen diboncengi oleh kekuatan-kekuatan kriminal. Ketertarikan kaum kriminal terhadap gerakan-gerakan revolusioner dalam revolusi sosial di Sragen adalah fenomena proses sosial. Kekerasan yang dilakukan oleh para pejuang dalam revolusi sosial seperti penculikan, pembunuhan, pembakaran maupun penjarahan bisa diidentifikasi sebagai protes sosial. Upaya-upaya untuk menghancurkan kekuatan lama muncul dari kekecewaan masyarakat yang telah berlangsung lama. Nilai-nilai baru dalam gerakan revolusioner telah mempertegas berlangsungnya revolusi sosial di Sragen.

Para bandit melakukan kejahatan tidak terlepas pula dari kondisi sosial ekonomi yang mereka alami. Orang-orang yang menjadi korban kejahatan tidak berbeda dengan korban kekerasan oleh kaum revolusioner. Dalam situasi revolusi sosial tersebut, kaum kriminal memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadinya. Mereka melakukan penggedoran, penggrayakan sebagai profesi. Kaum kriminal biasanya berhubungan erat dengan para pejuang yang merupakan hubungan timbal balik dan saling menguntungkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengamatan peneliti, belum banyak penelitian revolusi sosial di tingkat lokal terutama yang mengungkap tentang kriminalitas periode 1945-1949. Hal ini perlu ditindak lanjuti penelitian yang berkaitan revolusi sosial dengan menekankan pada aspek kriminalitas di tingkat lokal. Revolusi sosial merupakan gelombang pasang gerakan rakyat dari bawah yang tidak bisa dielakkan selama berlangsungnya revolusi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Arsip-arsip, Surat Kabar**

ANRI No. 865

ANRI. No. 1061

ANRI. No. 1098

ANRI. No. 1763

Arsip tentang Laskar Buruh Indonesia, 1948 (Tidak diterbitkan)

Arsip Reksa Pustaka No. S.339

Arsip Reksa Pustaka No. S.507

Arsip Reksa Pustaka No. S.508

Arsip Reksa Pustaka No. S.668

Arsip Reksa Pustaka No. S.1578

Arsip Reksa Pustaka No. S.1801

Arsip Reksa Pustaka No. S.2747

Berita Republik Indonesia No. 18-19 Tahun II Agustus 1946

Geheim, No. 5518

Geheim, No. 5690

Kedaulatan Rakyat, 29 November 1945

Kedaulatan Rakyat, 24 Agustus 1946

Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 1945

Ken Po, 5 November 1949

Ken Po, 30 Desember 1949

Sejarah Perjuangan Amindra, 1978  
Suara Merdeka, Juli 1984

### **Buku-buku**

**Anderson, Ben**

1988 *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

**Alfian, Ibrahim**

1990 *Pengantar Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Gama Press.

**Brinton, Crane**

1962 *Anatomi Revolusi (Terj)*. Jakarta: Bhratara.

**Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta**

1953 *Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta 1945-1953*. Surakarta: Panitia Dua Tahun DRPD Sementara Surakarta.

**Eisenstadt, S.N.**

1986 *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, Jakarta : C.V. Rajawali.

**Gottschalk, Louis**

1986 *Mengerti Sejarah (Terj. Nugroho Notosusanto)*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

**Gie, The Liang**

1968 *Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negeri Republik Indonesia*, Djakarta: Gunung Agung



Gie, Soe Hok

- 1997 *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, Yogyakarta: Bentang.

Gunawan, Ryadi

- 1981 "Jagoan Dalam Revolusi Kita", *Prisma*, 8 Agustus 1981.

- 
- 1985 *Komunitas Teledhek: Sebuah Gambaran Pewaris Budaya Masyarakat Pinggiran (Makalah)*, Yogyakarta: Proyek Javanologi.

Hobsbawm

- 1972 *Bandits*. Penguin Book.

- 
- 2000 *Bandit Sosial* (Terj. Zaki Hussein) Jakarta: Teplok Press.

Ibrahim, Julianto

- 2004 *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Solo: Bina Citra Pustaka.

Kahin, George M, Turnan.

- 1995 *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik : Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press.

Kamajaya, Karkono

- 1993 *Revolusi di Surakarta*, (Makalah), Yogyakarta: BPNST.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo

1953 *Desa*, Yogyakarta: Sumur Bandung.

Kartodirdjo, Sartono

1981 “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural”, *Prisma*, 8 Agustus 1981.

---

1992 *Peranan Badan-badan Perjuangan dalam Revolusi Indonesia*, Makalah Seminar .

---

1994 *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat

1970 *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*, Jakarta UI.

Kurasawa, Aiko

1993 *Mobilisasi dan Kontrol : Study Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta : Gramedia

Larson, G.D

1990 *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lucas, Anton

1989 *Peristiwa Tiga Daerah : Revolusi Dalam Revolusi*, Jakarta: Grafiti Press.

Marno

1979 *Selayang Pandang Kota Sragen Pada Masa Revolusi Fisik*. Surakarta : UNS.

Meehan, Eugene

1973 *The Structuralist Science as Philosophy*. Oxford :  
Oxford University Press.

Meijer, D.H

1930 "*Desa Politie in het Regentschap Sragen*", KS

Meyerhoff, Hans

1959 *The Philosophy of History in Our Time*. New York:  
Douteday & Company Inc.

Laskar Banteng (Naskah Tidak Diterbitkan)

Nasution, AH

1989 *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2A: Kenangan  
Masa Gerilya*. Jakarta: CV. Masagung

Notosusanto, Nugroho

1975 *Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan  
Jaman Republik Indonesia*, Jakarta: Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan

---

1979 *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di  
Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Niel, Robert Van

1960 *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, Den  
Haag/Bandung: Van Hoeve.

Onghokham

1985 "Revolusi Indonesia: Mitos dan Realitas, *Prisma No.  
8, 1985*.

Panitia Hari Jadi Sragen

1987 *Sejarah Hari Jadi Kota Sragen*, Pemda Sragen.

Reid, Anthony

1981 “Revolusi Sosial: Revolusi Nasional”, *Prisma 8 Agustus 1981*.

---

1996 *Revolusi Nasional Indonesia* (Terj. P.G. Katoppo), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ricklefs, M.C.

1991 *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan Dharmono Hardowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Sundhaussen, Ulf.

1986 *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, Jakarta: LP3ES.

Sejarah Korem 074

Semarang.

Panitia Reuni Amindra

1978 *Sejarah Angkatan Muda Indonesia Raya, I Sragen*.

Setiawati, Ita

1986 “Tentara Pelajar Solo: Awal Kemunculan dan Partisipasi dalam Perang Kemerdekaan Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Sastra UGM.

Soedarmono

1977 *Pergolakan Sosial Politik Masyarakat Surakarta Dalam Menentang Pemerintah Daerah Istimewa tahun 1945-1950*, Skripsi Sarjana, Sasdaya UGM Yogyakarta.

Suhartono

1995 *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850 – 1942*. Yogyakarta: Aditya Media.

- 
- 2001 *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Indonesia*, Yogyakarta: Lapera.
- 
- 2010 *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumardjan, Selo dkk  
1964 *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: UI.
- Suyatno  
1975 *Adege Kraton Surakarta*, Parikesit No. 9, Desember.
- 
- 1978 "Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945-1950, *Prisma*, 7 Agustus 1978.
- Simatupang, TB  
1960 Pengantar Ilmu Perang Indonesia. Jakarta: PT. Kinta
- Undang-undang Republik Indonesia 1945 (Alinea Pertama tentang Pembukaan)
- Wagner, S.P.  
1970 *The End of Revolution : A New Assessment of Today's Rebellions*. New York: Barnes and Company, Inc.
- Yuwono, Sutopo dkk  
1970 *Sedjarah Perdjoengan MBHPI/BP Terate*, Surakarta (Tidak diterbitkan)

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Alamat	Jabatan	
				Dulu	Sekarang
1.	S. Mlayapranata	75 thn	Jl. Veteran Sragen	Laskar AMS	Pens. PNS
2.	KH. M. Bolkin	77 thn	Sragen	Laskar Kyai	Pengasuh Pondok Pesantren
3.	Panoedi	77 thn	Sragen	BKR Sragen	Pensiunan
4.	Brigjen Pol. Purn. Tjipto Pranoto	78 thn	Sragen	Polisi Sragen	Pensiunan Polisi



# **REALISASI PROGRAM “PEPOLIT” (PENDIDIKAN POLITIK TENTARA) DI JAWA TAHUN 1946-1948**

Tugas Tri Wahyono

# BAB I

## PENDAHULUAN

Setiap revolusi selalu penuh dengan beban, dengan ideologi-ideologi dan prinsip-prinsip. Revolusi adalah pergolakan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang membawa perubahan yang fundamental terhadap tatanan yang ada, yang berlangsung dengan kekerasan, mendasar dan dalam waktu yang relatif sangat cepat (Suyatno, 1984: 64)

Demikian halnya dengan revolusi Indonesia, perubahan yang fundamental di dalam masyarakat terasa sekali pada saat Revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Revolusi Indonesia yang antikolonial, sehingga “antikolonialisme” menjadi suatu kehidupan politik yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia (Suyatno, 1984: 124)

Ketika revolusi meletus, hal yang pertama kali dapat dilihat adalah suasana radikal yang cenderung mengarah ke anarkis, sedangkan pemerintah nasional yang baru, yang sedang berkuasa, hampir tidak mampu mengendalikan seluruh dinamika revolusi yang mulai bangkit itu. Reaksi pertama yang tampak adalah usaha dari berbagai golongan masyarakat Indonesia untuk merebut alat-alat kekuasaan negara yang masih berada di tangan Jepang. Tindakan itu kemudian disusul oleh berbagai tindakan lain yang tidak saja bersifat antiasing,



tetapi juga bersifat antifeodal, antirasial, juga tindakan-tindakan yang bersifat antielitisme (Onghokham, 1985: 5)

Jadi proses revolusi itu memperlihatkan bahwa ia tidak saja mencakup upaya menghancurkan kekuasaan kolonial, tetapi pada saat yang sama juga mendobrak struktur-struktur tradisional yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai peristiwa seperti demonstrasi-demonstrasi, kerusuhan, bahkan serangan-serangan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain (Nasikun, 1984: 81-84)

Revolusi juga telah menciptakan pengkotak-kotakan dalam masyarakat. Itu disebabkan karena adanya pandangan dan konsepsi yang berlainan di antara pendukung revolusi itu sendiri. Di antaranya dapat ditarik perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan bersenjata dengan kekuatan-kekuatan diplomasi, antara generasi tua dengan generasi muda, antara golongan kiri dengan golongan kanan, antara kekuatan Islam dengan kekuatan sekuler, dan sebagainya (Ricklef, 1989: 317).

Ketika bangsa Indonesia menghadapi ancaman dari luar, perbedaan-perbedaan itu telah menimbulkan antagonisme antara berbagai golongan dalam menginterpretasikan jalannya perjuangan. Pemerintah Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Amir Syarifuddin menekankan strategi diplomasi, sedangkan kalangan militer beserta para laskar dari badan perjuangan memilih strategi kekerasan senjata (Nasution, 1978). Perbedaan strategi perjuangan itulah yang menjadi penyebab memburuknya hubungan sipil dan militer di Indonesia.

Amir Syarifuddin, sebagai Ketua PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang berhaluan komunis, sewaktu menjabat Menteri Pertahanan pada Kabinet Syahrir tahun 1946-1947, menyadari sepenuhnya arti pentingnya potensi dan eksistensi angkatan bersenjata bagi

perjuangan politiknya. Amir Syarifuddin sejak awal telah menaruh perhatian pada usaha pengembangan kekuatan bersenjata, baik melalui tentara resmi pemerintah maupun melalui laskar-laskar atau badan-badan perjuangan.

Usaha Amir Syarifuddin untuk mengatur angkatan bersenjata regular dilakukan dengan cara memberikan pendidikan politik di kalangan tentara. Dalam usaha itu Amir Syarifuddin mendirikan suatu lembaga yang dinamakan "Pepolit" (Pendidikan Politik Tentara). Pepolit itu kemudian ditanamkan ke dalam kesatuan-kesatuan militer. Melalui Pepolit inilah kesatuan-kesatuan militer Indonesia digodog dengan konsepsi-konsepsi dan ideologi komunis.

Menurut Amir Syarifuddin, tentara harus menjadi sebuah tentara dengan suatu ideologi dan landasan politik yang kuat, sehingga mereka akan mengetahui dengan pasti hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka di dalam revolusi (Sundhaussen, 1986: 29).

Pemikiran Amir Syarifuddin tentang pendidikan politik untuk militer itu mendapat dukungan dari beberapa kalangan, mengingat sifat perjuangan itu sendiri mempunyai sifat politik sekaligus militer. Oleh karena gagasan Amir Syarifuddin itu cenderung diarahkan ke suatu ideolog sosialis-marxis, maka mendapat tentangan dari para pemimpin militer yang menyadari bahayanya kehadiran suatu ideologi partai dalam tubuh militer. Itu terbukti dari berbagai peristiwa politik hingga Peristiwa Madiun 1948 yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan militer dalam pertarungan ideologi di Indonesia.

Sejarah Revolusi Indonesia hingga kini masih menarik untuk dikaji. Masih banyak "catatan-catatan yang berserakan" di sekitar revolusi Indonesia, misalnya pertentangan antarkelompok dengan latar belakang perbedaan ideologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berkaitan dengan usaha untuk mengungkap peristiwa yang

terjadi antara tahun 1946-1948 yakni adanya Program Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), maka dapat dirumuskan permasalahan seperti berikut.

1. Bagaimana sejarah lahirnya program Pepolit (Pendidikan Politik Tentara)?
2. Bagaimana pelaksanaan Pepolit di dalam tubuh militer?
3. Apa dampak yang ditimbulkan Pepolit terhadap perkembangan politik dan militer?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sejarah lahirnya program Pepolit (Pendidikan Politik Tentara).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pepolit.
3. Untuk mengungkapkan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pepolit itu terhadap perkembangan politik dan militer, khususnya di Jawa.

Selanjutnya penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut.

1. Menginventarisasi dan mendokumentasikan peristiwa sejarah.
2. Sebagai bahan informasi bagi pecinta sejarah, pemerhati sejarah, dan peminat sejarah serta masyarakat pada umumnya tentang peristiwa sejarah di tingkat lokal itu.
3. Sebagai bahan bacaan dalam bidang studi sejarah bagi anak didik di sekolah, khususnya tingkat dasar dan menengah.

Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada tahun 1945 telah menjanjikan hak politik kepada segenap anggota masyarakat Indonesia. Sebagai realisasinya, dapat dilihat dari perkembangan partai-partai dan organisasi-organisasi politik, terutama setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Nomor X, Tanggal 3 Novem-

ber 1945. Perkembangan tersebut ternyata tidak terlepas pula dari usaha-usaha partai dan organisasi-organisasi politik untuk menempatkan massa sebanyak-banyaknya di bawah "social control"-nya agar memberikan dukungan kepadanya (Soekoco, 1955: 7).

Apabila dilihat dari konteks perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu, maka Program "Pepolit" (Pendidikan Politik Tentara) di Jawa Tahun 1946-1948, merupakan peristiwa politik yang demikian jelas mempunyai misi politik. Oleh karena itu dalam studi ini penulis akan memandang peristiwa-peristiwa tersebut dari segi politik.

Pemikiran tentang "Pepolit" dapat dilihat dari kondisi Partai Sosialis pada masa itu. Meskipun sejak awal revolusi Partai Sosialis dapat menempatkan posisinya sebagai Partai Pemerintah, namun di dalamnya terdapat perpecahan di antara pemimpinnya yang secara prinsip mempunyai perbedaan dalam menginterpretasikan ideologi sosialis-marxis. Keadaan itu menjadikan Partai Sosialis secara intern terbagi dalam dua kubu, yaitu Amir Syarifuddin dan kubu Sutan Syahrir.

Amir Syarifuddin yang ternyata seorang komunis berkeinginan untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Amir menyadari betul arti pentingnya militer untuk mencapai tujuan politiknya. Oleh karena itu, Amir segera mengambil langkah-langkah untuk menarik golongan militer di bawah pengaruhnya, yakni dengan mendirikan Pendidikan Politik Tentara (Pepolit).

Buku-buku teks yang secara khusus mengulas tentang Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) tahun 1946-1948 sepertinya belum pernah dijumpai oleh penulis. Meskipun begitu ada beberapa buku yang patut dijadikan acuan utama untuk menelusuri lebih lanjut tentang Pepolit, seperti buku *Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI* yang ditulis oleh Ulf Sundhaussen (Jakarta: LP3ES, 1986).

Pada halaman 29 dari buku Sundhaussen itu disebutkan bahwa Amir Syarifuddin telah mengembangkan sebuah konsep untuk menempatkan militer di bawah pengaruhnya melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Pepolit (Pendidikan Politik Tentara). Menurut Amir, bahwa tentara harus menjadi sebuah tentara dengan suatu ideologi dan landasan politik yang kuat, sehingga mereka akan mengetahui dengan pasti hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka di dalam revolusi.

Buku lain yang turut mendukung penelitian ini adalah tulisan Yahya A. Muhaimin berjudul *Perkembangan Politik Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982). Buku itu meskipun tidak secara spesifik mengungkap tentang lembaga Pepolit, namun cukup signifikan untuk dijadikan sebuah kajian lebih lanjut, terutama tentang kedudukan militer dalam suatu negara.

Pada halaman 1 dari buku Muhaimin itu menyebutkan bahwa kedudukan militer merupakan suatu hal yang sangat penting bagi terselenggaranya negara. Tugas pokok militer dalam suatu negara adalah menjaga keamanan dan menjamin kelangsungan hidup suatu negara terhadap serbuan musuh, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hubungan sipil-militer, karya Muhaimin itu pun cukup baik dijadikan dasar untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut.

Lingkup spasial kajian ini meliputi sebagian wilayah yang berada di bawah kekuasaan RI pasca proklamasi, yakni Pulau Jawa. Adapun lingkup temporalnya meliputi kurun waktu antara tahun 1946 ketika Amir Syarifuddin menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Syahrir, sampai dengan tahun 1948 ketika Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri dan dalam tahun yang sama digantikan oleh Moh. Hatta.

Kajian ini membahas tentang: Realisasi Program "Pepolit" (Pendidikan Politik Tentara) di Jawa Tahun 1946-1948. Dilihat dari aspek waktu, akan tampak bahwa kajian itu merupakan studi sejarah, maka pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang relevan untuk mengungkap kembali peristiwa tersebut. Pendekatan sejarah itu didasarkan pada metode sejarah, yaitu:

"Sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis, yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis". (Notosusanto, 1978; 11)

Metode sejarah mempunyai empat tahapan dalam proses penelitian. Pertama, heuristik yaitu proses mencari dan menemukan data-data. Kedua, kritik sumber yaitu usaha mencari otentisitas atau keaslian data-data yang diperoleh melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern menyangkut dokumennya secara fisik, sedangkan kritik intern menyangkut isi dari dokumen yang bersangkutan. Ketiga, interpretasi atau penafsiran terhadap fakta yang dimunculkan dari data-data yang sudah diseleksi tadi, yang disesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Kemudian keempat atau tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan.

Berdasarkan metode sejarah, maka data-data yang hendak dipergunakan dalam kajian tentang "Realisasi Program "Pepolit" (Pendidikan Politik Tentara) di Jawa Tahun 1946-1948", itu antara lain arsip tertulis atau dokumen koleksi ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Jakarta, dan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku pustaka sebagai pelengkap data yang diperoleh dari sumber dokumen.

## BAB II

# PERKEMBANGAN POLITIK DAN MILITER DI JAWA (1946-1949)

### A. Kondisi Politik

Pada masa awal kemerdekaan, badan-badan perjuangan umumnya memegang teguh prinsip perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama, maka sifat badan-badan perjuangan itu juga tumbuh secara lokal, etnis, dan ideologis (Pusat Sejarah ABRI, 1983: 3-5)

Untuk mengadakan koordinasi di antara badan-badan perjuangan itu, pada tanggal 10 November 1945 diadakan Kongres Pemuda di Yogyakarta. Sejak saat itu tujuan murni perjuangan untuk mengusir Belanda menjadi tidak kompak lagi. Suasana perpecahan justru terasa setelah diadakan Kongres Pemuda yang bertujuan untuk menyatukan segenap potensi perjuangan. Dalam kongres itu muncul dua kelompok besar yang sangat berpengaruh, yaitu Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dan Badan Kongres Pemuda Indonesia yang merupakan suatu federasi dari berbagai macam organisasi kepemudaan. Hal itu terjadi karena adanya tendensi-tendensi politik



yang mewarnai kehidupan badan-badan perjuangan. Semua itu akibat dari kebijakan politik yang ditempuh oleh pemerintah.

Politik diplomasi pemerintah dan sifat pemerintahan yang parlementaris telah mengundang berbagai konflik antara sesama bangsa, bahkan menjurus kepada perpecahan. Situasi menjadi semakin menghangat setelah adanya himbauan dari pemerintah untuk menyesuaikan kehidupan dengan alam demokrasi liberal, karena pemerintah telah membuka pintu bagi kehadiran partai-partai politik dari berbagai golongan yang ada. Himbauan untuk mendirikan partai-partai politik itu tertuang di dalam Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 3 November 1945 (Koesnodiprodjo, 1951: 136-137)

Setelah keluarnya maklumat pemerintah itu, corak ideologi tampak jelas dalam badan-badan perjuangan. Maklumat itu sebenarnya merupakan bagian politik luar negeri pada masa perjuangan. Dalam maklumat itu antara lain dinyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan mendirikan partai politik untuk menyalurkan keinginan-keinginan politik mereka secara legal. Dengan demikian kebijakan yang semula ditetapkan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan partai tunggal, dilepaskan. Dalam maklumat itu juga ditetapkan bahwa pemerintah akan menjamin keamanan dan kelangsungan modal swasta asing, yang jauh sebelum pendudukan Jepang sudah ada di Indonesia. Dengan demikian jelas, bahwa maklumat itu juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengadakan pendekatan diplomatis dengan pihak Sekutu.

Maklumat pemerintah itu segera mendapatkan tanggapan positif dari rakyat Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, bermuncullah berbagai partai politik di Indonesia. Hal itu dapat dimengerti, mengingat sejak masa pergerakan nasional Indonesia telah mengenal berbagai partai politik. Pada masa pendudukan Jepang, partai-partai politik itu dibekukan. Beberapa di antaranya



membentuk gerakan secara ilegal atau bawah tanah. Pengalaman, corak ideologi dan keanggotaan masih ada, sehingga kemunculan kembali ke panggung politik dapat berlangsung secara cepat pula. Hampir semua partai politik yang sudah ada pada masa pergerakan nasional muncul kembali sejak bulan November 1945. Kehadiran partai-partai politik menyebabkan gelandang politik Indonesia menjadi sangat ramai (Pusat Sejarah ABRI, 1983: 6)

Disadari atau tidak, sebenarnya para pengambil kebijaksanaan saat itu sedikit banyak telah membawa kehidupan demokrasi di Indonesia menuju alam perpecahan. Munculnya partai-partai politik berarti pula berlangsungnya suatu proses partisipasi dan mobilisasi politik masyarakat. Kenyataan telah membuktikan bahwa di beberapa negara yang penduduknya aktif berpolitik, bisa dipastikan bertambahnya ketegangan di dalam negeri yang dapat mengancam kesatuan bangsa (Wrigins, 1982: 59)

Di kalangan badan-badan perjuangan yang berafiliasi kepada suatu partai, biasanya terlebih dahulu membela kepentingan ideologi yang dianut oleh induk partainya. Menurut Arbi Sanit (1981: 48), pada dasarnya yang menjadi dasar pokok pertikaian di antara partai-partai politik di Indonesia adalah faktor ideologi. Sulitnya kerjasama di antara elit partai politik menuju ke arah konsesus disebabkan oleh karena tebalnya ikatan ideologi. Hal itu disebabkan karena belum adanya suatu ideologi yang mampu menyalurkan elit ke dalam suatu persetujuan yang mendasar mengenai politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan. Dengan demikian ideologi yang diharapkan menjadi alat untuk menggerakkan massa guna mencapai suatu gambaran masyarakat yang dicita-citakan, di dalam praktiknya justru membawa efek terbalik.

Golongan agama, nasionalis, dan sosialis komunis telah mendominasi kehidupan politik Indonesia melalui partai-partai politik (Karim, 1983: vii). Tingkah laku politiknya juga dipengaruhi oleh

faktor-faktor yang bersifat primordialisme. Golongan agama menampilkan pengaruh yang dalam, sehingga lahir golongan politik tertentu yang semata-mata beraksi atas keyakinan agamanya. Golongan itu berkeinginan untuk menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berpolitik. Sedangkan golongan komunis, sejak awal perjuangannya, selalu ditandai oleh letupan yang menampakkan aksi-aksi fisik, selanjutnya mengarah pada penanaman ideologi di dalam masyarakat.

Pada masa penjajahan, konflik antar golongan dapat diatasi dengan isu melawan penjajah, sehingga intrik-intrik politik di antara masing-masing golongan tidak menampakkan perpecahan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, begitu Indonesia terlepas dari kaum penjajah, di saat semakin intensifnya upaya menanamkan ideologi dalam masyarakat dan di saat mulai tampak “pembagian kekuasaan”, masing-masing golongan menampakkan identitasnya sebagai golongan politik yang memang mempunyai ambisi untuk mencapai tujuannya dalam kekuasaan politik, yang ditempuh dengan cara-cara kurang sehat (Karim, 1983: 8)

Aspek penting dalam pergolakan politik pada masa-masa itu terpusat pada peranan elit-elit politik dengan latar belakang ideologi yang berbeda-beda. Konflik dan persaingan di antara mereka sering menimbulkan bentrokan-bentrokan yang sangat membahayakan keutuhan negara. Menurut Herbeth Feith (1980: 13), bahwa konflik partai di masa republik dan persoalan ideologi yang terkait di dalamnya sama banyaknya dengan pertempuran dan perundingan antara kaum republiken di satu pihak, dengan Belanda/Sekutu di pihak lain Hal itu dapat dilihat, bahwa kerusuhan-kerusuhan yang muncul dalam usaha untuk menertibkan badan-badan perjuangan justru datang dari berbagai partai tertentu.

Masalah tersebut menjadi semakin gawat karena adanya bagian-bagian dari badan-badan perjuangan yang bersenjata. Bahkan bebe-

rapa partai politik mempunyai seksi yang dipersenjatai (laskar partai), Misalnya, golongan Islam membentuk Hisbullah, golongan sosialis berhasil melebur sejumlah sejumlah organisasi pemuda ke dalam Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Barisan Pelopor membentuk Barisan Banteng, dan dari golongan komunis membentuk Laskar Rakyat (Sundhaussen, 1986: 8).

Di antara laskar-laskar partai tersebut, Pesindo merupakan organisasi yang kuat dan dinamik. Pesindo merupakan gabungan dari tujuh buah organisasi pemuda sebagai hasil dari persidangan tanggal 10 November 1945 di Yogyakarta. Ketujuh organisasi itu ialah: Pemuda Republik Indonesia (PRI), Angkatan Pemuda Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, Gerakan Pemuda Republik Indonesia, Angkatan Muda Kereta Api, Angkatan Muda PTT, dan Angkatom Muda Gas Elektrik (Kahin, 1980: 201). Anggota-anggota Pesindo umumnya mempunyai kepentingan yang sama dengan Partai Sosialis dan memberikan dukungan yang besar kepada kekuatan politiknya.

Munculnya badan-badan perjuangan dan laskar-laskar partai tersebut berarti di dalam suatu negara terdapat dua macam pasukan bersenjata yaitu Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan atau laskar partai sebagai potensi rakyat yang mempunyai haluan sesuai dengan ideologi partai tempatnya bernaung. Keadaan itu sangat merugikan strategi perjuangan Indonesia.

Bertolak dari hal "bahwa Tentara Republik Indonesia sebagai satu-satunya organisasi militer di Indonesia", maka pemerintah berupaya untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan badan-badan perjuangan/laskar-laskar ke dalam satu organisasi tentara. Usaha penyatuan itu ternyata berjalan kurang lancar. Walaupun pada dasarnya semua pihak mengakui pentingnya kesatuan tekad dan persatuan yang bulat, namun mereka tidak ingin

mengikatkan diri lebih jauh dengan pemerintah. Kenyataan itu disadari oleh pemerintah, mengingat pemilik laskar-laskar adalah partai-partai atau golongan-golongan politik yang tidak rela menyerahkan pasukannya begitu saja kepada pemerintah. Apalagi laskar-laskar tersebut menjadi pelopor yang dianutnya untuk turut aktif dalam pergolakan politik di dalam negeri.

## **B. Lahirnya TNI**

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang dan berhasil membentuk suatu perlengkapan negara, seperti undang-undang dasar, presiden, serta pemerintahan. Namun pada awal perjuangan sekitar proklamasi itu nampak dua pihak yang tidak sepaham tentang cara-cara menegakkan kekuasaan Republik Indonesia. Di satu pihak, yang dipelopori oleh golongan pemuda, menghendaki kekerasan, sementara pihak lain lebih menekankan diplomasi.

Kebanyakan golongan pemuda menghendaki agar pemerintah segera membentuk tentara. Mereka lalu mengajukan sebuah dekrit tentang pembentukan tentara dengan menetapkan bahwa semua orang bekas PETA (Pembela Tanah Air) dan *Heiho* diangkat menjadi Tentara Republik (Malik, 1950: 67). Dekrit itu pada akhirnya tidak jadi diumumkan sehubungan pertimbangan politik. Pimpinan nasional berpendapat, bahwa pembentukan sebuah tentara nasional pada saat itu akan mengundang gabungan kekuatan Serikat dan Jepang. Sedang mereka telah memastikan bahwa kekuatan nasional Indonesia belum mampu menghadapi pukulan tersebut. Oleh karena itu pemerintah memilih cara diplomasi untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu.

Sidang PPKI selanjutnya, yakni tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan membentuk tiga badan sebagai wadah perjuangan, yaitu KNI (Komite Nasional Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) (Koesnodiprodo, 1951: 117). Pembentukan BKR diumumkan pada tanggal 23 Agustus 1945 oleh presiden dengan menyerukan agar bekas tentara PETA, *Heiho*, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil sebagai tentara kebangsaan bila saatnya tiba (Djamhari, 1971:1). Pengumuman presiden tentang pembentukan BKR segera mendapat sambutan spontan rakyat. Pemuda-pemuda dari berbagai latar belakang mulai masuk BKR terutama bekas anggota PETA, KNIL (*Koninklijk Nederlansch Indisch Leger*), dan *Heiho* juga memanfaatkan BKR sebagai wadah perjuangan mereka.

Berdirinya BKR ternyata tidak begitu memuaskan beberapa pihak terutama bagi kalangan yang berjuang di medan tempur. Ketidakpuasan itu disebabkan karena sifat dari BKR yang hanya berfungsi sebagai alat keamanan belaka. Padahal kondisi Indonesia pada saat itu menuntut adanya sebuah alat pertahanan dan keamanan yang bersifat militer penuh. Inilah yang mendorong kalangan militer terus mendesak pemerintah agar membangun suatu tentara kebangsaan. Mereka berpendapat, bahwa sebuah tentara yang bersifat nasional harus segera dibentuk. Hal tersebut karena Indonesia dihadapkan oleh suatu kenyataan bahwa mendaratnya Sekutu di Indonesia ternyata diboncengi oleh NICA/Belanda, yang segera terang-terangan ingin mengembalikan kekuasaannya ke Indonesia. Itu merupakan ancaman dan penghinaan kedaulatan Republik Indonesia.

Kehadiran pasukan Sekutu yang diikuti oleh pasukan Belanda pada akhir September 1945, telah menimbulkan pertempuran di beberapa kota besar di Jawa. Pada masa itu, perlawanan dan perebutan

kekuasaan yang dilaksanakan secara setempat-setempat oleh BKR dan badan-badan perjuangan tidak berhasil memenuhi sasaran perjuangan. Keadaan itu menyadarkan pemerintah akan perlunya suatu organisasi ketentaraan yang bersifat nasional. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan suatu maklumat tentang perubahan BKR menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) (Koesnodiprodjo, 1951: 54).

Di samping TKR, barisan-barisan bersenjata terutama dari partai-partai politik (laskar-laskar) tetap diperbolehkan berdiri tanpa dipaksa untuk meleburkan diri ke dalam TKR. Mereka tetap diakui keberadaannya di samping tentara resmi, berdasarkan atas pertimbangan bahwa rakyat berhak mempunyai tentara sendiri di luar tentara negara. Pihak TKR sendiri menyambut gembira bahkan menganjurkan berdirinya laskar-laskar. Karena hak dan kewajiban untuk mempertahankan keamanan keluar dan ke dalam bukanlah monopoli tentara (Dinas Sedjarah TNI-AD, 1982: 257-259).

Pada akhir tahun 1945, timbul cita-cita di kalangan Markas Tertinggi TKR untuk merombak nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Kementerian Keamanan dirubah menjadi Kementerian Pertahanan (Dinas Sedjarah TNI-AD, 1982: 157). Perubahan nama itu berarti memperdalam dan memperluas tugas tentara dalam arti yang lebih luas. Nama Tentara Keselamatan Rakyat ternyata tidak berlangsung lama. Pada tanggal 26 Januari 1946, keluar sebuah maklumat yang berisi tentang penggantian nama dari Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Maksud dari perubahan itu untuk memperbaiki susunan atas dasar dan bentuk ketentaraan yang sempurna. Selain itu TRI juga akan disusun atas dasar militer internasional. Dengan maklumat itu, maka kedudukan TRI menjadi sangat jelas, TRI menjadi alat negara yang sepenuhnya, yaitu sebagai satu-satunya alat militer republik.

Pembentukan TRI yang didasarkan pada dasar internasional itu, ternyata menimbulkan perpecahan pendapat. Di satu pihak, para mantan serdadu tentara kolonial (KNIL) yang mempunyai pandangan yang lebih profesional, menghendaki TRI dibentuk secara besar-besaran seperti tentara di negara-negara lain. Di lain pihak, bekas prajurit PETA dan *Heiho* serta laskar-laskar yang diilhami oleh suatu semangat revolusi cenderung berpendapat, bahwa tidaklah perlu dibentuk angkatan perang besar-besaran, karena baik keadaan sarana serta kebutuhan perjuangan membutuhkan tentara yang relatif kenyal, terkoordinir di bawah komando yang cocok untuk situasi perang kemerdekaan (Dinas Provoost TNI-AD, 1981: 42).

Untuk dapat menyempurnakan organisasi ketentaraan, maka badan-badan perjuangan dan laskar-laskar yang tidak mau menggabungkan diri kepada TRI diberi wadah satu biro khusus dalam Kementerian Pertahanan. Biro khusus itu dikenal dengan nama Biro Perjuangan. Itu berarti tetap ada dua pasukan bersenjata dalam negara Indonesia, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan/laskar-laskar yang lebih berorientasi kepada ideologi-ideologi tertentu. Keadaan itu sangat melemahkan potensi perjuangan TRI. Antagonisme yang kian tajam di antara mereka akibat saling curiga, perbedaan tujuan dan kepentingan, sering menimbulkan bentrokan-bentrokan yang bersifat fisik.

Untuk mencegah hal-hal yang bersifat negatif itu, pemerintah mempunyai gagasan untuk menyatukan TRI dengan badan-badan perjuangan dan laskar-laskar dalam satu wadah organisasi tentara. Pada tanggal 5 Mei 1947 pemerintah mengeluarkan penetapan resmi tentang penggabungan dua kekuatan bersenjata itu. Pelaksanaan dari rencana itu diserahkan kepada suatu panitia yang diketuai langsung presiden dan wakil presiden, sedang menteri pertahanan dan panglima besar sebagai wakil ketua.

Dalam pelaksanaannya, sebagian besar panitia cenderung berpendapat bahwa badan-badan perjuangan dan laskar-laskar harus dihapuskan, baik berdasarkan pertimbangan efisiensi dalam perjuangan menghadapi Belanda, maupun berdasarkan pertimbangan dalam negari (Simatupang, 1985: 88-89). Ada juga usul agar laskar-laskar itu dibubarkan dan disusun kembali menjadi pasukan-pasukan daerah yang akan membantu pasukan TRI menurut kedaerahan dan berada di bawah komando TRI setempat.

Tugas panitia untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan dan laskar-laskar ternyata berjalan kurang lancar. Usul-usul yang dianggap merugikan keberadaan badan perjuangan dan laskar-laskar ditolak, terutama oleh golongan-golongan politik yang tidak rela menyerahkan pasukannya begitu saja kepada pemerintah. Untuk mengatasi hal itu, menteri pertahanan mengajukan konsepsi pelaksanaan penyatuan secara bertahap. Tahap pertama, laskar dalam daerah divisi diperbolehkan mempunyai satu resimen dari masing-masing partai politik. Dari resimen-resimen itu digabungkan menjadi satu brigade laskar. Tahap kedua, brigade laskar menggabungkan diri kepada TRI, kemudian dilebur menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Dinas Sedjarah TNI-AD, 1982: 40)

Setelah mengalami masa yang sulit, akhirnya pada tanggal 3 Juli 1947 keluarlah Penetapan Presiden tentang berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan semua badan perjuangan dan laskar-laskar secara serentak dimasukkan ke dalam TNI. Dengan demikian, angkatan bersenjata yang sejak kelahirannya telah terpecah-pecah, sejak saat itu tumbuh menjadi TNI sebagai satu-satunya organisasi militer Indonesia dan sebagai satu-satunya wadah perjuangan.



### C. Kedudukan Militer dalam Suatu Negara

Di dalam sejarah dunia, tidak ada satu pun negara yang tidak mempunyai alat pertahanan. Alat pertahanan itu semula bersifat sementara dan informal. Namun dengan berkembangnya sistem kenegaraan, muncul kecenderungan untuk melembagakan alat-alat pertahanan itu yang dewasa ini dikenal sebagai organisasi militer.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kedudukan militer merupakan suatu hal yang sangat penting bagi terselenggaranya negara. Tugas pokok militer dalam suatu negara adalah menjaga keamanan dan menjamin kelangsungan hidup suatu negara terhadap serbuan musuh, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri sendiri (Muhaimin, 1982: 1). Sebagai konsekuensi dari tugas itu, militer tumbuh sebagai alat tempur yang harus mendukung cita-cita politik bagi negara.

Organisasi militer sebagai alat negara yang harus tunduk dan patuh pada kekuasaan politik negara, dalam perkembangannya mengalami perubahan. Di dalam kedudukannya yang baru itu, militer bisa menduduki fungsi-fungsi politik. Namun pada dasarnya tempat dan kedudukan militer dalam suatu negara, tidak dapat dipisahkan dengan sifat dan kondisi politik setempat (Simatupang, 1980: 15).

Di dalam suatu negara yang bersifat ekspansionis, militer menduduki posisi penting dalam menetapkan kebijaksanaan politik negara. Demikian halnya dengan kondisi negara-negara Dunia Ketiga yang menghadapi berbagai problema setelah pendudukan kolonial, baik problema politik maupun problema ekonomi (Parlmutter, 1980: xxvii). Hal-hal itulah yang menyebabkan militer mempunyai peluang untuk terjun langsung dalam kancah politik, bahkan mereka dapat muncul sebagai kelompok politik yang dominan (Abdullah, 1980: 3-11)

Di Indonesia, kedudukan dan peranan militer dalam negara terutama dalam kancah politik, mempunyai akar yang berlainan dengan negara-negara Barat, negara-negara komunis, maupun di negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Dalam awal pembentukannya, militer Indonesia cenderung mengarah pada corak militer Eropa Barat. Hal itu tidak terlepas dari peranan perwira-perwira bekas KNIL yang bertolak dari paham Barat (supremasi sipil), yang mendoktrinasi agar tentara bersifat netral dalam politik (Crouch, 1986: 23). Sementara bagi perwira-perwira PETA yang mewarisi tradisi militerisme Jepang, telah memberikan pengaruh politik yang besar dalam militer Indonesia pada waktu itu.

Hubungan antara perwira-perwira bekas KNIL yang cenderung netral dalam politik dengan perwira-perwira hasil didikan Jepang yang tidak canggung dalam dunia politik telah menyebabkan terjadinya polarisasi dalam tubuh militer. Polarisasi itu menjadi semakin jelas setelah munculnya aliran-aliran politik dalam badan-badan perjuangan dan laskar-laskar yang merupakan komponen utama dalam militer Indonesia.

Terlepas dari bagaimana hubungan antara golongan-golongan di dalam militer Indonesia dengan berbagai latar belakang yang berlainan itu, yang jelas militer Indonesia lahir di tengah-tengah revolusi. TNI lahir tidak hanya sebagai alat militer secara teknis saja, tetapi sebagai manifestasi perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan bangsanya.

Sebagai produk dari revolusi, maka tentara Indonesia juga tumbuh sebagai tentara revolusi, yaitu suatu bentuk tentara baru yang mendobrak sistem dan nilai militer kolonial Belanda maupun Jepang. Tentara Indonesia bukanlah kelanjutan dari militer kolonial Belanda ataupun kelanjutan dari militer pendudukan Jepang, tetapi merupakan suatu tentara baru yang lahir dari tindakan revolusioner

untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan (Simatupang, 1980: 12).

Tentara Indonesia yang lahir dari kancah revolusi telah memungkinkan mereka untuk melakukan politik maupun fungsi pemerintahan, karena dalam suasana revolusi tidak ada garis pemisah yang jelas antara fungsi politik dan fungsi militer. Kondisi seperti itu ternyata tidak disadari oleh sebagian dari politisi Indonesia. Hal itu sangat mempengaruhi pola hubungan sipil-militer di Indonesia pada masa itu dan dalam perkembangan selanjutnya.

#### **D. Hubungan Sipil-Militer**

Sejak awal berdirinya, negara Indonesia telah mengalami masalah yang cukup pelik dalam pola hubungan sipil-militer. Hal itu apat dilihat dalam berbagai peristiwa politik dan militer yang terjadi pada masa tersebut sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara kalangan militer dengan pemerintah, merupakan awal yang tidak baik bagi hubungan sipil-militer di Indonesia.

Tindakan-tindakan pemerintah dalam bidang pertahanan yang hanya bersifat simbolis menimbulkan kekecewaan di kalangan militer. Hal itu mendorong militer untuk mengambil prakarsa sendiri dalam mereorganisasikan lembaga pertahanan. Tindakan militer untuk menempatkan markas besarnya di Yogyakarta serta tindakan memilih seorang panglima tentara dan seorang menteri pertahanan, merupakan bukti dari mandirinya kalangan militer untuk tidak bergantung kepada pemerintah sipil (Sundhaussen, 1986: 33).

Mengenai hubungan sipil-militer di Indonesia, sebenarnya juga tidak terlepas dari pola-pola ideologi politik yang umum terdapat pada militer di negara-negara yang baru merdeka, yaitu antiasing, antikorupsi, antipolitik, dan antipolitisi sipil (Muhaimin, 1982:

33). Kesulitan dalam hubungan sipil dan militer untuk selanjutnya disebabkan oleh perbedaan pandangan dan konsepsi antara politisi sipil yang menekankan perjuangan melalui meja diplomasi, sementara bagi kalangan militer lebih menghendaki pertempuran sampai kemerdekaan penuh tercapai. Bagi kalangan militer, keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam berbagai perundingan (politik diplomasi) dianggap terlalu menilai rendah kemampuan tentara dan kekuatan rakyat (Poeradisastra, 1982: 68).

Pemimpin-pemimpin sipil yang berpegang teguh pada politik diplomasi lebih jauh, disebabkan oleh pandangan kalangan politisi sipil yang ingin menerapkan supremasi sipil atas militer seperti yang berlaku dalam sistem demokrasi Barat. Kabinet Syahrir yang membawa aliran parlementarisme telah menempatkan tentara semata-mata sebagai alat pemerintah, seperti yang lzim terjadi dalam sistem ketatanegaraan tersebut. Hal itu mengakibatkan hubungan yang tidak serasi antara kalangan sipil dan militer. Karena dalam kenyataannya jika dilihat dari cikal-bakal tentara RI, hampir seluruh bekas anggota PETA yang tergabung dalam BKR merupakan kelompok yang dominan, yang sejak semula tidak berurusan dengan otoritas sipil dan sudah terbiasa dengan satu eksistensi yang bebas dari campur tangan atau pengarahan sipil. Bahkan posisi dan keberadaan mereka mempengaruhi posisi tentara dalam krisis-krisis politik di kemudian hari (Sundhaussen, 1986: 33)

Hal yang dianggap sebagai kesalahan paling mendasar oleh pihak militer adalah sikap pemerintah yang selalu menunda terbentuknya tentara yang bersifat nasional, dan keraguan pemerintah terhadap kemampuan militer Indonesia dalam menghadapi serbuan Belanda. Hal itu kemudian melahirkan berbagai kesulitan dan perbedaan pandangan di antara golongan sipil dan militer Indonesia, baik di pusat maupun di daerah yang mempunyai basis politik dan militer kuat.

Perbedaan pandangan antara kalangan militer dengan pemerintah semakin terasa pada waktu berkuasanya Kabinet Sosialis, terutama di bawah Amir Syarifuddin yang hendak mengindoktrinasi kalangan militer dengan visi sosialisnya. Itu dianggap sebagai campur tangan langsung kalangan sipil dalam tubuh militer yang mengakibatkan perpecahan di kalangan militer.

## BAB III

# PROGRAM PEPOLIT AMIR SYARIFUDDIN

### A. Usaha-Usaha Awal

Di dalam sejarah pergerakan Indonesia, peranan dan aktivitas pemuda selalu kelihatan menonjol. Demikian halnya pada masa revolusi, kekuatan yang nampak pada hari-hari permulaan revolusi itu adalah para pemuda militan yang bergerak bersama-sama dengan berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketika Jepang mengadakan kapitulasi, ribuan pemuda yang terlepas dari segala ikatan sebagai akibat runtuhnya struktur pemerintahan Jepang, tidak semuanya dapat tertampung menjadi tentara. Terlebih lagi ketika PETA dan *Heiho* dihapus, tidak ada lagi kegiatan militer bagi ratusan ribu pemuda Indonesia. Hal itu mengakibatkan timbulnya pasukan setempat-setempat. Sebagian kemudian masuk menjadi anggota BKR dan sebagian lagi tetap mempertahankan “kedaulatannya” (Simatupang, 1985: 87).

Banyak di antara mereka yang telah memperoleh senjata selama masa pengambilalihan kekuasaan dari Jepang, dan selanjutnya merekalah yang berperan aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Biasanya mereka muncul dalam kelompok-kelompok

pemuda berskala kecil, bersifat lokal, dan tidak tetap (Pusat Sejarah ABRI, 1983: 20). Karena pemunculanya spontan dan dini dalam sejarah perang kemerdekaan Indonesia, organisasi-organisasi kepe-mudaan itu tampak seolah-olah tidak teratur, beraneka ragam, bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain.

Melihat seperti itu timbul pemikiran di kalangan beberapa kelompok maupun di kalangan unsur-unsur tertentu dalam kepemimpinan republik. Menurut mereka, untuk memusatkan dan menyalurkan tenaga-tenaga pemuda perlu dibentuk organisasi baru yang lebih patuh dan tunduk pada pengawasan pusat. Hal itu sangat penting terlebih lagi bagi Amir Syarifuddin yang menyadari bahwa tanpa pengawasan seperti itu, gerakan pemuda merupakan ancaman yang membahayakan bagi posisinya yang sudah diperhitungkan dalam jajaran pemerintahan republik.

Dalam mewujudkan hasratnya untuk mengadakan pengawasan terhadap gerakan pemuda, pada tanggal 10 November 1945 Amir Syarifuddin memprakarsai kongres pemuda pertama di Yogyakarta. Kongres dihadiri oleh utusan-utusan dari Angkatan Pemuda Indonesia (API, Jakarta), Gerakan Pemuda Republik Indonesia (Gerpri, Yogyakarta), Pelopor (Jakarta), Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI, Jawa Tengah), Pemuda Republik Indonesia (Surabaya, Bandung, Jakarta), Pemuda Muhammadiyah Mataram, Pemuda NU (Surabaya), Pemuda Katholik, Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Putri (Jakarta), dan juga staf wartawan Kementerian Penerangan (Anderson, 1988: 283)

Tujuan kongres untuk menciptakan satu gerak (persatuan) pemuda Indonesia yang bersifat fusi yang berazas sosialis yang bertujuan menegakkan negara Republik Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat (Anderson, 1988: 283). Di dalam kongres itu, Amir memberikan sambutan pidato yang berapi-api, "Hai pemuda jika

kamu memegang bedil di tangan kananmu, peganglah palu di tangan kirimu. Dan Jika kamu memegang pedang di tangan kananmu, peganglah sabit di tangan kirimu" (Hardjito, 1952: 35)

Usaha pendekatan politik yang dilakukan Amir dan orang-orangnya untuk mempersatukan golongan-golongan pemuda ke dalam suatu organisasi tunggal yang berazas sosialis ternyata tidak memenuhi sasaran yang memuaskan. Hanya tujuh dari dua puluh delapan organisasi besar yang hadir bersedia berfusi ke dalam sebuah organisasi tunggal yang kemudian disebut Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) (Anderson, 1988:285). Meskipun begitu, golongan-golongan yang meleburkan diri menjadi Pesindo itu adalah anggota-anggota yang berpengalaman dan berorganisasi baik.

Setelah kongres pemuda itu, Pesindo muncul sebagai kekuatan politik yang sangat berpengaruh. Dari sudut kemiliteran banyak anggota Pesindo yang dipersenjatai sehingga menjadi barisan bersenjata terbesar dan terkuat. Pesindo mempunyai kepentingan yang sama dengan Partai Sosialis. Dukungan yang kuat dari Pesindo merupakan sumbangan yang besar kepada kekuatan politik Partai Sosialis (Kahin, 1980: 201-202)

Sebagai kekuatan dari Partai Sosialis, Pesindo mempunyai tujuan untuk mempercepat terciptanya masyarakat sosialis Indonesia dengan jalan radikal dan revolusioner. Pesindo juga mendesak untuk mempererat hubungan dengan kawan-kawan separtai di luar negeri. Pesindo dalam gerak dan langkahnya memberikan dukungan pada pemerintah yang dikuasai oleh orang-orang sosialis. Pesindo juga mengajukan tuntutan agar tercipta suatu tentara yang berideologi kerakyatan dan penghapusan cara militer yang mungkin memisahkan tentara dari rakyat.

Kedudukan Pesindo menjadi semakin kuat setelah berhasil menjalin hubungan dengan pihak pemerintah. Terlebih lagi setelah



masuknya Amir Syarifuddin dan Djoko Sujono dalam Dewan Penasehat Pimpinan Pesindo. Amir yang telah menjabat Menteri Pertahanan dengan leluasa dapat membantu organisasi itu untuk menyediakan sejumlah besar fasilitas, termasuk uang dan senjata (Nasution, 1963: 281). Selain itu kehadiran Djoko Sujono sebagai seorang bekas *Daidancho* PETA yang mempunyai kecenderungan radikal telah memungkinkan Pesindo untuk memperoleh latihan-latihan militer secara sungguh-sungguh.

Demikianlah Amir telah berhasil menempatkan dirinya dalam posisi penting sejak awal perjuangannya. Kelahiran Pesindo sebagai organisasi yang mempunyai orientasi sosialis merupakan awal kesuksesannya yang sangat penting.

## **B. Realisasi Program Pepolit**

Sejak awal pertumbuhannya, militer Indonesia telah menunjukkan ke arah pertentangan-pertentangan. Kondisi internal tentara Indonesia sangat heterogen asal usulnya, merupakan sumber konflik intern organisasi itu sendiri (Sundhaussen, 1986: 21-30). Keadaan itu menjadi semakin buruk karena munculnya gejala intervensi dari partai-partai politik terhadap kondisi intern militer untuk mendukung dan memperkuat kedudukan mereka. Kekuatan militer menjadi objek pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, khususnya pertentangan di antara golongan politik (Simatupang, 1960: 71)

Pembentukan Kabinet Syahrir I, ternyata telah menandai dimulainya persaingan dan konflik antara pemerintah dengan golongan militer (Markas Besar Tentara). Itu disebabkan karena adanya konsepsi yang berlainan tentang bagaimana seharusnya watak dan peranan tentara Indonesia. Konsepsi kabinet yang dirumuskan oleh Amir membahas tentang tentara Indonesia. Amir menekankan perbedaan yang jelas antara tentara Indonesia (TKR) dengan tentara

sebelumnya yaitu KNIL dan PETA. Dengan sengit Amir menuduh KNIL sebagai tentara bayaran yang rela digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk menindas bangsanya sendiri. Demikian halnya dengan PETA yang tak lebih hanya sebagai alat Jepang untuk mencapai tujuan-tujuan kolonialnya. Berbeda dengan dua tentara di atas, pemuda-pemuda Indonesia yang masuk menjadi TKR mempunyai dasar dan keyakinan politik untuk menjaga keamanan negaranya (Koesnodiprodjo, 1951: 211-213).

Dengan membandingkan kondisi tentara di luar negeri, Amir menunjukkan perbedaan antara tentara NAZI dan pemuda dari tentara merah Rusia. Amir menghubungkan keberhasilan-keberhasilan Rusia dengan keyakinan-keyakinan politik yang teguh dari tentara merah. Menurut Amir, pemuda-pemuda yang masuk TKR semangatnya mirip pemuda Rusia yang masuk tentara merah.

Penilaian Amir tentang KNIL dan PETA telah menyinggung perasaan bekas anggota KNIL dan PETA yang dalam kenyataannya banyak menduduki posisi penting dalam organisasi militer Indonesia. Seperti diketahui, bahwa dalam konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Soedirman telah ditetapkan sebagai Panglima Tertinggi Tentara. Untuk jabatan Kementerian Pertahanan diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Pengangkatan kedua tokoh tersebut dinilai oleh Amir dan politisi lain sebagai gaya yang militeristik. TKR yang didominasi oleh orang-orang bekas anggota PETA memang sudah terbiasa dididik dengan tradisi Jepang. Di dalam tradisi kemiliteran Jepang, seorang kepala angkatan darat dipilih melalui perundingan di kalangan perwira-perwira senior tanpa mengikutsertakan orang-orang sipil (Nasution, 1963: 169). Oleh karena itu, bagi bekas perwira-perwira PETA merasa tidak aneh jika mereka membicarakan pilihan mereka untuk kedudukan panglima tertinggi tentara dan Kementerian Pertahanan dalam konferensi TKR tersaebut.

Terlepas dari semua itu, pada saat itu memang menuntut segalanya berjalan dengan cepat. Kondisi waktu itu telah menandai berubahnya tentara rakyat menjadi tentara revolusi. Di dalam tentara revolusi itu, muncul sistem militer baru yang mengindoktrinasi ide-ide demokrasi. Itu berarti demokratisasi, politisasi, dan ideologisasi pada militer. Munculnya model kepemimpinan baru seperti memilih sendiri komandannya, keakraban hubungan dan menciutnya jarak antara atasan dan bawahan serta luntarnya eksklusivisme militer merupakan ciri-ciri yang menonjol. Yang terpenting dalam politisasi dan ideologisasi di sini adalah tumbuhnya pikiran-pikiran baru tentang politik, kenegaraan, ideologi bangsa di kalangan militer, revolusi, dan lain-lain yang semula menjadi monopoli golongan politisi sipil (Djamhari, 1982: 6).

Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Keamanan Rakyat yang mulai memerintah pada pertengahan bulan November 1945, ternyata belum menyadari lahirnya tentara revolusi tersebut. Mereka beranggapan negatif terhadap bangkitnya prajurit revolusi itu. Mereka merasa trauma terhadap bahaya militerisme, fasisme, dan kolonialisme. Berangkat dari anggapan tersebut, para politisi khususnya yang beraliran kiri selalu mencurigai tingkah laku tentara revolusi. Hal itu disebabkan karena bentuk dan sifat tentara revolusi Indonesia menyimpang dari gagasan politiknya dan memukul kepentingan mereka.

Amir yang tetap beranggapan adanya pengaruh kejiwaan dari didikan Jepang terhadap pemuda dan tentara Indonesia, berusaha untuk melenyapkannya. Dia tidak menghendaki suatu bentuk organisasi militer dengan peranan politiknya yang otonom, terpisah atau bahkan di atas wewenang sipil. Oleh karena itu, ia berambisi sekali untuk memberikan pendidikan politik kepada korps perwira tentara. Sebagai realisasinya, awal bulan Januari 1946, Amir mengusulkan dibentuknya Badan Pendidikan dalam TKR. Langkah

itu juga merupakan jawaban atas keinginan rakyat bahwa tentara mesti menjadi tentara yang berideologi dan cukup dasar politiknya, sehingga yakin akan kewajibannya dan haknya di dalam zaman revolusi ini (Anderson, 1988: 280).

Pada tanggal 19 Februari 1946, badan pendidikan yang digagas Amir secara resmi dilantik. Dalam pelantikan itu ditegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus dibersihkan dari pengaruh buruk yang didatangkan oleh imperialisme Belanda dan fasis Jepang. Terlebih-lebih di kalangan tentara, sifat-sifat buruk itu harus disapu bersih. Ditegaskan pula, bahwa tugas dari badan pendidikan itu adalah membuat setiap prajurit sadar akan peranan sebagai apa yang dinamakan presiden sebagai alat negara.

Sebagai langkah selanjutnya, badan pendidikan mulai merumuskan garis-garis besar tentang pendidikan tentara. Pendidikan itu meliputi lima bidang, yaitu: politik, agama, kejiwaan, sosial, dan pendidikan umum (Djamhari, 1971: 49). Adapun yang menjadi anggota staf badan pendidikan itu adalah Soekono Djojopratiknjo (P. Sosialis) sebagai ketua, Wijono (P. Sosialis), Faried Ma'ruf (Masjumi), Anwar Cokroaminoto (PSI), Soemarsono (Pesindo), Dr. Moestopo dan Abdullah Mukti (Masjumi). Anggota staf itu kemudian diangkat menjadi perwira TRI (Arsip Kementerian Pertahanan No. 656).

Sebenarnya ide dari Amir Syarifuddin untuk memberikan pendidikan politik kepada tentara tidak berbeda dengan konsepsi tentang tentara revolusi, yaitu suatu bentuk tentara baru yang mendobrak dan meninggalkan sistem dan nilai militer kolonial Belanda maupun Jepang. Oleh karena itu gagasan Amir untuk memberikan keyakinan-keyakinan politik kepada tentara dan menciptakan hubungan yang erat antara tentara dan pemerintah, merupakan pemikiran yang bisa diterima oleh banyak perwira tentara.

Lebih-lebih bila dikaitkan dengan prinsip bahwa politik negara adalah politik tentara.

Dibalik ide-ide cemerlang itu, ternyata Amir mempunyai tendensi lain. Ia lebih berhasrat untuk memberikan mereka suatu orientasi ideologi yang akan membuat mereka tetap berada dalam jangkauan golongan-golongan beraliran sosialis. Sejak semula Amir terlah terkesan oleh pola tentara merah yang dilihat oleh tujuan-tujuan sosialis dan dibawah bimbingan politik secara tetap dari suatu partai pemerintah yang kuat (Anderson, 1988: 279). Hal itu jelas mengundang kecurigaan Soedirman dan kebanyakan perwira tentara yang sejak dulu menyangsikan ketulusan perjuangan partai-partai politik. Terlebih lagi terhadap Partai Sosialis. Kongres pemuda pertama yang diprakasai oleh tokoh-tokoh sosialis telah terbukti mengancam persatuan pemuda dan merongrong kepaduan tentara.

Sementara itu untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan dibentuklah Panitia Besar Reorganisasi Tentara. Pada tanggal 20 Mei 1946 hasil kerja dari panitia besar tersebut diumumkan oleh presiden. Beberapa bagian administrasi yang semula masuk dalam markas tertinggi, dialihkan ke Kementerian Pertahanan (Nasution, 1963: 255-256). Pengalihan berbagai bagian dari markas besar ke Kementerian Pertahanan telah menjauhkan dari kekuasaan panglima besar, sehingga komandonya hanya terbatas pada masalah tugas-tugas operasional saja (Dinas Sejarah TNI-AD, 1985: 10).

Setelah reorganisasi itu, ternyata makin dirasakan adanya dualisme pimpinan yang sering bersaing, bahkan bertentangan, yaitu antara Kementerian Pertahanan (Amir Syarifuddin) dengan Markas Besar Tentara (Jenderal Soedirman) yang sejak semula memang telah saling mencurigai. Salah satu bagian yang semula berada di lingkungan Markas Besar Tentara yang kemudian dipindahkan ke Kementerian Pertahanan adalah badan pendidikan. Pada tanggal 30

Mei 1946 nama badan pendidikan itu diubah menjadi staf pendidikan politik tentara (pepolit), yang dipimpin oleh Soekono Djojopratigno.

Keputusan Konferensi TKR mengenai pendidikan tentara yang semula dianggap masuk akal, sejak menjadi pepolit ternyata menimbulkan persoalan tersendiri dan menyimpang dari tujuan semula. Pepolit ternyata dieksploitasi oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk kepentingan politiknya. Pepolit kemudian tumbuh menjadi tempat indoktrinasi dan tempat penyebaran ideologi sosialis-komunis kepada anggota-anggota tentara dan laskar-laskar rakyat.

Sebagai langkah awal setelah berdirinya pepolit, Amir dan tokoh sosialis lainnya segera mencari calon-calon pelajar yang nantinya menjadi pakar dalam penyebaran ideologi sosialis-komunis. Mereka yang bisa diterima sebagai calon pelajar adalah:

- a. Bekas pelaut.
- b. Golongan terpelajar.
- c. Orang-orang yang telah pernah dipilih tentang kesehatannya.
- d. Orang-orang yang telah dipilih tentang kecakapannya.
- e. Orang-orang yang telah pernah mendapat latihan militer (Arsip Kementerian Pertahanan No. 23).

Berdasarkan kriteria tersebut di atas telah ditetapkan, bahwa orang-orang bekas pelajar Sekolah Pelayaran Tinggi sebagai golongan yang paling memenuhi syarat sebagai pelajar. Hal itu tidak terlepas dari peran Mayor Laut R.E. Martadinata, seorang bekas murid sekaligus guru di sekolah itu. Anak-anak bekas pelajar sekolah tinggi itu, ketika ada serbuan dari Belanda, ditempatkan di beberapa pasukan dan turut aktif bertempur. Setelah mereka tercerai berai akibat dari pertempuran, berhasil dikumpulkan kembali oleh Mayor R.E. Martadinata yang menjabat Kepala Staf ALRI daerah Tegal-Pekalongan dan sekitarnya.

Rupanya hasrat yang besar dari para pelajar Sekolah Pelayaran Tinggi untuk melanjutkan pendidikan mereka telah mendorong orang-orang sosialis untuk menarik mereka di bawah lembaga pendidikannya. Setelah diseleksi, mereka yang dianggap memenuhi syarat diterima masuk dalam “Latihan Opsir”. Pada latihan opsir angkatan pertama itu, Amir berhail merekrut 55 orang murid. Mereka menempuh pendidikan selama enam bulan. Selama itu mereka mendapat gaji penuh. (Arsip Kementerian Pertahanan No. 23).

Pada tanggal 3 Mei 1947 diumumkan terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI), bersamaan dengan itu selesai pulalah pendidikan bagi 55 opsir politik yang telah digodog dengan ajaran-ajaran komunis. Mereka diberi *vak diploma's*, yaitu suatu keterangan bahwa mereka telah menamatkan latihan opsir dengan hasil yang memuaskan.

Setelah dinyatakan lulus, opsir-opsir pepolit itu langsung ditempatkan di divisi-divisi, resimen-resimen, dan kesatuan yang lebih rendah. Mereka disebar di seluruh Indonesia, setiap divisi diperbantukan lima orang. Untuk menjamin agar indoktrinasi dapat dilaksanakan bebas dari campur tangan Markas Besar Tentara, mereka diberi kedudukan yang otonom di samping komandan divisi (Parlmutter, 1984: xxvii).

Opsir-opsir pepolit yang telah ditempatkan di dalam kesatuan-kesatuan TNI mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada perwira-perwira TNI. Untuk lebih memperlancar tugas-tugasnya, mereka membentuk asrama-asrama RI sebagai markas pendidikannya. Bagi perwira-perwira TNI yang dinyatakan lulus, akan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi pelajar yang berasal dari kesatuan-kesatuan divisi dan brigade Angkatan Darat, mereka akan dimasukkan dalam Staf Pepolit Divisi



- b. Bagi pelajar yang berasal dari kesatuan-kesatuan Angkatan Udara akan dimasukkan dalam Staf Pepolit AURI
- c. Bagi pelajar yang berasal dari kesatuan-kesatuan Angkatan Laut, akan dimasukkan dalam Staf Pepolit ALRI
- d. Bagi pelajar yang berasal dari organisasi rakyat atau badan-badan perjuangan akan ditempatkan dalam Staf Pepolit Pusat
- e. Demikian halnya bagi pelajar-pelajar yang berasal dari kesatuan-kesatuan Markas Besar Polisi Tentara (MBPT), Markas Besar Polisi Tentara Laut (MBPL), dan Pkolisi Tentara Udara, akan menjadi Staf Pepolit dalam kesatuannya masing-masing (Arsip Kementerian Pertahanan No. 118).

Setelah dibentuknya Staf Pepolit di berbagai kesatuan-kesatuan TNI, berarti TNI telah dimasuki perwira-perwira Pepolit yang telah siap menjalankan kewajibannya sebagai opsir politik yaitu mendekati segala golongan rakyat dan badan-badan pemerintah untuk mengadakan *harmonische samenwerking* dengan segala kesatuan Angkatan Perang Republik Indonesia dalam daerah kesatuannya (Arsip Kementerian Pertahanan No. 118).

Penempatan opsir-opsir politik yang ternyata terdiri dari pemuda yang tergabung dalam Pesindo itu telah menimbulkan kecurigaan di kalangan perwira-perwira tinggi dan partai-partai politik lainnya, terutama Masyumi, PNI, dan golongan Tan Malaka. Ketika diadakan rapat kerja pertama antar perwira markas besar dan para panglima divisi, banyak perwira yang memprotes keberadaan perwira-perwira pepolit serta campur tangannya dalam divisi-divisi. Ternyata terbentuknya Pepolit sama sekali di luar pengetahuan Markas Besar Tentara (Tim Penyusun Jawa Pos, 1990: 8)

Karena Markas Besar Tentara sendiri belum siap untuk mengajukan pemecahan, maka para panglima divisi menentukan sikapnya masing-masing. Sementara sejumlah panglima mengizinkan opsir-



opsir politik untuk menyebarkan pengaruhnya di dalam divisi-divisinya, lainnya mencegah dan menolak kehadiran Pepolit. Gatot Subroto adalah salah satu komandan yang tidak pernah mengakui adanya opsir politik di dalam kesatuannya (Sudirjo, 1985: 93).

Penolakan yang dilakukan oleh beberapa komandan divisi karena mereka tahu misi yang sebenarnya dari kehadiran perwira pepolit itu. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kasus seperti yang telah terjadi di Maospati. Pada bulan Oktober 1946, perwira-perwira letnan II ke atas yang ditunjuk dari Resimen 28/Pati, Resimen 29/Madiun, dan Resimen 30/Bojonegoro dikirim ke Maospati. Mereka ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kader politik tentara. Pendidikan direncanakan akan berlangsung selama dua bulan. Pelajaran yang akan diberikan antara lain mengenai sejarah, ketatanegaraan, hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pendidikan akan disampaikan oleh perwira-perwira pepolit dari Yogyakarta.

Setelah pendidikan berjalan, terbukti para perwira Pepolit lebih menekankan pelajaran tentang marksisme. Di sinilah terjadi pertentangan sengit mengenai faham-faham politik antara lain, nasionalisme, sosialisme, dan komunisme. Pertentangan kemudian mengarah pada terjadinya insiden antara para siswa dan penyelenggara. Sebagian dari siswa menyimpulkan bahwa para perwira Pepolit telah sengaja melakukan infiltrasi faham komunis ke dalam TNI, terutama kepada perwira-perwira lapangan. Setelah para perwira Pepolit mengakui berfaham marxis, maka para siswa tidak mau lagi mengikuti pelajaran (Jayusman, 1984).

Di Divisi IV Surakarta, pelaksanaan Pepolit tidak mendapatkan hambatan yang berarti, bahkan di dalam latihan-latihan atau kursus-kursus politik berhasil mengikutsertakan laskar-laskar rakyat, badan-badan perjuangan, dan pamongpraja, jawatan-jawatan, dan sebagainya. Selain itu, masuknya anggota Balai Peneranan ke Staf

Pendidikan Politik Divisi IV telah memungkinkan pekerjaan mereka berjalan dengan lancar.

Di Divisi IV Surakarta, sebelum terbentuknya Staf Pepolit sudah ada "Pendidikan Tentara Bagian Politik" yang bertugas menanamkan ideologi di resimen-resimen dan batalyon-batalyon. Dengan adanya Staf Pepolit dari Kementerian Pertahanan, maka jumlah anggota badan pendidikan tentara menjadi lebih banyak. Lapangan kerjanya pun diperluas, seperti mengadakan sekolahan-sekolahan, menerjemahkan buku-buku politik, mengadakan hubungan dengan badan-badan atau partai yang progresif, dan sebagainya. Maka tidak mengherankan jika Divisi IV, Pepolit mempunyai bentuk yang lebih besar daripada divisi-divisi yang lain (Arsip Kementerian Pertahanan No. 19).

Meskipun sering terjadi ketegangan-ketegangan antara Kementerian Pertahanan dengan Markas Besar Tentara, tetapi keberadaan perwira-perwira Pepolit itu terus dilanjutkan. Usaha-usaha politik itu menjadi semakin meluas dengan adanya Biro Perjuangan dan inspektorat-inspektoratnya yang praktis dimonopoli oleh orang-orang sosialis, seperti Jenderal Mayor Sukono Djojopratignjo (Ketua Partai Sosialis), Jenderal Mayor Sujono (Kepala Biro Perjuangan Pusat), Jenderal Mayor Kusnandar, Jenderal Mayor Sakirman, dan Kolonel Sutikno (Nasution, 1963: 19).

Untuk lebih meningkatkan usahanya, mereka mendirikan pusat-pusat pendidikan Pepolit, seperti Pusat Pendidikan Muhammad Harun, Marxhause, asrama-asrama RI, dan sebagainya. Tempat-tempat itu merupakan tempat kader sosialis. Yang bisa menjadi siswa dalam pusat-pusat pendidikan itu adalah mereka yang sudah mempunyai pengalaman dalam mobilisasi massa dan berorganisasi atau mereka yang sudah termasuk kader dari partai politik yang berhaluan kiri (Arsip Kementerian Penerangan No. 163).

Dari tempat-tempat itu, ideologi marxisme lebih diperkuat, sehingga setelah lulus akan benar-benar menjadi kader marxis di dalam partainya masing-masing. Hal itu bisa dilihat dari pelajaran-pelajaran yang diberikan, antara lain:

1. Teori-teori Marxisme-Leninisme, yang mengenai pokoknya:
  - a. Pokok-pokok dialektis-materialisme, terutama tentang historis materialis
  - b. Asal mulanya negara dan perubahannya, dan perjuangan kelas
  - c. Pengertian tentang negara-negara bourgeois
  - d. *Dictatuur* proletar dan negara Sovyet
  - e. Negara Republik Indonesia dan perhubungannya dengan revolusi nasional sekarang
2. Politik ekonomi, yang mengenai pokoknya:
  - a. Pokok-pokok ekonomi marxis terutama yang mengenai ilmu nilai (*waardeleer*)
  - b. Teopasingnya ekonomi marxis terhadap keadaan di masyarakat kita pada saat ini
    - 1) Terutama tentang perburuhan
    - 2) Soal pertanian
    - 3) Soal imperialisme
  - c. Sedikit tentang perekonomian dan negara Sovyet
3. Soal-soal lain yang mengenai perjuangan kelas.
  - a. Ilmu revolusi, terutama hukum revolusi pada umumnya dan teopasingnya di Indonesia
  - b. Penyakit kiri daripada kiri atau "leifwing komunisme". Juga mengenai pembelokan-pembelokan dalam revolusi, terutama di negara kita.

4. Soal nasional
  - a. Sifat dan bentuknya lefel nasional
  - b. Perbandingan antara bangsa (NAZI) dan klas
  - c. Soal "nasionaliteiten"
5. Soal organisasi
6. Soal agitasi dan propaganda
7. Soal strategi dan teknik
8. Soal kemiliteran
9. Soal gerakan buruh dan sarekat sekerdja
10. Soal gerakan wanita (Arsip Kementerian Penerangan No. 163).

Para pelajar di pusat-pusat pendidikan selain diberikan teori marxis, juga diterjunkan langsung ke lapangan. Karena sebagai pelajar sekolah marxis mereka harus berjuang di tengah-tengah masyarakat dan berhubungan erat dengan masyarakat (Arsip Kementerian Penerangan No. 163). Alimin, Maruta Darusman, Soemarsono, Moewalladi, Abdul Rachman, Gondhe Pratama Soedijat, Djaetun, Sardjono, adalah orang-orang kiri yang berperan besar dalam pendidikan itu.

Ketika para perwira Pepolit dengan giat melancarkan usahanya, Markas Besar Tentara mengambil langkah dengan jalan membentuk sebuah Dewan Penasehat Politik Pimpinan Tentara. Para panglima divisi juga diminta untuk membentuk penasihat pada tingkat divisi. Tugas dari Dewan Penasehat Politik tersebut adalah memberikan nasihat kepada pimpinan tentara mengenai soal-soal politik (Sundhaussen, 1986: 47).

Dengan membentuk Dewan Penasehat Politik itu, tentara berusaha menyingkirkan Staf Pendidikan dan Korps Pepolitnya. Yang diangkat menjadi penasihat-penasihat politik tentara adalah orang-orang yang tegas-tegas menentang garis politik pemerintah

(Syahrir-Amir), seperti; Sayuti Melik (dari Dewan Perjuangan Jawa Tengah), Tirwan (dari Dewan Perjuangan Jawa Barat), Soetomo (dari Pusat BPRI), dan Anwar Cokroaminoto (Dinas Sedjarah TNI-AD, 1985: 31).

Markas Besar Tentara yang mempunyai Dewan Penasehat Politik dan Kementerian Pertahanan yang mempunyai Korps Pepolit, tumbuh menjadi dua kekuatan yang saling berhadapan. Keduanya saling bersaing bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya dalam usaha merangkul militer agar tetap berada di bawah pengaruhnya.

## BAB IV

# DAMPAK PELAKSANAAN PEPOLIT

Pelaksanaan Pepolit pada setiap kesatuan tentara terbukti telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dan perpecahan antar sesama anggota tentara. Pertarungan kepentingan ideologi nampak lebih mendominasi. Dampak pelaksanaan Pepolit menjadi lebih kentara lagi ketika pada tanggal 17 Januari 1948, Amir Syarifuddin menandatangani Persetujuan Renville. Persetujuan itu merupakan kekalahan diplomasi terbesar dalam sejarah revolusi Indonesia. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer.

Reaksi keras segera muncul dari pihak-pihak yang tidak menyetujui Renville dan mencela kebijaksanaan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Hal itu menimbulkan keretakan dalam tubuh Kabinet Amir. Menteri-Menteri dari Masyumi dan PNI menarik diri, bahkan menuntut pembubaran kabinet. Akhirnya, pada tanggal 24 Januari 1948 Amir menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Presiden kemudian menunjuk Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk menyusun kabinet baru. Sebagai pemegang mandat dengan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi, Hatta menyediakan empat kursi untuk golongan Amir (sayap kiri). Tawaran itu ditolak,

karena golongan kiri menuntut sembilan kursi dan menghendaki posisi penting seperti Perhubungan-Sosial, Kementerian Penerangan, Kementerian Pertahanan, dan posisi penting lainnya (Dinas Sejarah TNI-AD, 1982: 79). Akhirnya, Hatta membentuk kabinet baru yang berbentuk presidensiil tanpa mengikutsertakan golongan sayap kiri.

Golongan kiri yang tidak masuk dalam kabinet kemudian menyatakan diri sebagai oposisi. Mereka kemudian menamakan diri Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang merupakan fusi dari kekuatan-kekuatan dan partai-partai sayap kiri (Partai Buruh, Partai Sosialis-Amir dan Pesindo) dengan Amir sebagai ketuanya. Setelah Kabinet Presidensiil terbentuk, Hatta segera menghadapi kesukaran-kesukaran sebagai akibat Perjanjian Renville. Secara eksplisit Hatta mengakui Perjanjian Renville dan segala risiko yang ditimbulkannya.

Garis-garis kebijaksanaan Hatta yang utama adalah rekonstruksi dan rasionalisasi (Re-Ra) angkatan bersenjata dan seluruh aparat negara. Hal itu dilaksanakan untuk mencari keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Karena pendapatan negara tidak bisa menutup ongkos hidup negara (Nasution, 1968: 4-5). Jadi dasar Re-Ra adalah kondisi perekonomian yang buruk akibat blokade Belanda. Apalagi negara Indonesia, akibat Perjanjian Renville wilayahnya menjadi sempit harus menampung penungsi, tentara-tentara dan keluarganya yang ditarik dari daerah kantong.

Kebijaksanaan Re-Ra Hatta tersebut sebenarnya merupakan realisasi dari rencana Amir Syarifuddin sewaktu menjabat sebagai perdana menteri dan Menteri Pertahanan. Konsep dan ide tentang Re-Ra datang dari golongan kiri yang dikenal dengan nama "Mosi Baharuddin". Ketika itu 20 Desember 1947 Zainal Baharuddin yang duduk sebagai anggota fraksi sayap kiri dalam KNIP, mengajukan suatu mosi agar di kalangan angkatan perang diadakan rasionalisasi. Mosi memuat dua hal pokok, yaitu rasionalisasi angkatan perang

dan menempatkan organisasi, administrasi dan masalah pertahanan di bawah Menteri Pertahanan (Nasution, 1963: 43)

Mosi Baharuddin itu diterima oleh BP KNIP, yang kemudian dilaksanakan oleh Kabinet Amir. Mosi tersebut berdasarkan pada cita-cita "satu tentara", "satu komando" dalam bentuk dan susunan yang efektif. Sebagai realisasi pelaksanaan Re-Ra pada tanggal 2 Januari 1948, presiden menandatangani sebuah dekret yang memerintahkan agar semua kekuasaan di bidang pertahanan dipusatkan di tangan Menteri Pertahanan. Dekret itu kemudian dikenal sebagai Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1948 (Sundhaussen, 1986: 64)

Berdasarkan penetapan presiden itu, dalam Kememnetrian Pertahanan kemudian dibentuk staf umum angkatan perang. Duduk sebagai kepala staf adalah Komodor Suryadharma dan Kolonel Simatupang sebagai wakilnya. Sementara itu Jenderal Soedirman diperkecil perannya dari Panglima Besar Angkatan Perang menjadi Panglima Angkatan Perang Mobil (Nasution, 1968: 132). Dengan demikian, ia harus tunduk kepada Kepala Staf Umum yang dijabat oleh tokoh yang lebih rendah pangkatnya.

Jika diperhatikan lebih jauh dalam penetapan presiden itu, akan nampak bahwa hakikat dari Mosi Baharuddin secara politis merupakan keinginan menempatkan TNI sepenuhnya berada di bawah kekuasaan sipil. Lebih jauh lagi pelaksanaan Re-Ra menguntungkan dan memperkuat kedudukan Amir dan melemahkan posisi Soedirman. Hal itu harus dilihat dari dualisme pimpinan antara Soedirman (markas besar) dengan Amir Syarifuddin (Kementerian Pertahanan), yang sejak awal saling bersaing dan berebut simpati dari militer.



## BAB V

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Di dalam setiap revolusi, apakah itu revolusi nasional atau revolusi sosial, apakah itu bersifat merebut kekuasaan dari tangan asing atau aksi massa yang bermaksud mengubah tatanan masyarakat yang sudah ada, masalah kekuatan angkatan bersenjata adalah sangat penting. Amir Syarifuddin yang menyadari arti pentingnya potensi dan eksistensi angkatan bersenjata bagi perjuangan politiknya, sejak semula telah menaruh perhatian pada usaha pengembangan kekuatan bersenjata, baik itu melalui tentara sebagai tentara resmi pemerintah, maupun melalui laskar-laskar atau badan-badan perjuangan.

Usaha Amir Syarifuddin untuk mengolah angkatan bersenjata reguler dilakukan dengan cara memberikan pendidikan politik di kalangan tentara. Untuk usaha itu Amir mendirikan suatu lembaga yaitu Pepolit (Pendidikan Politik Tentara). Pepolit itu kemudian ditanamkan ke dalam kesatuan-kesatuan militer seperti angkatan darat, angkatan laut, polisi tentara, polisi tentara laut, dan sebagainya. Melalui Pepolit itulah kesatuan-kesatuan militer Indonesia digodog dengan konsepsi-konsepsi dan ideologi komunis.

Pelaksanaan Pepolit pada setiap kesatuan tentara itu telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dan perpecahan antar sesama anggota tentara. Pertarungan kepentingan ideologi tampak lebih mendominasi. Dampak pelaksanaan Pepolit menjadi lebih kentara lagi ketika pada tanggal 17 Januari 1948, Amir Syarifuddin menandatangani Persetujuan Renville dengan pihak Belanda. Persetujuan itu merupakan kekalahan diplomasi terbesar dalam sejarah revolusi Indonesia. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian baik di bidang ekonomi, politik, maupun militer.

## **B. Saran**

Penulisan tentang pelaksanaan Pepolit ini disadari oleh penulis masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu sangat terbuka bagi para penulis/pemerhati/peneliti sejarah politik, sejarah militer, dan seterusnya untuk mengungkapkan lebih rinci dan mendalam. Selain itu, melalui studi ini masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap ideologi komunis yang ditanamkan melalui berbagai bidang kehidupan.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber-Sumber Arsip

Arsip Kementerian Penerangan No. 163

Arsip Kementerian Pertahanan: No. 19, No. 23, No. 118, No. 656

## B. Buku-Buku Teks

Abdullah, T.

1980 "Sipil Militer di Dunia Ketiga: Sebuah Raksonomi Pengantar", dalam PRISMA, No. 12. Jakarta: LP3ES

Abdulgani, R.

1963 *Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Jajasan Prapantja

Anderson, B.

1988 *Revoeloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Crouch, H.

1986 *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan

Dinas Provoost TNI-AD

1981 *Sedjarah Pengabdian Corps Polisi Militer Angkatan Darat*. Jakarta: Yayasan Gadjah Mada

Dinas Sedjarah TNI-AD

- 1982 *Sedjarah TNI-AD Kodam VII/Diponegoro, 1945-1973*. Jakarta
- 1985 Soedirman: Prajurit TNI Teladan. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD

Djamhari, S.A.

- 1971 *Ichtisar Sedjarah Perjuangan ABRI (1945-Sekarang)*. Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI Dephankam
- 1982 *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD

Feith, H.

- 1980 "Sistem Politik Indonesia, suatu Tinjauan dan Pembelaan", dalam Arbi Sanit, *Sistem Politki Indonesia, Penghampiran dan Lingkungan*. Jakarta: Pulsar

Hardjito

- 1952 *Risalah Gerakan Pemuda*. Djakarta: Pustaka Antara

Jayusman, I.

- 1984 *Catatan-Catatan yang Berserakan, tentang Peristiwa dan Pertempuran Selama Perjuangan 1945-1948*. Semarang: CV Aneka Ilmu

Kahin, G.Mc.T.

- 1980 *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Terjemahan Ismail bin Muhammad (Hons) dan Zaharon bin Abdul Rasjid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia

Karim, M.R.

1983 *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: CV Radjawali

Koesnodiprodo

1951 *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta: SK Seno

Malik, A.

1950 *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*. Jakarta: Widjaja

Muhaimin, Y.A.

1982 *Perkembangan Politik Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nasikun

1984 *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali

Nasution, A.H.

1963 *Tentara Nasional Indonesia*. Jilid I. Jakarta/Bandung: Ganaco NV

1968 *Tentara Nasional Indonesia*. Jilid II. Jakarta: Seruling Masa

1978 *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 7-8. Bandung: Disjarah TNI-AD dan Angkatan

Notosusanto, N.

1978 *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu Pengalaman*. Jakarta: Yayasan Idayu

Onghokham

1985 "Revolusi Indonesia, Mitos dan Realitas", *Prisma*  
No. 8. Jakarta: LP3ES

Parlmutter, A.

1984 *Militer dan Politik*. Terjemahan Sahat Simamora.  
Jakarta: CV Radjawali

Poeradisastra, S.I.

1982 "Oerip Soemohardjo: Kebungkaman yang Ampuh",  
dalam PRISMA, No. 9. Jakarta: LP3ES

Pusat Sejarah ABRI

1983 *Badan-Badan Perjuangan*, Jakarta: Dephankam

Ricklef, M.C.

1989 *Sejarah Indonesia Modern*. Penerjemah Dharmono  
Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University  
Press

Sanit, A.

1981 *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan  
Politik dan Pembangunan*. Jakarta: CV Radjawali

Simatupang, T.B.

1985 *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai*. Jakar-  
ta: Pustaka Sinar Harapan

1980 "Menelaah Kembali Peranan TNI: Refleksi Kese-  
jarah dan Perspektif Masa Depan", dalam PRISMA,  
No. 12. Jakarta: LP3ES

1960 *Pemerintah-Masyarakat-Angkatan Perang*. Djakarta:  
PT Indira

Soekoco

1955 *Propaganda dalam Praktek*. Bandung: Pelangi Bookstore

Sudirjo, R.U.

1985 *Panglima Soedirman: Sebuah Kenangan Perjuangan*. Jakarta: Badan Penerbit Almanak RI

Sundhaussen, U.

1986 *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Penerjemah Hasan Basari. Jakarta: LP3ES

Suyatno

1984 "Masyarakat Daerah dalam Revolusi Indonesia, Aspek Sosial dalam Revolusi Nasional", *Prisma* No. 8. Jakarta: LP3ES

Tim Penyusun Jawa Pos

1990 *Lubang-Lubang Pembantaian: Petualangan PKI Madiun*. Jakarta: Pustaka Grafiti

Wriggins, H.

1982 "Integrasi Bangsa", dalam Yahya A. Muhaimin dan Colin Mc. Andrew, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press



# Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal

PACITAN MARKAS GERILYA PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN  
PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN KEDUA

Nurdiyanto

KRIMINALITAS DI SRAGEN PERIODE 1948–1949 KAJIAN REVOLUSI SOSIAL  
DI TINGKAT LOKAL

Darto Harnoko

REALISASI PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK TENTARA DI JAWA TAHUN 1946 -1948

Tugas Tri Wahyono

Perpustakaan  
Jenderal



ISBN 602-17271-7-7

